Penyusunan

RENCANA INDUK KELITBANGAN (RIK) KOTA TASIKMALAYA

Tahun 2021

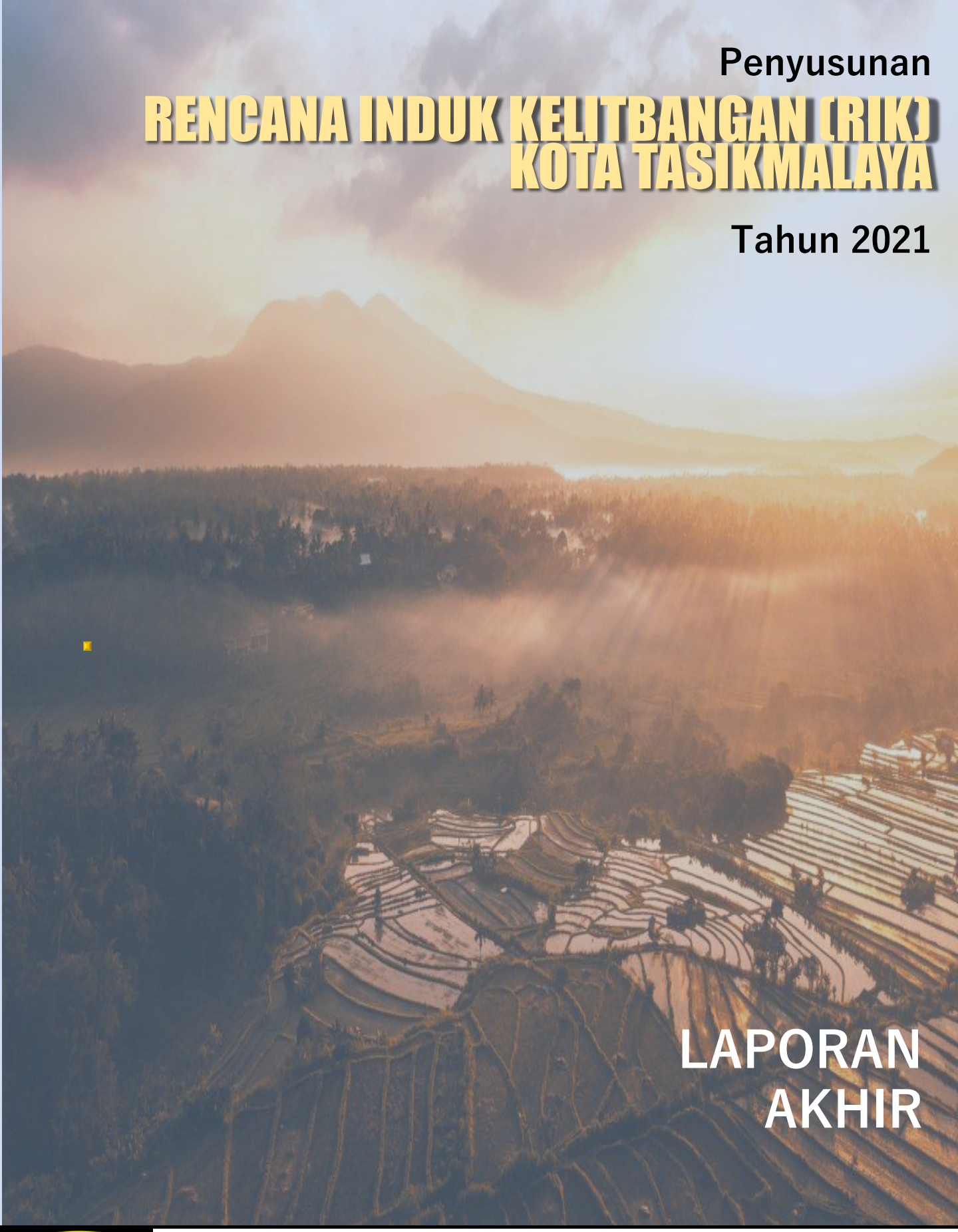

LAPORAN AKHIR

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Akhir Pekerjaan *Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya* sesuai batas waktu yang ditentukan.

Laporan Akhir ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh konsultan, sehingga segala masukan, kritikan, saran, dan tanggapan akan menyempurnaan laporan ini.

Laporan Akhir ini memuat 5 (lima) bab yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum, Arah Kebijakan Kelitbangan, Strategi Pelaksanaan Kelitbangan, dan Penutup.

Atas masukan, arahan dan evaluasi dari pihak terkait, terutama di jajaran Bappelitbangda Kota Tasikmalaya semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan laporan ini, kami ucapkan banyak terimakasih.

Tasikmalaya, Nopember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Maksud,Tujuan dan Sasaran 1-3
1.3 Dasar Hukum 1-4
1.4 Ruang Lingkup 1-5
1.4.1 Ruang Lingkup Pekerjaan 1-5
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 1-6
1.5 Pendekatan dan Metodologi Pelaksanaan 1-7
1.5.1 Pendekatan 1-7
1.5.2 Metodologi Pelaksanaan 1-8
1.5.2.1 Teknik Pengumpulan Data 1-9
1.5.2.2 Metode Analisis 1-11
1.6 Keluaran 1-12
1.7 Sistematika Panyajian 1-12

BAB 2 : GAMBARAN UMUM

2.1 Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota 2-1
2.1.1 Letak Geografis 2-1
2.1.2 Wilayah Administrasi 2-2
2.2 Kondisi Fisik Wilayah 2-4
2.2.1 Topografi, Morfologi dan Kemiringan Lereng 2-4
2.2.2 Geologi 2-9
2.2.3 Jenis Tanah 2-9
2.2.4 Klimatologi 2-12

2.2.5 Hidrologi 2-13
2.2.6 Rawan Bencana 2-14
2.3 Kondisi Sosial Demografi 2-17
2.3.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk 2-17
2.3.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk 2-18
2.3.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur 2-18
2.3.4 Ketenagakerjaan 2-20
2.4 Kondisi Perekonomian 2-21
2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana 2-24
2.5.1 Sarana Pendidikan 2-24
2.5.2 Sarana Kesehatan 2-25
2.5.3 Sarana Peribadatan 2-26
2.5.4 Sarana Perdagangan 2-26
2.6 Kemiskinan 2-28
2.7 Gambaran Umum Kelitbangan 2-29
2.7.1 Kelembagaan 2-29
2.7.2 Sumberdaya Kelitbangan 2-33
2.7.3 Pendanaan Kelitbangan 2-34
2.7.4 Kerjasama Kelitbangan 2-35
2.8 Potensi dan Permasalahan 2-35
2.9 Peluang dan Tantangan 2-36
2.10 Isu Strategis Kota Tasikmalaya 2-37

BAB 3 : TINJAUAN KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 3-1
3.1.1 Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 3-2
3.1.2 Peraturan Walikota Kota Tasikmalya Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 3-10

3.2 Arah dan Strategi Kebijakan Kelitbangan Daerah 3-12
3.2.1 Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah 3-12
3.2.2 Strategi Kebijakan Kelitbangan Daerah 3-20
3.3 Indikasi Program 3-25

BAB 4 : STRATEGI PELAKSANAAN KELITBANGAN

4.1 Kelembagaan 4-1
4.1.1 Koordinasi Pelaksanaan 4-1
4.1.2 Keterlibatan Institusi Kelitbangan 4-4
4.1.3 Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan 4-6
4.2 Evaluasi Pelaksanaan 4-9

BAB 5 : PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Tasikmalaya 2-2
Tabel 2.2 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan penguapan Menurut Bulan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 2-12
Tabel 2.3 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 2-12
Tabel 2.4 DAS dan Sub DAS di Kota Tasikmalaya 2-13
Tabel 2.5 Pos Hidrologi di Kota Tasikmalaya 2-13
Tabel 2.6 Danau, Rawa, SITU, Telaga dan Waduk Kota Tasikmalaya 2-14
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2020 2-17
Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Kota Tasikmlaya Tahun 2016-2020 2-18
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kota Tasikmlaya Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 2-19
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang lalu tahun 2019-2020 2-20
Tabel 2.11 PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku 2020 menurut lapangan usaha 2016-2020 2-21
Tabel 2.12 PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2020 menurut lapangan usaha 2016-2020 2-22
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2020 menurut lapangan usaha 2016-2020 2-23
Tabel 2.14 Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Status di Kota Tasikmalaya ... 2-24
Tabel 2.15 Sarana Pendidikan Negeri di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 2-24
Tabel 2.16 Sarana Pendidikan Swasta di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 2-25
Tabel 2.17 Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 2-25
Tabel 2.18 Jumlah Sarana Peribadatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 2-26
Tabel 2.19 Jumlah Sarana Perdagangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 2-27
Tabel 2.20 Jumlah Pasar Rakyat di Kota Tasikmalaya Tahun 2019 2-27
Tabel 2.21 Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2014-2019 2-29
Tabel 2.22 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Unit Kerja 2-34

Tabel 2.23 Anggaran Per Program Tahun 2019 2-34

Tabel 3.1 Jenis Kelitbangan dan Keluarannya 3-13
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi V Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 3-21
Tabel 3.3 Kajian yang Sudah dan Belum Dilaksanakan OPD Terkait 3-27
Tabel 3.4 Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3-35
Tabel 3.5 Program Prioritas Bidang Sosial Kemasyarakatan 3-39
Tabel 3.6 Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah 3-46
Tabel 3.7 Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK 3-50

Tabel 4.1 Jenis-jenis Koordinasi Kelitbangan 4-3
Tabel 4.2 Bentuk-bentuk Kerjasama yang Diharapkan dengan Para Pemangku Kepentingan 4-6
Tabel 4.3 Kerjasama dan Sinergitas Antar Lembaga/Instansi 4-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Tasikmalaya 1-6
Gambar 1.2 Metodologi Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya 1-8

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kota Tasikmalaya 2-5
Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Tasikmalaya 2-6
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kota Tasikmalaya 2-7
Gambar 2.4 Peta Morfologi Kota Tasikmalaya 2-8
Gambar 2.5 Peta Geologi Kota Tasikmalaya 2-10
Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kota Tasikmalaya 2-11
Gambar 2.7 Diagram Piramida Struktur Penduduk Kota Tasikmalaya Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 2-19
Gambar 2.8 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan, dan Penelitian Daerah Kota Tasikmalaya 2-32

Gambar 3.1 Kerangka Perencanaan Operasional 3-2
Gambar 3.2 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi I Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 3-19
Gambar 3.3 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi II Bidang Sosial Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 3-19
Gambar 3.4 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi II Bidang Ekonomi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 3-19
Gambar 3.5 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi III Bidang Infrastruktur Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 3-20
Gambar 3.6 Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi IV Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 3-20

Gambar 4.1 Integrasi Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 4-9
Gambar 4.2 Alur Seleksi dan Evaluasi Kegiatan Penelitian 4-10

Bab 1
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Barat, Wilayah Kota Tasikmalaya memiliki luas ± 17.156 ha, secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu berada pada 1080 08' 38" - 1080 08' 38" BT dan 70 10' - 70 26' 32" LS di bagian tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung) adalah ± 105 km dan dari Ibukota Negara (Jakarta) adalah ± 225 km. Wilayah Kota Tasikmalaya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong) serta Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy, Kecamatan Cihaurbeuti dan Cikoneng);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya dan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan); dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun

kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis, sehingga dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaran pemerintahan yang optimal, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas.

Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di Kota Tasikmalaya. Pertimbangan perlunya hasil penelitian sebagai masukan dalam penyiapan kebijakan adalah:

1. Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya dapat lebih ditingkatkan bila dilengkapi dengan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti;
2. Hasil penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan melalui penyediaan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian empiris yang relevan dengan kebutuhan setempat;
3. Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu kemampuan daerah secara lebih mandiri.

Sehubungan dengan pertimbangan strategis tersebut, berbagai stakeholder di bidang penelitian dan pengembangan harus mampu membaca berbagai situasi, kondisi, dan berbagai isu-isu strategis yang terjadi, serta mampu beradaptasi dengan berbagai prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik Nasional maupun Daerah.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagai update/pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, pada pasal 9 mengamanatkan bahwa Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan tersebut terdiri dari:

a) **Rencana Induk Kelitbangan (RIK)**, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun; dan
b) Rencana Kerja Tahunan.

Berdasar Pada amanah dan fenomena diatas Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tasikmalaya akan melakukan Kegiatan **"Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2025**", sebagai sebuah dokumen kebijakan yang dapat memberikan arahan kepada pelaku penelitian dan pengembangan agar hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan arahan kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Tasikmalaya ini adalah:

1. Mengidentifikasi gambaran dan kondisi penelitian dan pengembangan;
2. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan dalam kelitbangan Kota Tasikmalaya;
3. Merumuskan Arah Kebijakan dan Strategi Pentahapan Kelitbangan Kota Tasikmalaya;
4. Merumuskan strategi pelaksanaan Kelitbangan Kota Tasikmalaya; dan

5. Memberikan rancangan strategi dan kebijakan pembangunan kelitbangan sebagai bahan/suplemen penyusunan RPJMD periode berikutnya.

c. Sasaran

Sesuai dengan maksud dan tujuan di atas, maka Sasaran produk yang diharapkan dari hasil pekerjaan ini adalah memberikan arah pelaksanaan program/kegiatan kelitbangan untuk menunjang pencapaian visi dan misi serta program prioritas pembangunan tahun 2018-2023 di Kota Tasikmalaya.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Tasikmalaya Tahun 2022 – 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

7. Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daeran Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022; dan
8. Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan, yaitu:

I. Kegiatan Teknis terdiri:

1. Tahapan Pekerjaan:
   a. Mengidentifikasi, mengolah data primer, data sekunder, informasi dan literatur pendukung yang terkait dengan kelitbangan;
   b. Menganalisis data dan informasi berkaitan dengan kondisi penelitian dan pengembangan di Kota Tasikmalaya;
   c. Merumuskan permasalahan dan isu strategis penelitian dan pengembangan di Kota Tasikmalaya;
   d. Melakukan pemetaan kebutuhan kajian yang mendukung Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota sesuai tema pembangunan dalam RPJMD dan prioritas pembangunan dalam RPJPD;
   e. Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan indikatif kelitbangan dan pembiayaan;
   f. Merumuskan kebutuhan kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur serta kebutuhan sarana dan prasarana;
   g. Menyusun Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2022-2025; dan
   h. Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir
2. Ruang Lingkup Substansi:
   a. Kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan kelitbangan utama (penelitian; pengkajian; pengembangan; perekayasaan; penerapan; pengoperasian; dan evaluasi kebijakan) yang dikelompokkan kedalam agenda prioritas sesuai amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 yaitu: 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; 3)

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah; dan 4) Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek; dan

b. Fokus kelitbangan adalah yang terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah Kota Tasikmalaya.

II. Kegiatan Ekpos dan Diskusi

Kegiatan diskusi dilakukan untuk membahas progres tiap tahapan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya kegiatan diskusi ini meliputi :

- ✓ Ekpos dan Diskusi pembahasan laporan pendahuluan;
- ✓ Ekpos dan Diskusi pembahasan laporan akhir.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam pekerjaan ini yaitu Kota Tasikmalaya.

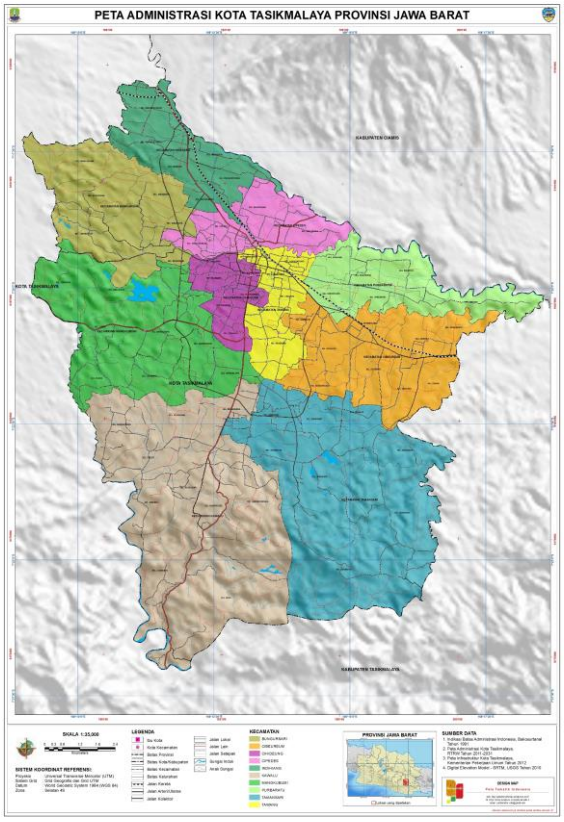

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kota Tasikmalaya

1.5. Pendekatan dan Metodologi Pelaksanaan

Metode pendekatan adalah metode yang akan menjelaskan secara keseluruhan proses-proses apa saja yang dilakukan dalam menyusun pekerjaan ini. Semua proses digambarkan, dijelaskan hubungan, dan kedudukan antar prosesnya. Maksud dari penggambaran ini agar semua kedudukan proses dapat dilihat secara keseluruhan dan tiap-tiap langkahnya dapat didiskusikan untuk disempurnakan.

Dalam metode pelaksanaan akan diberikan penjelasan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan. Masing-masing metode ini akan dijabarkan di bawah ini.

1.5.1 Pendekatan

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan pada analisis terkait peraturan perundang-undangan dan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya dan analisis yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang ada di Kota Tasikmalaya, serta mendeskripsikan atau menjelaskan hasil dari analisis kuantitatif, agar lebih mudah dipahami. Adapun pendekatan kuantitatif lebih berkenaan dengan kegiatan analisis data bersifat statistik (nilai/skor/angka/numerik) menggunakan pembobotan, berupa metode *pairwise comparison* atau AHP (*Analytical Hierarchy Process),* yaitu suatu model pengambilan keputusan yang berguna untuk menentukan prioritas dan membuat keputusan terbaik. Diagram hierarki dalam analisis AHP yang terdiri dari tujuan kajian, kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya. .

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penyusunan kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya ,meliputi sebagai berikut :

1. Pendekatan Aspek Teknis

   Pendekatan teknis merupakan pendekatan berdasarkan standar-standar perencanaan, pedoman dan kriteria yang berlaku sehingga produk perencanaan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, baik itu dalam tahap survey, maupun dalam tahap analisis

2. Pendekatan Aspek Kebijakan Publik

   Pendekatan Kebijakan Publik adalah pendekatan berdasarkan pada kegiatan kebijakan publik.

1.5.2 Metodologi Pelaksanaan

Gambar 1.2
Metodologi Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya

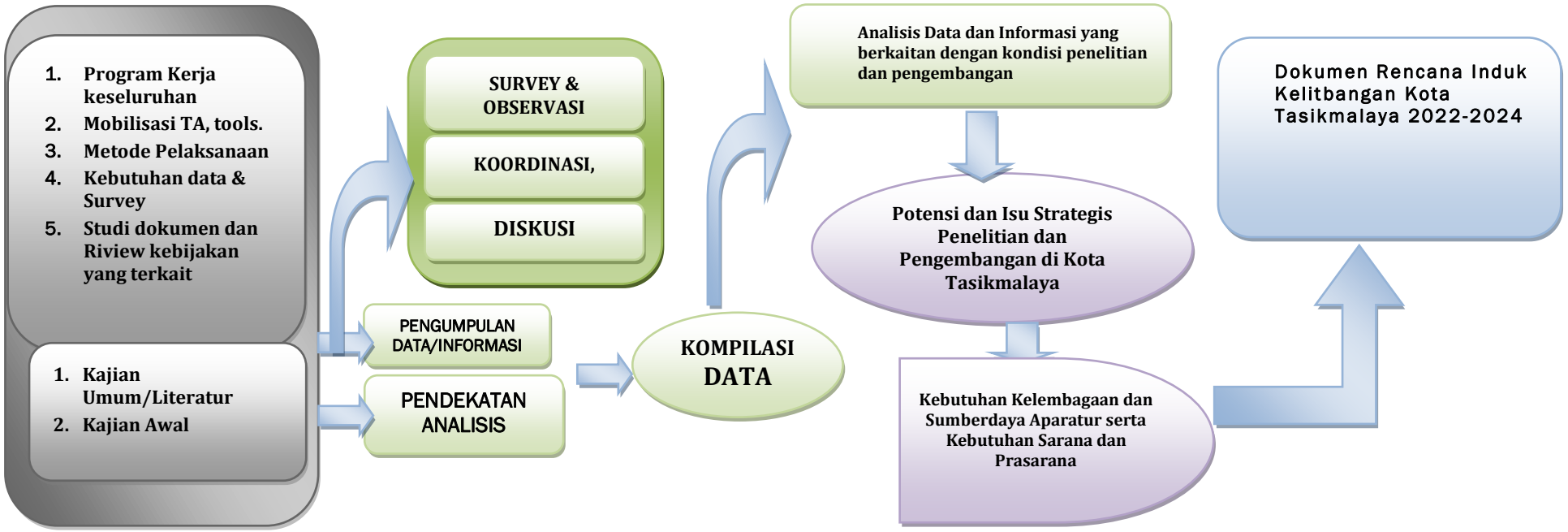

Berdasarkan diagram diatas kegiatan yang dilakukan untuk mencapai *output* (keluaran) yang diharapkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Tahapan persiapan

Pada dasarnya tahap persiapan memuat kegiatan-kegiatan non teknis dalam pelaksanaan pekerjaan, adapun tahapan persiapan ini yaitu :

- Program Kerja keseluruhan
- Mobilisasi TA, *tools*.
- Metode Pelaksanaan
- Kebutuhan data & Survey
- Studi dokumen dan Riview kebijakan yang terkait

b) Tahapan pengumpulan dan kompilasi data

Pengumpulan data dilakukan menurut parameter fokus dan subtansi studi penelitian terkait yang disusun berdasarkan data primer dan data sekunder. Penggalian dan perekaman penelitian sebagai data primer menggunakan teknik survei pengamatan, serta teknik wawancara kepada para nara sumber di lokasi studi penelitian. Data sekunder menggunakan teknik dokumentasi resmi tertulis melalui kajian teori suatu pustaka, studi literatur, dan peraturan atau kebijakan pemerintah.

c) Tahapan Analisis

Tahap ini merupakan proses penyusunan kajian analisis dan pembahasan terhadap hasil identifikasi temuan data penelitian dengan pendekatan pada sintesis teori-teori pustaka, data literatur, dan peraturan pemerintah maupun arahan kebijakan kawasan. Kajian analisis dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, baik disajikan secara tertulis maupun gambar.

1.5.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Melihat kondisi suatu wilayah yang ada pada suatu tempat akan berbeda pula karakteristik permasalahannya dengan di tempat lainnya. Ini dapat disebabkan oleh banyak hal yang cukup kompleks.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey, yaitu melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui

pemetaan, pengukuran dan wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder melalui tinjauan pustaka dan instansional, secara garis besar pendekatan kajian ini meliputi :

(1) Persiapan dan pemantapan kerangka pendekatan studi.

(2) Kajian pendahuluan, studi literatur, penyusunan proposal teknis, dan memberi *guide line* bagi tim surveyor.

(3) Pemetaan/pengukuran dan *pendelineasian* lahan.

(4) Pengumpulan data lapangan, basis riset lapangan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Wilayah sample ditentukan dengan cara *stratified random sampling* berdasarkan pertimbangan letak lahan.

(5) Analisis data dengan pendekatan deskriptif analitik secara kuantitatif dan kualitatif.

(6) Penyusunan laporan interim, dan laporan akhir sedangkan pada tahap akhir laporan akhir dilakukan pembahasan laporan akhir.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui:

a) **Studi Kepustakaan** Untuk mempelajari parameter-parameter dari suatu lingkungan sebagai faktor-faktor penentu dalam upaya penanganan lahan kosong/lahan terlantar yang menjadi tujuan studi serta melakukan tinjauan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan materi studi.

b) **Survey Lapangan**

Dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder tentang kondisi penelitian dan pengembangan di Kota Tasikmalaya, melalui:

- Wawancara awal, yang dilakukan
- Survey Visual

c) **Survey Instansional**

Survei instansional dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif mengenai peraturan daerah, arahan kebijakan, kewenangan atau tupoksi instansi yang ada di Kabupaten/Kota. Data yang diperoleh digunakan sebagai alat

bantu dan panduan analisis agar dalam proses kajian pembahasan dan strategi rekomendasi tidak bergeser aturan atau kebijakan pemerintah.

d) **Tahap pengolahan data**

Hasil identifikasi temuan data secara lengkap selanjutnya akan diolah dengan proses pengelompokan dan penstrukturan seluruh temuan data, baik hasil dari studi teori pustaka, literatur, survei lapangan, dan observasi sesuai kategori dan klasifikasi yang telah ditentukan. Data yang telah diorganisasikan kemudian dilakukan suatu proses pengurutan data, dan dilakukan suatu uraian untuk menjelaskan informasi data-data yang dibutuhkan untuk tahap analisis dan kajian pembahasan, baik diuraikan dalam bentuk penjelasan kalimat, gambar, maupun tabulasi sesuai dengan pengelompokan data yang telah dilakukan sebelumnya.

Tahap ini menguraikan data-data tentang:

1. Kondisi penelitian dan pengembangan di Kota Tasikmalaya;
2. Permasalahan dan isu strategis penelitian dan pengembangan di Kota Tasikmalaya;
3. Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan indikatif kelitbangan dan pembiayaan; dan
4. Merumuskan kebutuhan kelembagaan dan sumberdaya aparatur serta kebutuhan sarana dan prasarana.

1.5.2.2 Metode Analisis

Untuk mempermudah analisis dan pembahasan kajian kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya, sehingga diperoleh kesimpulan maupun suatu strategi mengenai kondisi penelitian dan pengembangan serta permasalahan dan isu strategsi di Kota Tasikmalaya dan kebijakan, program dan kegiatan indikatif kelitbangan dan pembiayaan dan kebutuhan kelembagaan dan sumberdaya aparatur di Kota Tasikmalaya.

Metode analisis deskriptif merupakan metode studi yang mendeskripsikan atau menggambarkan dan menjelaskan keadaan atau status fenomena-fenomena ataupun hubungan antara fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan akurat.

Metode deskriptif berguna untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Metode ini merupakan suatu metode dalam studi yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data dari hasil observasi lapangan, wawancara, pengambilan gambar (foto), dokumen pribadi atau resmi, dan data lain yang mempunyai relevansi dengan objek Studi. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa. Studi deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik objek atau subjek yang menjadi Studi secara tepat.

1.6. Keluaran (Output)

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2025 untuk Kepentingan Strategis di Kota Tasikmalaya.

1.7. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya ini secara umum, terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan hal-hal umum yang terdiri dari latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan kegiatan, sasaran, ruang lingkup, pendekatan dan metodologi, keluaran, serta sistematika penyajian Laporan Akhir.

BAB 2 GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum wilayah perencanaan yang terdiri dari batas wilayah administrasi, kondisi fisik lingkungan atau bentang alam, kondisi demografi, dan kondisi perekonomian, serta menjelaskan tentang fasilitas dan utilitas yang ada. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan mengenai kondisi kelitbangan yang ada di Kota Tasikmalaya.

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Bab ini menguraikan mengenai arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan kelitbangan, dan indikasi program di wilayah perencanaan .

BAB 4 STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Berisikan mengenai strategi pelaksanaan kelitbangan yang berisikan mengenai kelembagaan dan evaluasi kelitbangan yang ada di Kota Tasikmalaya.

BAB 5 PENUTUP

Berisikan mengenai hal-hal yang penting yang terdapat dalam pekerjaan ini.

Bab 2
Gambaran Umum

2.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

2.1.1 Letak Geografis

Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota yang masuk dibawah wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, yang berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat dengan jarak ± 105 Km dari Kota Bandung dan ± 255 Km dari DKI Jakarta, dengan luas wilayah berdasarkan lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2016 sekitar 184,22 Km^2. Secara geografis Kota Tasikmalaya memiliki posisi yang strategis, yaitu berada pada 108° 08′38″ - 108°24′02″ Bujur Timur dan 7°10′ - 7°26′32″ Lintang Selatan di bagian Tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat.

Batas administrasi Kota Tasikmalaya, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu), dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja);
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan; dan
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding.

2.1.2 Wilayah Administrasi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 17.156 Ha (171,56 Km^2) terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan. Seiring perkembangan Kota Tasikmalaya dan adanya tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sejak tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan dan 69 Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 ha (183,85 Km^2). Seiring dengan adanya penetapan batas luar oleh Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, maka wilayah Kota Tasikmalaya terjadi perubahan luasan yakni menjadi 18.422 hektar.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Kelurahan
1	Indihiang	1.104	Indihiang
			Sirnagalih
			Parakannyasag
			Panyingkiran
			Sukamaju Kaler
			Sukamaju Kidul
2	Bungursari	1.690	Bantarsari
			Cibunigeulis
			Sukarindik
			Sukamulya
			Sukajaya
			Bungursari
			Sukalaksana
3	Cibeureum	1.904	Kersanagara
			Kota Baru
			Awipari
			Setianagara
			Ciherang
			Ciakar

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Kelurahan
			Margabakti
			Setiajaya
			Setiaratu
4	Purbaratu	1.201	Purbaratu
			Sukanagara
			Sukaasih
			Sukajaya
			Singkup
			Sukamenak
5	Cihideung	549	Yudanagara
			Nagarawangi
			Cilembang
			Argasari
			Tugujaya
			Tuguraja
6	Cipedes	896	Panglayungan
			Cipedes
			Nagarasari
			Sukamanah
7	Tawang	707	Tawangsari
			Empangsari
			Lengkongsari
			Cikalang
			Kahuripan
8	Kawalu	4.277	Kersamenak
			Cilamajang
			Gunung Tandala
			Urug
			Tanjung
			Cibeuti
			Karanganyar
			Talagasari
			Leuwiliang
			Gunung Gede
9	Tamansari	3.599	Tamansari
			Mugarsari
			Tamanjaya
			Sumelap
			Setiawargi
			Mulyasari
			Sukahurip
			Setiamulya
10	Mangkubumi	2.453	Mangkubumi
			Cigantang

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Kelurahan
			Karikil
			Linggajaya
			Cipawitra
			Sambongpari
			Sambongjaya
			Cipari

Sumber : Hasil pemetaan penetapan batas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri 2010

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada Gambar 2.1.

2.2. Kondisi Fisik Wilayah

2.2.1 Topografi, Morfologi dan Kemiringan Lereng

Kota Tasikmalaya berdasarkan bentang alamnya berada pada daerah dengan ketinggian berkisar antara 201-503 m di atas permukaan laut (dpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 m dpl sedangkan yang terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu sekitar 201 m dpl.

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Cibeureum, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

Dengan kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini, membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya dalam arah Barat Laut ke arah Selatan Kota Tasikmalaya. Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologinya, dimana Kota Tasikmalaya terbagi ke dalam dua daerah aliran sungai (DAS), di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju ke arah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju ke arah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini membawa permasalahan dalam sistem drainase dan sistem perpipaan air Kota Tasikmalaya, sehingga dibutuhkan perencanaan yang lebih matang terhadap kedua sistem tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

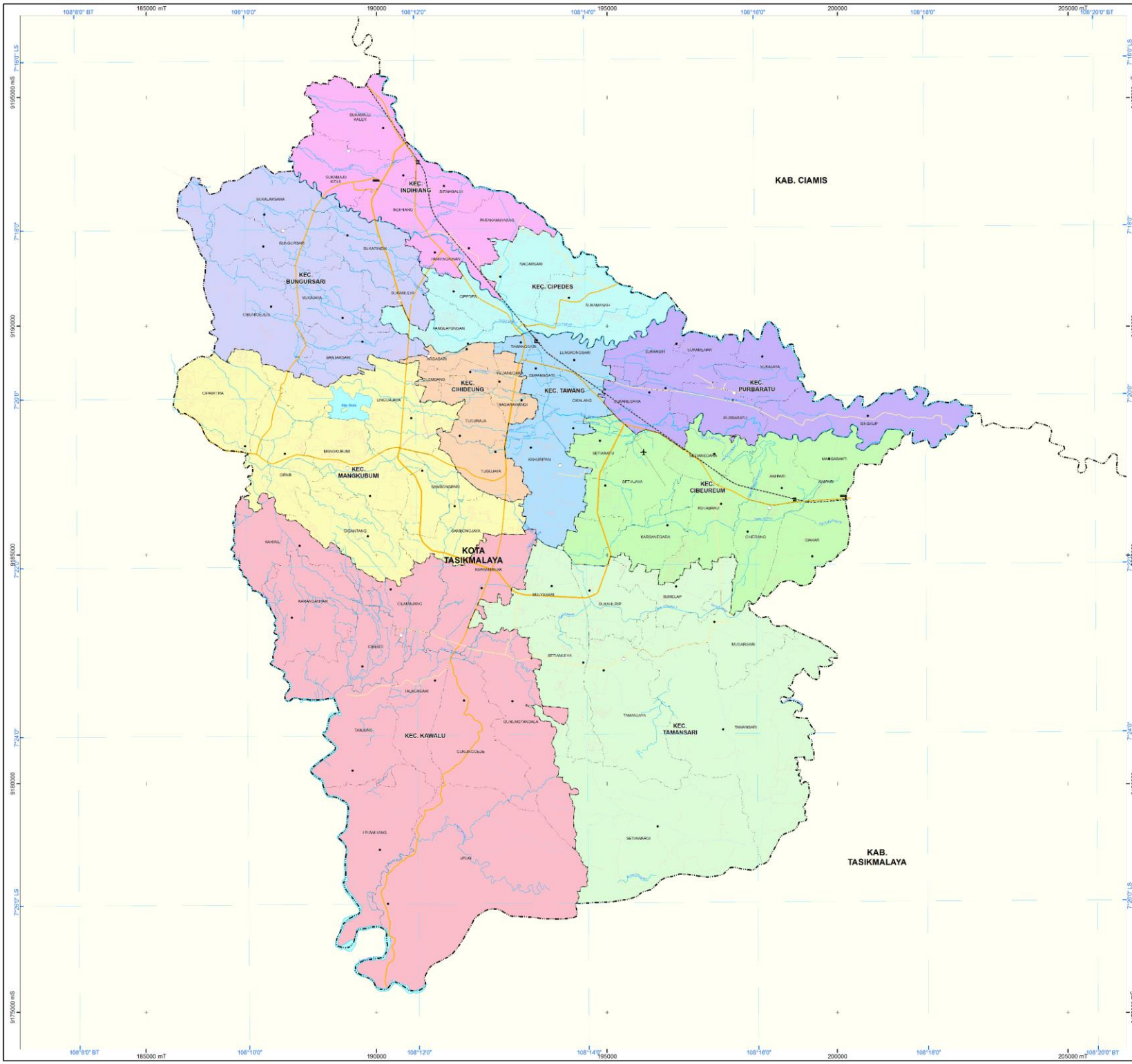

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

PETA BATAS ADMINISTRASI

U

SKALA : 1:40,000

0 400 800 1,600 2,400 3,200 4,000 Meter

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49S

PETA ORIENTASI :



Area yang dipetakan

LEGENDA

IBUKOTA
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN
- BUNGURSARI
- CIBEUREUM
- CIHIDEUNG
- CIPEDES
- INDIHIANG
- KAWALU
- MANGKUBUMI
- PURBARATU
- TAMANSARI
- TAWANG

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Danau/Situ
- Sungai

- Bandara
- Statsiun Kereta Api
- Terminal

JARINGAN JALAN
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalur Kereta Api
- Landasan

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial tahun 2002,dan dikomplasikan dengan Citra Quickbird Tahun 2012
- Tema "PETA BATAS ADMINISTRASI" Kota Tasikmalaya disiapkan oleh Tim Teknis Revisi RTRW dengan mendapat masukan dari berbagai stakeholder
- Hasil Analisis, 2017

CATATAN (STATUS BATAS ADMINISTRASI) :
- PERMENDAGRI NO. 56 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis.
- PERMENDAGRI NO. 58 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- Batas dalam antar Kelurahan dan atau Kecamatan masih dalam proses penegasan (indikatif) yang sedang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya, sehingga dalam penyusunan Revisi RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 - 2031 digunakan Batas Kelurahan dan atau Kecamatan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya Tahun 2016 - 2036 (Perda No. 10 Tahun 2016).

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

WALIKOTA TASIKMALAYA

Drs. H. Budi Budiman

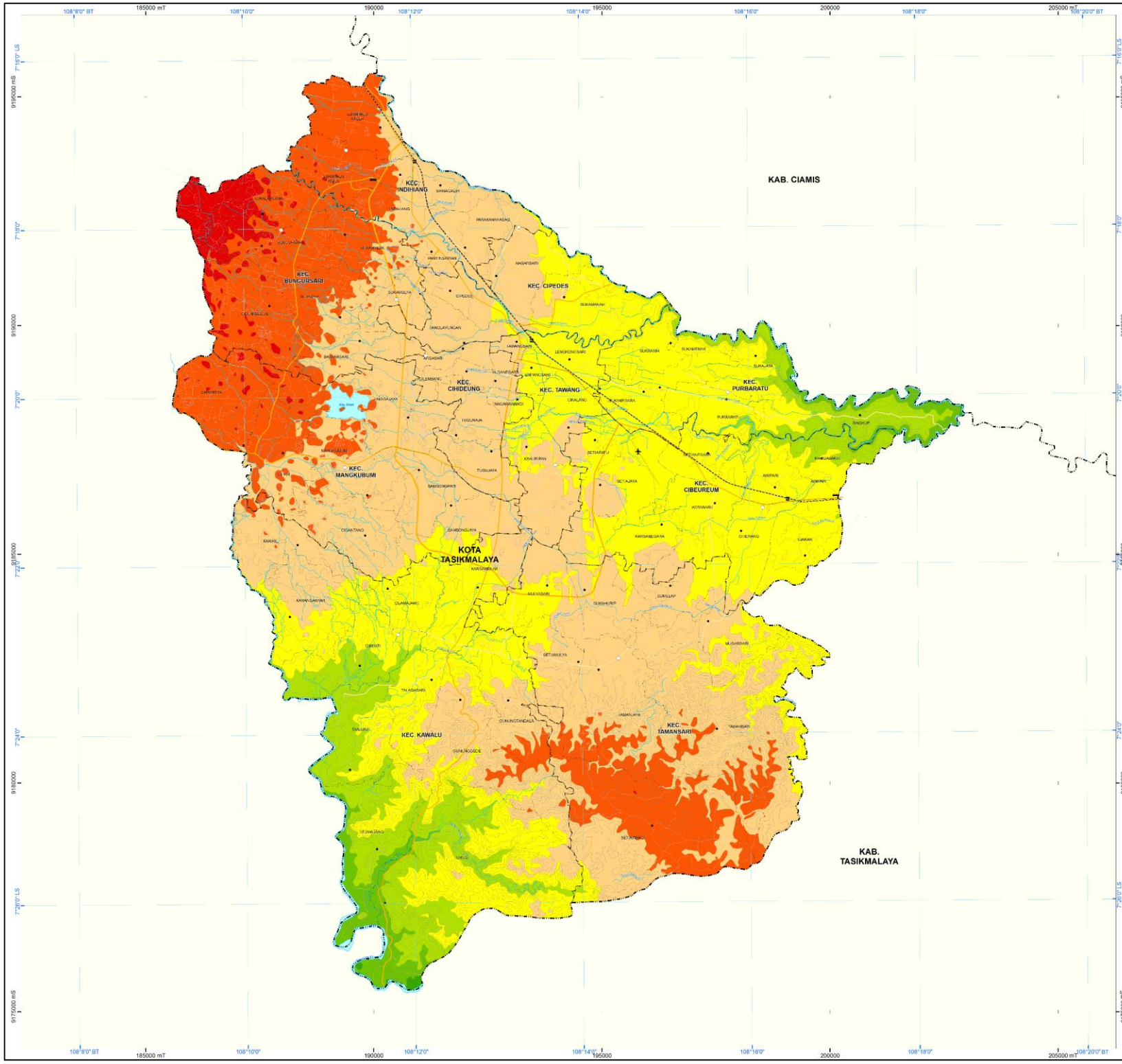

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

PETA TOPOGRAFI

U

SKALA : 1:40,000

0 400 800 1,600 2,400 3,200 4,000 Meter

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49S

PETA ORIENTASI :



Area yang dipetakan

LEGENDA

IBUKOTA
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Garis Kontur

KETINGGIAN (Meter)
- 150 - 200 Meter
- 200 - 250 Meter
- 250 - 300 Meter
- 300 - 350 Meter
- 350 - 400 Meter
- 400 - 450 Meter
- 450 - 500 Meter

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Danau/Situ
- Sungai

- Bandara
- Statsiun Kereta Api
- Terminal

JARINGAN JALAN
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalur Kereta Api
- Landasan

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial tahun 2002,dan dikompilasikan dengan Citra Quickbird Tahun 2012
- Tema "PETA TOPOGRAFI" Kota Tasikmalaya disiapkan oleh Tim Teknis Revisi RTRW dengan mendapat masukan dari berbagai stakeholder
- Hasil Analisis, 2017

CATATAN (STATUS BATAS ADMINISTRASI) :
- PERMENDAGRI NO. 56 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis.
- PERMENDAGRI NO. 58 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- Batas dalam antar Kelurahan dan atau Kecamatan masih dalam proses penegasan (indikatif) yang sedang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya, sehingga dalam penyusunan Revisi RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 - 2031 digunakan Batas Kelurahan dan atau Kecamatan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya Tahun 2016 - 2036 (Perda No. 10 Tahun 2016).

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

WALIKOTA TASIKMALAYA

Drs. H. Budi Budiman

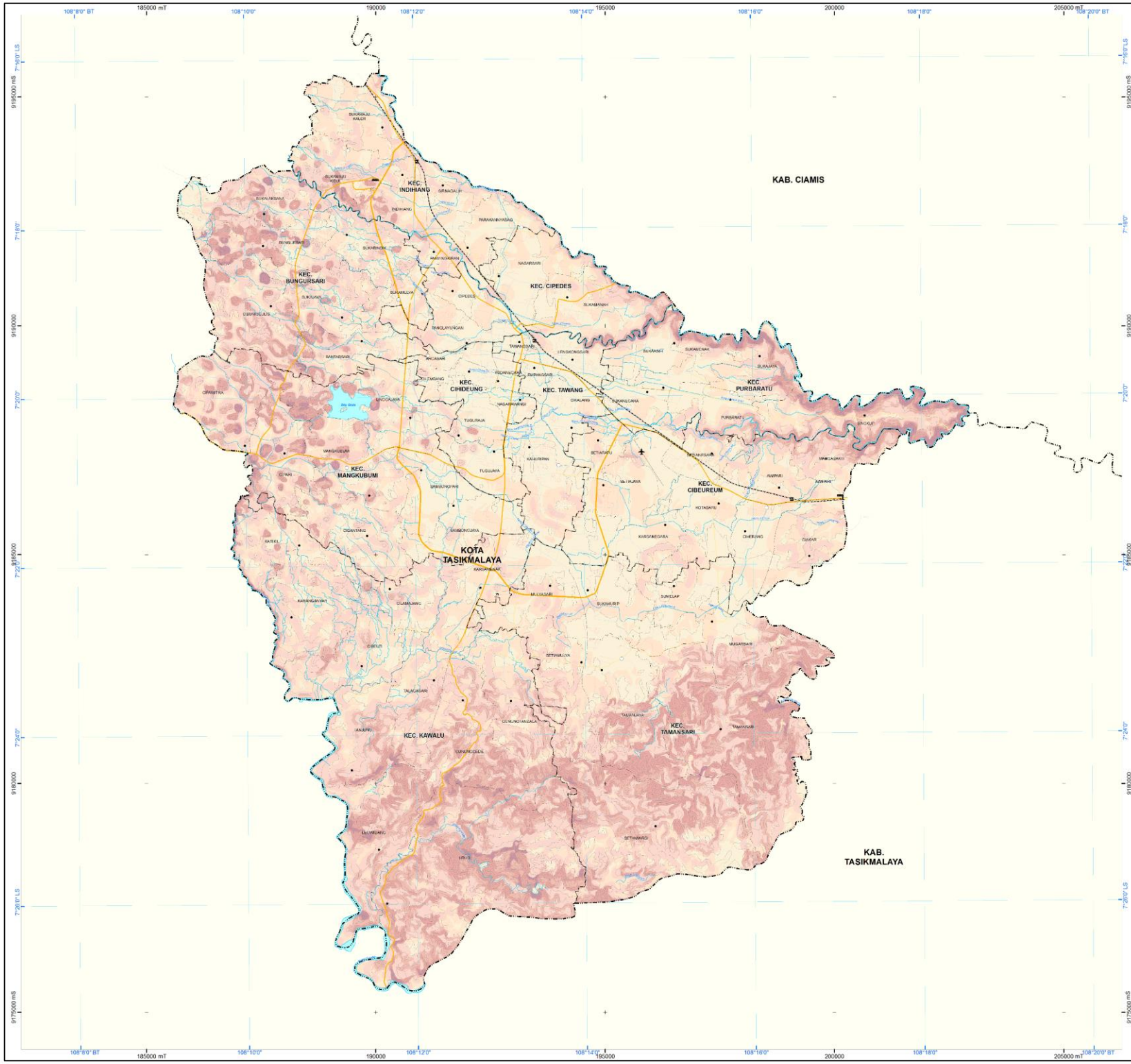

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

PETA KEMIRINGAN LERENG

U

SKALA : 1:40,000

0 400 800 1,600 2,400 3,200 4,000 Meter

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49S

PETA ORIENTASI :



Area yang dipetakan

LEGENDA

IBUKOTA
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Garis Kontur

KEMIRINGAN LERENG
- 0 - 2 %
- 2 - 5 %
- 5 - 15 %
- 15 - 25 %
- 25 - 40 %
- > 40 %

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Danau/Situ
- Sungai

- Bandara
- Statsiun Kereta Api
- Terminal

JARINGAN JALAN
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalur Kereta Api
- Landasan

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial tahun 2002,dan dikompilasikan dengan Citra Quickbird Tahun 2012
- Tema "PETA KEMIRINGAN LERENG" Kota Tasikmalaya disiapkan oleh Tim Teknis Revisi RTRW dengan mendapat masukan dari berbagai stakeholder
- Hasil Analisis, 2017

CATATAN (STATUS BATAS ADMINISTRASI) :
- PERMENDAGRI NO. 56 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis.
- PERMENDAGRI NO. 58 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- Batas dalam antar Kelurahan dan atau Kecamatan masih dalam proses penegasan (Indikatif) yang sedang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya, sehingga dalam penyusunan Revisi RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 - 2031 digunakan Batas Kelurahan dan atau Kecamatan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya Tahun 2016 - 2036 (Perda No. 10 Tahun 2016).

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

WALIKOTA TASIKMALAYA

Drs. H. Budi Budiman

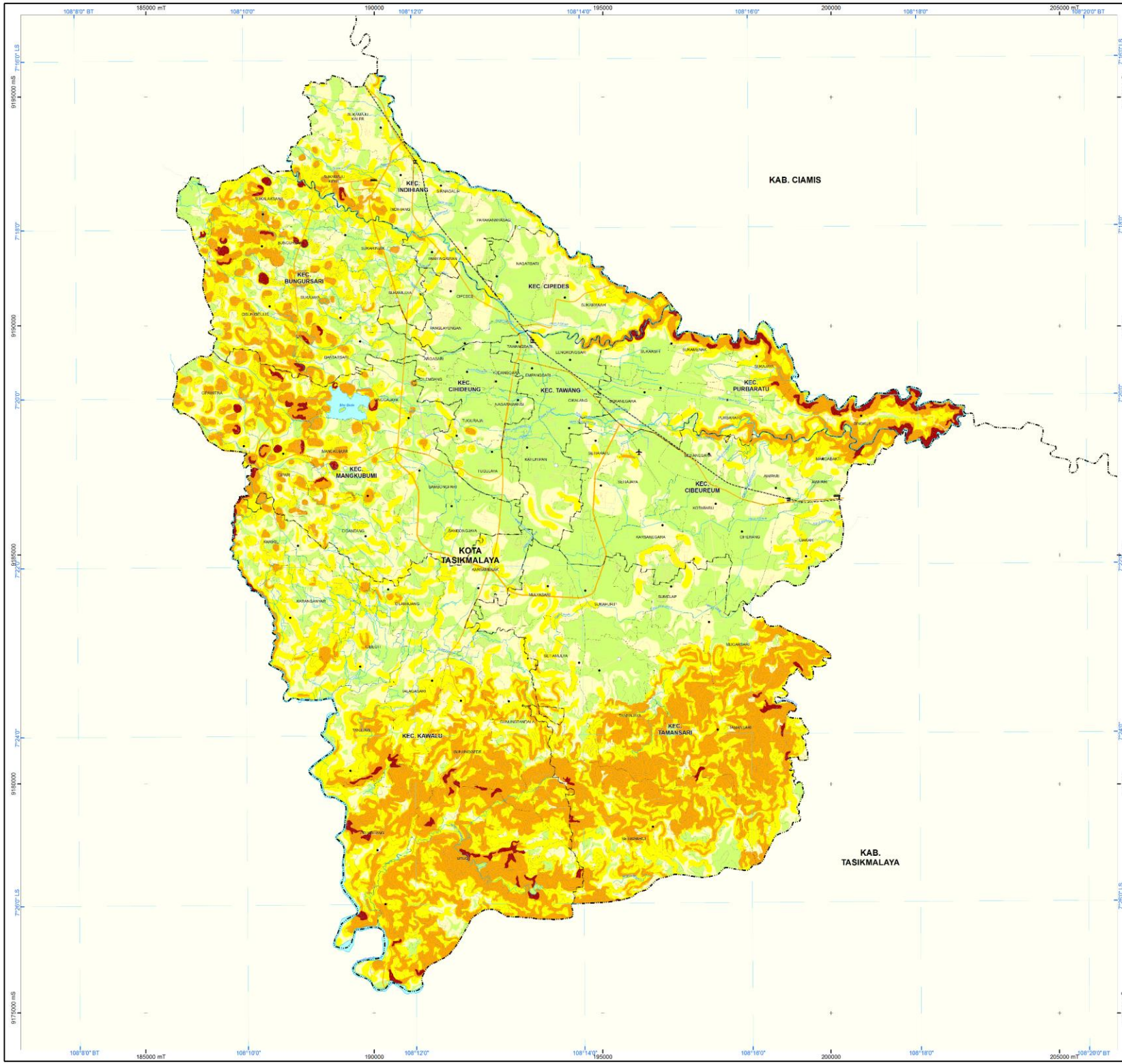

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

PETA MORFOLOGI

U

SKALA : 1:40,000

0 400 800 1,600 2,400 3,200 4,000 Meter

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49S

PETA ORIENTASI :



Area yang dipetakan

LEGENDA

IBUKOTA
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Garis Kontur

MORFOLOGI
- Dataran
- Bergelombang
- Perbukitan Landai
- Perbukitan Sedang
- Perbukitan Terjal

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Danau/Situ
- Sungai
- Bandara
- Statsiun Kereta Api
- Terminal

JARINGAN JALAN
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalur Kereta Api
- Landasan

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial tahun 2002 dan dikompilasikan dengan Citra Quickbird Tahun 2012
- Tema "PETA MORFOLOGI" Kota Tasikmalaya disiapkan oleh Tim Teknis Revisi RTRW dengan mendapat masukan dari berbagai stakeholder
- Hasil Analisis, 2017

CATATAN (STATUS BATAS ADMINISTRASI) :
- PERMENDAGRI NO. 56 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis.
- PERMENDAGRI NO. 58 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- Batas dalam antar Kelurahan dan atau Kecamatan masih dalam proses penegasan (Indikatif) yang sedang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya, sehingga dalam penyusunan Revisi RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 - 2031 digunakan Batas Kelurahan dan atau Kecamatan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya Tahun 2015 - 2035 (Perda No. 10 Tahun 2016).

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

WALIKOTA TASIKMALAYA

Drs. H. Budi Budiman

2.2.2 Geologi

Struktur geologi Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil kajian Peta Geologi, lembar Tasikmalaya (Budhitrisna, 1982), Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal *(normal fault),* sesar naik *(thurus fault)* serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

2.2.3 Jenis Tanah

Jenis tanah yang mendominasi permukaan adalah jenis tanah asosiasi regosol kelabu, regosol kelabu coklat, litosol, dan latosol kemerah-merahan. Jenis tanah yang memiliki sebaran terluas adalah jenis tanah asosiasi regosol kelabu dan litosol yang tersebar di bagian tengah, Selatan, Timur, dan Barat. Di bagian Utara, sebaran terdiri dari jenis tanah latosol coklat kemerah-merahan. Sementara itu, kedalaman efektif tanah (solum) wilayah bagian Barat dan Timur berada pada kisaran 30-60, sedangkan di bagian Utara, tengah, dan Selatan berada pada kisaran 60-90 cm.

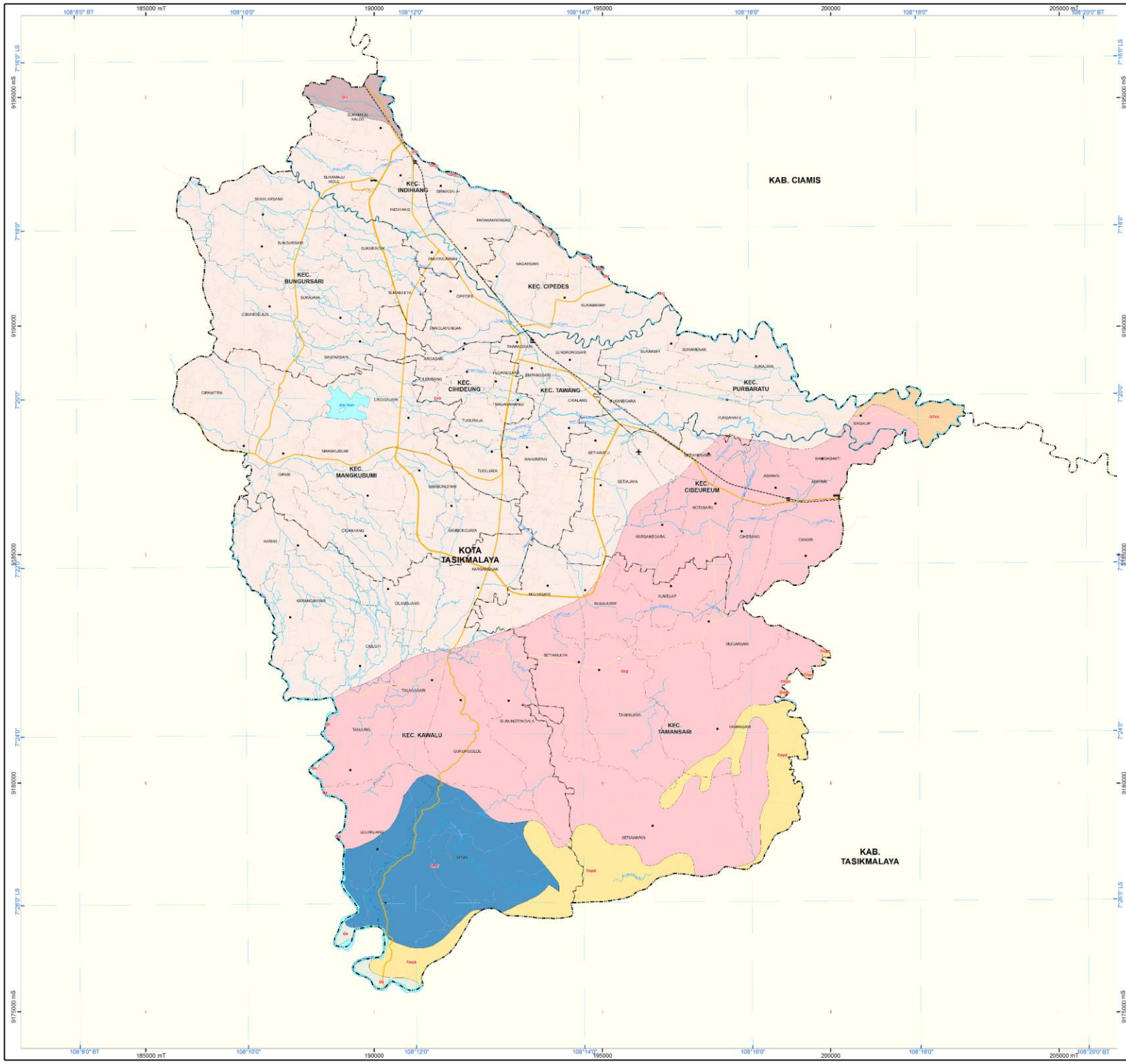

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

PETA GEOLOGI

U

SKALA : 1:40,000

0 400 800 1,600 2,400 3,200 4,000 Meter

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49S

PETA ORIENTASI :



Area yang dipetakan

LEGENDA

IBUKOTA
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

GEOLOGI
- (Qa) Aluvium
- (Qvb) Breksi Gunungapi G. Galunggung
- (Qvg) Hasil Gunungapi Muda (G. Galunggung)
- (Qvt) Hasil Gunung Api Muda (G Talaga Bodas)
- (QTvs) Hasil Gunung Api Tua (G. Sawal)
- (Tmpb) Formasi Bentang
- (Tmkl) Batu Gamping Kalipucang

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Danau/Situ
- Sungai

- Bandara
- Statsiun Kereta Api
- Terminal

JARINGAN JALAN
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalur Kereta Api
- Landasan

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial tahun 2002,dan dikompilasikan dengan Citra Quickbird Tahun 2012
- Tema "PETA GEOLOGI" Kota Tasikmalaya disiapkan oleh Tim Teknis Revisi RTRW dengan mendapat masukan dari berbagai stakeholder
- Hasil Analisis, 2017

CATATAN (STATUS BATAS ADMINISTRASI) :
- PERMENDAGRI NO. 56 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis.
- PERMENDAGRI NO. 58 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- Batas dalam antar Kelurahan dan atau Kecamatan masih dalam proses penegasan (Indikatif) yang sedang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya, sehingga dalam penyusunan Revisi RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 - 2031 digunakan Batas Kelurahan dan atau Kecamatan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya Tahun 2016 - 2036 (Perda No. 10 Tahun 2016).

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

WALIKOTA TASIKMALAYA

Drs. H. Budi Budiman

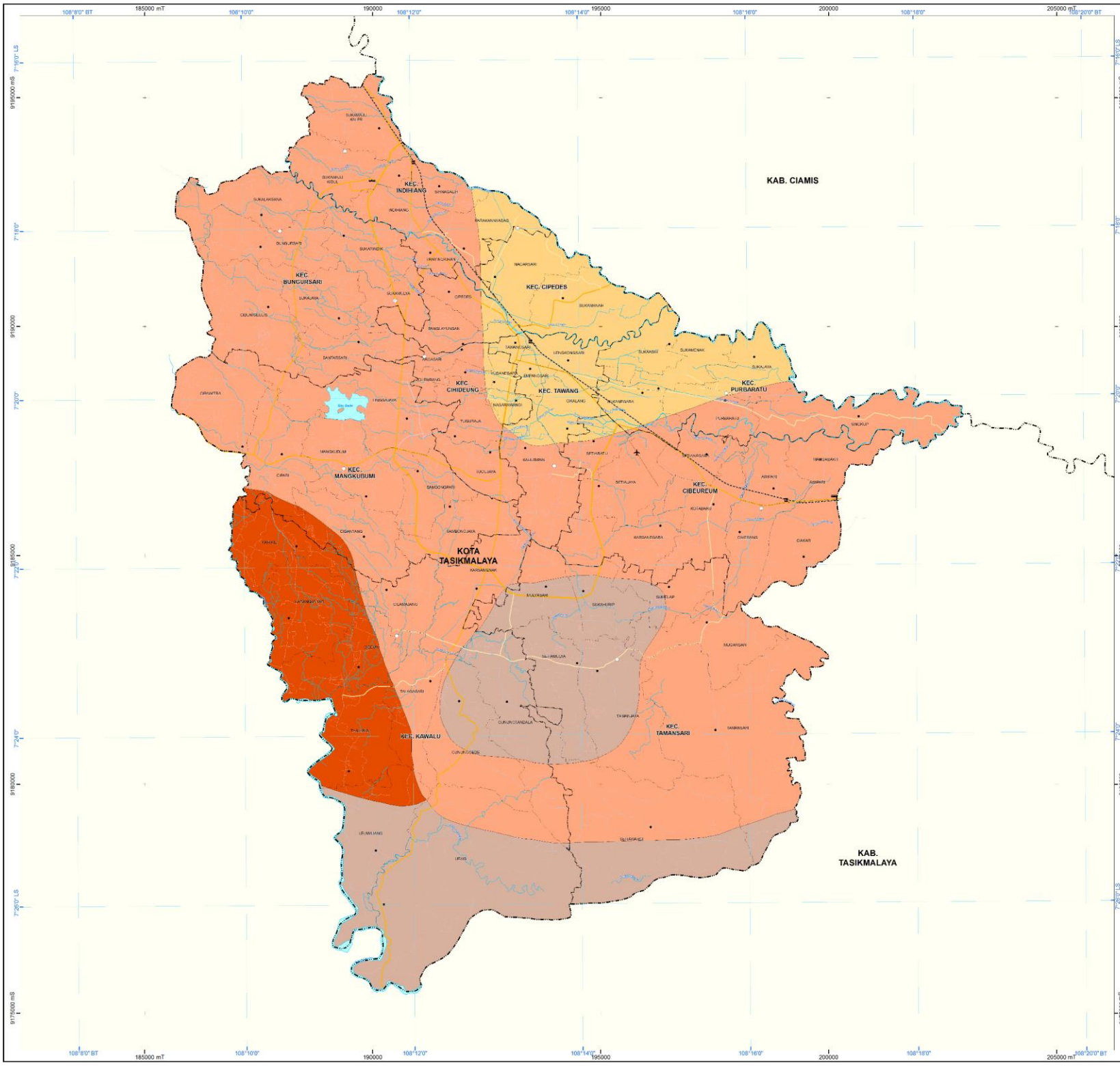

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

PETA JENIS TANAH

U

SKALA : 1:40,000

0 400 800 1,600 2,400 3,200 4,000 Meter

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49S

PETA ORIENTASI :



Area yang dipetakan

LEGENDA

IBUKOTA
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

JENIS TANAH
- Latosol
- Regosol
- Brown Forest
- Podsol Merah Kuning

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Danau/Situ
- Sungai

- Bandara
- Statsiun Kereta Api
- Terminal

JARINGAN JALAN
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalur Kereta Api
- Landasan

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial tahun 2002,dan dikompilasikan dengan Citra Quickbird Tahun 2012
- Tema "PETA JENIS TANAH" Kota Tasikmalaya disiapkan oleh Tim Teknis Revisi RTRW dengan mendapat masukan dari berbagai stakeholder
- Hasil Analisis, 2017

CATATAN (STATUS BATAS ADMINISTRASI) :
- PERMENDAGRI NO. 06 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis.
- PERMENDAGRI NO. 58 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya Dengan Kabupaten Tasikmalaya.
- Batas dalam antar Kelurahan dan atau Kecamatan masih dalam proses penegasan (indikatif) yang sedang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya, sehingga dalam penyusunan Revisi RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 - 2031 digunakan Batas Kelurahan dan atau Kecamatan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tasikmalaya Tahun 2016 - 2036 (Perda No. 10 Tahun 2016).

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2031

WALIKOTA TASIKMALAYA

Drs. H. Budi Budiman

2.2.4 Klimatologi

Pada dasarnya kondisi dan karakteristik iklim di Kota Tasikmalaya merupakan iklim tropis. Adapun gambaran intensitas curah hujan yang turun di Kota Tasikmalaya tahun 2016 Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Alam (BPSDA) Wilayah Sungai Ciwulan Cilaki Provinsi Jawa Barat dikemukakan sebagai berikut:

- Jumlah curah hujan di Kota Tasikmalaya tahun 2016 diketahui curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 384,6 mm^3 dengan jumlah rata -rata 17 hari hujan.
- Suhu udara rata-rata di Kota Tasikmalaya tahun 2016 rata-rata berkisar antara 20,9^oC - 27,3^oC. Pada tahun 2016 suhu tertinggi mencapai 28,2^oC yang terjadi pada bulan April, sedangkan suhu terendah mencapai 18,8 ^oC terjadi pada bulan Juni;
- Kisaran kelembaban udara rata-rata di Kota Tasikmalaya pada tahun 2016 rata-rata berkisar antara adalah 22,1 % - 26,4 %, dengan kelembaban maksimum 26,6% pada bulan April dan kelembaban minimum 19,7% pad bulan September.

Tabel 2.2 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penguapan Menurut Bulan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (mm^3)	Hari Hujan	Penguapan (ml)
Januari	371,6	16	2,84
Februari	404,2	16	2,83
Maret	531	22	2,43
April	244,6	13	3,1
Mei	414,4	18	3,23
Juni	160	13	2,76
Juli	332,2	16	2,36
Agustus	373,4	15	2,71
September	567,5	24	2,69
Oktober	712,7	23	2,41
November	NA	NA	NA
Desember	119,9	13	2,84
Rata-rata	**384,68**	**17**	**2,75**

Sumber : BPSDA WS Ciwulan Cilaki

Tabel 2.3 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020

Bulan	Suhu Udara *(oC)*			Kelembaban Udara *(%)*		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	28	20,7	24,6	26,4	21	23,7
Februari	27,9	22,5	24,9	26,1	22,8	24,4
Maret	28	22,2	25	26,2	22,8	24,5
April	28,2	22,8	25,2	26,6	23,2	24,9
Mei	27,9	19,6	24,6	26	19,8	22,9
Juni	26,8	18,8	23,5	25,2	19	22,1
Juli	26,4	20,3	23,4	24,9	20,7	22,8
Agustus	25,3	19,6	22,6	23,9	19,9	21,9
September	26,6	19,4	23,6	24,8	19,7	22,2
Oktober	27,3	21,6	23,8	25,7	21,8	23,7
November	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Desember	28,1	22,9	24,5	26,4	22,1	24,2
Rata-Rata	**27,3**	**20,9**	**24,2**	**25,7**	**21,2**	**23,4**

Sumber : BPSDA WS Ciwulan Cilaki

2.2.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Tasikmalaya yang terdiri dari air permukaan, sebagai aliran air yang mengaliri permukaan Kota Tasikmalaya maupun dalam bentuk genangan yang cukup luas, bentuknya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ).

1. Sungai

Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy yang merupakan Wilayah Sungai (WS) Citanduy dan DAS Ciwulan yang termasuk WS Ciwulan Cilaki. Menurut Buku Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, panjang sungai dan luas DAS Citanduy dan DAS Ciwulan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 DAS dan Sub DAS di Kota Tasikmalaya

No.	Nama DAS	Sub DAS yang melintasi	Panjang Sungai (km)	Luas DAS (km^2)
1	Citanduy	Cipedes, Ciloseh, Cikalang, Cibadodon, Cimulu, Cikunten II, Leuwimunding, Cihideung, Ciromban	339,20	2.693
2	Ciwulan	Cikunir, Cilumajang	177,4	1.147

Sumber : Buku Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan Masterplan Drainase, diolah Tahun 2017

Sungai-sungai yang mengaliri Kota Tasikmalaya adalah Citanduy, Ciloseh, Ciwulan serta Cibanjaran. Sedangkan anak sungainya yaitu beberapa anak sungai dari Sungai Cibanjaran yang meliputi Sungai Cihideung/Dalem Suba, Cipedes, Ciromban, Cidukuh, Cicacaban, Cibadodon, Cikalang, Tonggong Londok, Cibeureum dan Cimulu. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun dan bermuara di Sungai Citanduy, kecuali Sungai Ciwulan.

Tabel 2.5 Pos Hidrologi di Kota Tasikmalaya

No.	Nama DAS	Pos Duga Air	Sungai	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Luas CA (km^2)
1	Citanduy	Citanduy-Sukaratu	Ciloseh	Sukaratu	Indihiang	36
		Citanduy-Leuwi Tonjong	Citanduy	Leuwi Tonjong	Cipedes	426,8
		Cikalang-Cibitung	Cikalang	Singkup	Cibereum	29
2	Cikunir	Cikunir-Asta	Cikunir	Kawalu	Tasikmalaya	
	Ciwulan	Kawalu	Ciwulan	Kersamenak	Kawalu	

Sumber : Buku Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, diolah Tahun 2021

Selain sungai, berdasarkan Buku Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 terdapat 5 lokasi situ yang teraliri oleh WS Ciwulan-Cilaki di Kota Tasikmalaya dengan luas 70,90 hektar. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi, Situ

Cibeureum, Situ Cibanjaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari.

Tabel 2.6 Danau, Rawa, Situ, Telaga, dan Waduk Kota Tasikmalaya

No.	Nama Perairan	Luas (Ha)	Lokasi	
			Kelurahan	Kecamatan
1	Situ Gede	45,56	Mangkubumi	Mangkubumi
2	Situ Cicangri	0,63	Tamanjaya	Tamansari
3	Situ Cibeureum	18,08	Tamanjaya	Tamansari
4	Situ Cipajaran	3,09	Tamanjaya	Tamansari
5	Situ Malingping	1,50	Tamanjaya	Tamansari
6	Situ Bojong	0,33	Tamanjaya	Tamansari
Luas Keseluruhan		**69,70**		

Sumber : Digitasi penggunaan lahan Kota Tasikmalaya, 2021

2. Air Tanah

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00 - 10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50 - 7,00 m. Salah satu sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Indihiang – mata air Cibunigeulis – memiliki kapasitas produksi / debit sebesar 15,00 liter perdetik sampai 60,00 liter per detik saat ini dimanfaatkan oleh PDAM sebagai sumber air baku.

3. Air hujan

Air permukaan jenis air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya air setempat cukup besar. Jika melihat keadaan iklim curah hujan pada tahun 2016 dengan rata-rata 384,68 mm^3, berpotensi sebagai sumber air yang dapat ditampung baik melalui Sumur Resapan, Lubang Biopori, Situ dan Sungai yang berada di dalam Kota Tasikmalaya.

2.2.6 Rawan Bencana

Berdasarkan dokumen hasil kajian risiko bencana di Provinsi Jawa Barat 2016 – 2020 dijelaskan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki skor 119 atau termasuk klasifikasi kelas sedang. Di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat beberapa

potensi risiko bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi diantaranya adalah banjir bandang, banjir, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor.

Berdasarkan hasil pemetaan kajian risiko bencana diperoleh titik lokasi-lokasi yang meiliki risiko bencana di Kota Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :

1. **Banjir Bandang**

   Lokasi risiko banjir bandang berdasarkan data dan peta indeks risiko kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat berada di sekitar alur Sungai serta di bagian Barat, Selatan dan Utara Kota Tasikmalaya. Tingkat indeks risiko kebencanaan banjir bandang di Kota Tasikmalaya adalah sedang hingga tinggi.

2. **Banjir**

   Lokasi risiko banjir berdasarkan data dan peta indeks risiko kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat, cakupannya cukup luas dimulai dari utara hingga ke pusat kota dan sebagaian wilayah selatan. Tingkat Indeks rawan bencana banjir di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

3. **Risiko Cuaca Ekstirm**

   Lokasi risiko cuaca ekstrim berdasarkan data dan peta indeks risiko kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat, mencakup seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Tingkat Indeks rawan bencana risiko cuaca ekstrim di Kota Tasikmalaya sedang-tinggi.

4. **Epidemi dan Wabah Penyakit**

   Lokasi epidemi dan wabah penyakit berdasarkan data dan peta indeks risiko kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat berada di sekitar area terbangun di Kota Tasikmalaya. Tingkat indeks risiko kebencanaan epidemi dan wabah penyakit di Kota Tasikmalaya adalah rendah.

5. **Gempa**

   Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam salah satu kawasan rawan gempa bumi tektonik. Hal ini dapat dipahami karena terjadi

pergeseran lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang terus menerus. Dampak dari pergeseran lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia ini adalah menyebabkan terjadinya pergeseran lempeng rata-rata tujuh sentimeter setiap tahun di Samudra Hindia termasuk Laut Selatan Jawa. Sehingga ketika terjadi gempa dampaknya akan terasa sampai ke Kota Tasikmalaya.

Adapun lokasi risiko gempa berdasarkan data dan peta indeks risiko kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat berada di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Tingkat indeks risiko gempa di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga sedang.

6. Bahaya Gunung Api

Gunung api yang paling dekat dengan Kota Tasikmalaya adalah Gunung Galunggung yang terletak sekitar 10 Km dari pusat kota, gunung ini merupakan gunung api tipe A yang masih aktif, letusan terakhir terjadi pada tahun 1982 yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah.

Adapun lokasi risiko bahaya gunung api berdasarkan data dan peta indeks risiko kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat berada di wilayah utara Kota Tasikmalaya yang meyusuri aliran sungai. Tingkat indeks risiko bahaya gunung api di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga sedang.

7. Tanah Longsor

Zona gerakan tanah sebagian besar di Kota Tasikmalaya berada sepanjang sungai, seperti Sungai Cikunir, Sungai Ciwulan dan sebagian Sungai Citanduy. Gerakan tanah di Kota Tasikmalaya berdimensi kecil terutama daerah yang berbatasan dengan lembah sungai yang berupa gawir-gawir peralihan litologi atau tebing.

Adapun lokasi risiko bahaya tanah longsor berdasarkan data dan peta indeks risiko kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat berada di wilayah timur dan wilayah Selatan Kota Tasikmalaya terutama yang dekat dengan aliran sungai. Tingkat indeks risiko tanah longsor di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Lokasi risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data dan peta indeks risiko kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat berada di wilayah Selatan Kota Tasikmalaya terutama daerah yang berbukit dan kering. Tingkat indeks risiko kebakaran hutan dan lahan di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

9. Kekeringan

Lokasi risiko bahaya kekeringan berdasarkan data dan peta indeks risiko kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat berada di seluruh Kota Tasikmalaya terutama daerah yang berbukit di wilayah selatan. Tingkat indeks risiko kekeringan di Kota Tasikmalaya adalah rendah hingga tinggi.

2.3. Kondisi Sosial Demografi

2.3.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Berdasarkan hasil rekapitulasi data Kota Tasikmalaya dalam angka selama kurun waktu 10 tahun (tahun 2011 sampai dengan tahun 2020), jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya dalam terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2020 mencapai 719.882 Jiwa.

Dalam kurun waktu 10 tahun, tahun 2011 s/d tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya sebesar 0,013% per tahunnya.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk terbanyak di Kota Tasikmalaya terdapat di Kecamatan Kawalu dengan jumlah penduduk sebesar 96.942 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Purbaratu jumlah penduduk sebesar 45.048 Jiwa.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kawalu	84,930	86,581	87,178	87,935	87,607	87,973	88,255	88,418	88,599	96,942
2	Tamansari	63,073	64,449	64,965	65,545	65,303	65,604	65,856	65,677	65,812	75,970
3	Cibeurum	61,238	62,041	62,280	63,192	62,959	63,171	63,359	63,744	63,812	68,604
4	Purbaratu	38,130	38,648	38,806	39,280	39,134	39,243	39,324	39,670	39,747	45,048
5	Tawang	62,641	63,885	64,099	64,999	64,764	65,082	65,355	65,658	65,781	64,114
6	Cihideung	71,507	72,644	73,010	73,904	73,631	73,934	74,170	74,399	74,540	73,372
7	Mangkubumi	85,193	86,713	87,241	88,322	87,995	88,346	88,605	88,714	88,897	96,834

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Indihiang	47,554	48,468	48,795	49,215	49,034	49,238	49,396	49,518	49,619	57,826
9	Bungusari	45,733	46,568	46,861	47,390	47,217	47,432	47,595	47,610	47,707	59,064
10	Cipedes	74,949	76,219	76,650	77,435	77,150	77,454	77,691	77,996	78,149	82,108
Jumlah		**634,948**	**646,216**	**649,885**	**657,217**	**654,794**	**657,477**	**659,606**	**661,404**	**662,663**	**719,882**

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

2.3.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 719.882 Jiwa/Ha pada tahun 2020 yang artinya dengan luas wilayah 18.380 Ha, rata-rata setiap Ha hanya ditempati 38-39 orang. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tasikmalaya terdapat di Kecamatan Cihideung, dengan tingkat kepadatan mencapai 133,65 Jiwa/Ha. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Kawalu, dengan tingkat kepadatan mencapai 22,67 Jiwa/Ha.

Untuk lebih jelasnya, mengenai Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2016 - 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk Eksisting (Jiwa/Ha)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kawalu	4,277	20.57	20.63	20.67	20.72	22.67
2	Tamansari	3,599	18.23	18.30	18.25	18.29	21.11
3	Cibeurum	1,904	33.18	33.28	33.48	33.51	36.03
4	Purbaratu	1,201	32.68	32.74	33.03	33.09	37.51
5	Tawang	707	92.05	92.44	92.87	93.04	90.68
6	Cihidueng	549	134.67	135.10	135.52	135.77	133.65
7	Mangkubumi	2,453	36.02	36.12	36.17	36.24	39.48
8	Indihiang	1,104	44.60	44.74	44.85	44.94	52.38
9	Bungusari	1,690	28.07	28.16	28.17	28.23	34.95
10	Cipedes	896	86.44	86.71	87.05	87.22	91.64
Jumlah		**18,380**	**35.77**	**35.89**	**35.98**	**36.05**	**39.17**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

2.3.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut tingkat umur ini secara garis besar memisahkan kelompok penduduk dari penduduk konsumtif dan produktif, hal ini biasanya diukur dari kemampuan penduduk dalam hidupnya apakah sudah bisa menghasilkan sesuatu ataupun hanya bisa menerima atu mengkonsumsi segalanya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data Kota Tasikmalaya dalam angka Tahun 2020, struktur penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2020 berbentuk piramida ekspansif yang dicirikan dengan angka kelahiran yang tinggi, penduduk umur muda yang banyak (sampai dengan 14 tahun), pertumbuhan yang pesat, jumlah penduduk umur tua yang lebih sedikit dibandingkan penduduk umur dewasa atau umur produktif (15-64 tahun). Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan proporsi yang seimbang antara penduduk laki – laki dan penduduk perempuan.

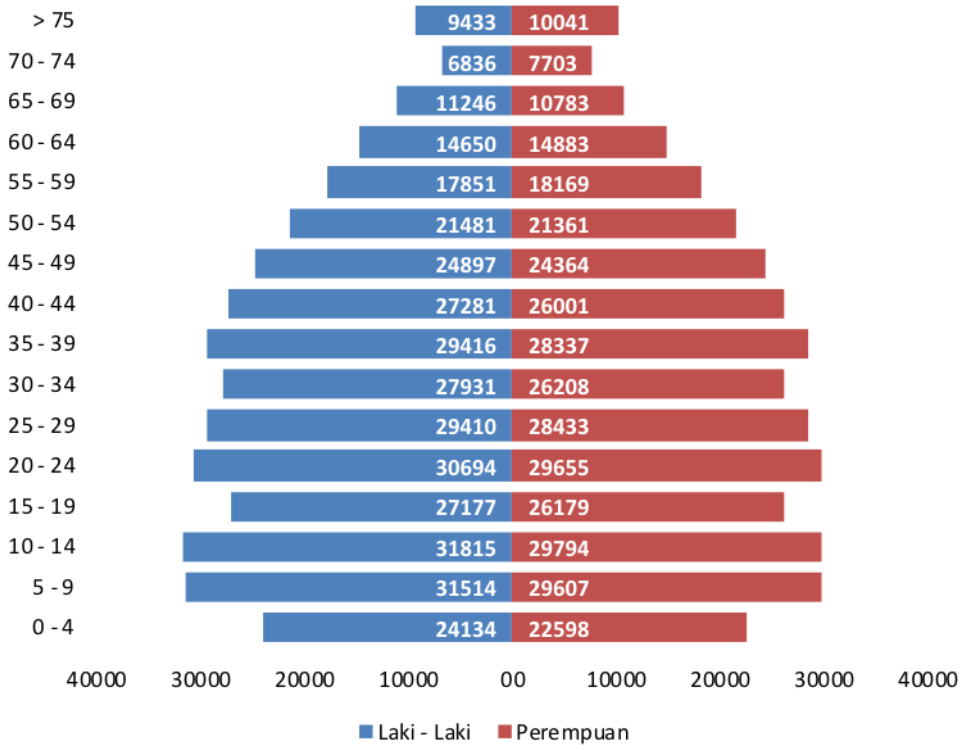

Gambar 2.7
Diagram Piramida Struktur Penduduk Kota Tasikmalaya Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 - 4	24,134	22,598	46,732
2	5 - 9	31,514	29,607	61,121
3	10 - 14	31,815	29,794	61,609
4	15 - 19	27,177	26,179	53,356

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
5	20 - 24	30,694	29,655	60,349
6	25 - 29	29,410	28,433	57,843
7	30 - 34	27,931	26,208	54,139
8	35 - 39	29,416	28,337	57,753
9	40 - 44	27,281	26,001	53,282
10	45 - 49	24,897	24,364	49,261
11	50 - 54	21,481	21,361	42,842
12	55 - 59	17,851	18,169	36,020
13	60 - 64	14,650	14,883	29,533
14	65 - 69	11,246	10,783	22,029
15	70 - 74	6,836	7,703	14,539
16	> 75	9,433	10,041	19,474
Jumlah		**365,766**	**354,116**	**719,882**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

2.3.4 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja yang termasuk dalam Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2020 sebesar (34,62%), atau mencapai 170.976 orang yang terdiri atas mereka yang sekolah sebanyak 42.261 orang (8,56%), mengurus rumah tangga sebanyak 106.125 orang (21,49%) dan lainnya sebanyak 22.590 orang (4,57%).

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019 - 2020

Keterangan	2019		2020	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Angkatan Kerja	**308,343**	**66.92**	**322,887**	**65.38**
- Bekerja	287,233	62.34	301,081	60.96
- Menganggur	21,110	4.58	21,806	4.42
Bukan Angkatan Kerja	**152,425**	**33.08**	**170,976**	**34.62**
- Sekolah	30,949	6.72	42,261	8.56
- Mengurus Rumah Tangga	103,149	22.39	106,125	21.49
- Lainnya (pensiun, lanjut usia, cacat, sakit kronis, dipenjara)	18,327	3.98	22,590	4.57
Jumlah Penduduk Usia Kerja	**460,768**	**100.00**	**493,863**	**100.00**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

2.4. Kondisi Perekonomian

PDRB Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 21,59 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0.16 triliun rupiah atau 0.74 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 21,75 triliun rupiah. Penurunan PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya nilai PDRB beberapa kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha dengan penurunan terdalam adalah kategori Jasa Perusahaan dengan penurunan mencapai 11,35 persen diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan penurunan mencapai 4,55 persen di tahun 2020.

Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	931.14	959.66	1,011.19	1,054.75	1,079.40
B	Pertambangan dan Penggalian	1.71	1.64	1.69	1.74	1.78
C	Industri Pengolahan	2,359.69	2,523.81	2,783.25	3,067.39	3,051.33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.11	2.52	2.76	2.96	2.88
E	Pengadaaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	60.99	68.22	76.63	82.83	90.70
F	Konstruksi	2,603.15	2,911.73	3,175.07	3,474.50	3,341.11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,819.26	4,148.79	4,493.49	4,944.06	4,719.27
H	Transportasi dan Pergudangan	1,610.34	1,764.33	1,942.06	2,084.41	2,028.55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	782.09	887.04	1,008.50	1,150.64	1,148.60
J	Informasi dan Komunikasi	510.77	576.59	624.41	685.16	915.23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,835.25	2,005.45	2,166.16	2,245.53	2,201.90
L	Real Estat	254.08	283.61	317.73	351.66	360.60
M,N	Jasa Perusahaan	159.63	178.02	203.79	250.68	222.23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	791.15	826.10	864.92	897.82	895.45
P	Jasa Pendidikan	301.13	347.99	389.01	444.86	483.94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	330.42	372.54	414.12	468.23	500.97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	398.24	459.94	502.79	543.68	545.55
Produk Domestik Regional Bruto		**16,751.15**	**18,317.98**	**19,977.57**	**21,750.90**	**21,589.49**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021
Keterangan :
**) : Angka sementara*
***) : Angka sangat sementara*

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB 2020 juga mengalami penurunan, dari 15,75 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 15,43 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kota Tasikmalaya mengalami kontraksi ekonomi sekitar 2,01 persen. Penurunan nilai PDRB ini disebabkan oleh pandemi covid19 yang menyebabkan sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami penurunan produksi kecuali kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Pendidikan dan Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	641.27	645.76	644.65	644.46	658.92
B	Pertambangan dan Penggalian	1.27	1.25	1.28	1.29	1.30
C	Industri Pengolahan	1,829.58	1,908.66	2,038.73	2,196.03	2,153.49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.41	1.50	1.57	1.66	1.62
E	Pengadaaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	46.63	49.36	52.12	54.66	59.59
F	Konstruksi	1,973.91	2,138.93	2,296.04	2,436.90	2,333.34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,217.51	3,411.49	3,567.88	3,812.41	3,575.05
H	Transportasi dan Pergudangan	1,275.34	1,352.49	1,459.44	1,543.23	1,435.06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	613.72	667.54	724.78	781.52	753.48
J	Informasi dan Komunikasi	497.98	552.01	596.84	651.21	869.82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,365.76	1,418.85	1,483.49	1,499.55	1,469.98
L	Real Estat	216.07	237.16	261.44	285.16	290.44
M,N	Jasa Perusahaan	138.33	151.07	165.08	182.17	156.63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	557.13	560.91	565.03	585.44	579.29
P	Jasa Pendidikan	239.22	261.88	280.01	293.95	306.50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	266.11	290.75	314.94	347.72	361.12
R,S,T,U	Jasa Lainnya	344.02	378.21	405.80	428.76	424.39
Produk Domestik Regional Bruto		**13,225.26**	**14,027.82**	**14,859.12**	**15,746.12**	**15,430.02**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021
Keterangan :
**) : Angka sementara*
***) : Angka sangat sementara*

Salah satu indikator ekonomi yang penting untuk diketahui pada suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ini memperlihatkan bagaimana perekonomian di suatu wilayah tumbuh membesar dari sisi volume barang dan jasa yang dihasilkan. Laju pertumbuhan ekonomi dapat juga dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan hasil analisa PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, dapat dilihat kinerja perekonomian Kota Tasikmalaya pada periode 3 (tiga) tahun terakhir mengalami **penurunan**, yaitu dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 mencapai 6,91 persen menurun pada sebesar 0.94 persen pada tahun 2019 (5,97%).

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.72	0.70	-0.17	-0.03	2.24
B	Pertambangan dan Penggalian	-0.32	-2.13	2.58	0.79	0.52
C	Industri Pengolahan	4.63	4.32	6.81	7.72	-1.94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.46	6.71	4.44	5.74	-2.34
E	Pengadaaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.08	5.85	5.58	4.88	9.02
F	Konstruksi	10.25	8.36	7.35	6.13	-4.25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.14	6.03	4.48	6.85	-6.23
H	Transportasi dan Pergudangan	8.74	6.06	7.90	5.74	-7.01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.48	8.77	8.57	7.83	-3.59
J	Informasi dan Komunikasi	13.02	10.85	8.12	9.11	33.57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.23	3.89	4.56	1.08	-1.97
L	Real Estat	7.54	9.76	10.24	9.07	1.85
M,N	Jasa Perusahaan	6.02	9.22	9.27	10.35	-14.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.04	0.68	0.73	3.61	-1.05
P	Jasa Pendidikan	8.33	9.47	6.92	4.98	4.27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.35	9.26	8.32	10.41	3.86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6.21	9.94	7.29	5.66	-1.02
Produk Domestik Regional Bruto		**6.91**	**6.07**	**5.93**	**5.97**	**-2.01**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021
Keterangan :
**) : Angka sementara*
***) : Angka sangat sementara*

2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana

2.5.1 Sarana Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan umum pada tahun 2020 seluruhnya berjumlah 782 unit, dengan rincian sekolah dengan status negeri berjumlah 234 unit dan sekolah berstatus swasta berjumlah 548 unit. Kecamatan Kawalu merupakan kecamatan dengan jumlah sarana paling banyak, dengan jumlah sarana pendidikan sebanyak 96 unit. Sedangkan Kecamatan Purbaratu merupakan kecamatan dengan jumlah sarana pendidikan paling rendah dengan jumlah sarana hanya sebanyak 47 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Status di Kota Tasikmalaya Tahun 2020

No	Jenis Sarana Pendidikan	Satus		Total (Unit)
		Negeri	Swasta	
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1	96	97
2	Raudatul Athfal (RA)	-	140	140
3	SD	199	30	229
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	54	54
5	SMP	21	54	75
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	55	55
7	SMA	10	17	27
8	SMK	-	52	52
9	Madrasah Aliyah (MA)	3	34	37
10	Universitas / Perguruan Tinggi	-	16	16
Jumlah		**234**	**548**	**782**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2.15 Sarana Pendidikan Negeri di Kota Tasikmalaya Tahun 2020

No	Kecamatan	Sekolah Negeri (unit)										Total (Unit)
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA	PT/AKADEMI	
1	Kawalu	-	-	31	-	2	-	1	-	-	-	34
2	Tamansari	-	-	17	-	2	-	1	-	-	-	20
3	Cibeurum	-	-	18	-	1	-	-	-	2	-	21
4	Purbaratu	-	-	12	-	1	-	1	-	-	-	14
5	Tawang	-	-	20	-	6	-	2	-	-	-	28
6	Cihideung	1	-	20	-	2	-	1	-	1	-	25
7	Mangkubumi	-	-	29	-	1	-	1	-	-	-	31
8	Indihiang	-	-	15	-	3	-	3	-	-	-	21
9	Bungusari	-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	16
10	Cipedes	-	-	22	-	2	-	-	-	-	-	24
Jumlah		**1**	**-**	**199**	**-**	**21**	**-**	**10**	**-**	**3**	**-**	**234**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2.16 Sarana Pendidikan Swasta di Kota Tasikmalaya Tahun 2020

No	Kecamatan	Sekolah Swasta (unit)										Total (Unit)
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA	PT/AKADEMI	
1	Kawalu	9	13	1	8	9	8	1	4	7	2	62
2	Tamansari	3	12	4	8	5	13	-	8	7	2	62
3	Cibeurum	9	19	-	10	8	4	1	4	3	1	59
4	Purbaratu	4	13	2	5	1	4	-	2	2	-	33
5	Tawang	19	12	9	1	6	1	6	7	2	4	67
6	Cihidueng	13	13	5	5	8	10	3	7	2	2	68
7	Mangkubumi	14	16	2	6	7	5	1	4	4	1	60
8	Indihiang	7	14	2	1	1	3	1	4	2	2	37
9	Bungusari	3	16	2	7	6	3	3	3	4	-	47
10	Cipedes	15	12	3	3	3	4	1	9	1	2	53
Jumlah		**96**	**140**	**30**	**54**	**54**	**55**	**17**	**52**	**34**	**16**	**548**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

2.5.2 Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2020 berjumlah 1.331 unit, dengan jumlah terbanyak adalah sarana Posyandu dengan jumlah 871 unit. Jumlah sarana kesehatan dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Kawalu dengan jumlah 190 unit sarana kesehatan.

Tabel 2.17 Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Kesehatan (Unit)										Total (Unit)
		Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Balai Kesehatan / Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek	Pos Yandu	Bidan	Praktek Dokter	Polindes	
1	Kawalu	-	1	5	3	4	5	120	37	12	3	190
2	Tamansari	1	-	2	2	3	4	100	20	3	1	136
3	Cibeurum	-	-	5	1	4	4	91	26	3	3	137
4	Purbaratu	-	-	-	1	2	3	57	21	3	1	88
5	Tawang	2	2	3	2	-	5	72	18	6	-	110
6	Cihidueng	2	2	4	2	1	6	75	28	5	-	125
7	Mangkubumi	-	-	4	2	6	6	110	42	3	-	173
8	Indihiang	2	1	3	2	1	4	71	25	4	1	114
9	Bungusari	-	-	2	3	3	3	86	13	10	-	120
10	Cipedes	-	1	4	3	2	4	89	28	7	-	138
Jumlah		**7**	**7**	**32**	**21**	**26**	**44**	**871**	**258**	**56**	**9**	**1,331**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

2.5.3 Sarana Peribadatan

Penduduk di Kota Tasikmalaya mayoritas beragama Islam, hal tersebut ditunjukan oleh keberadaan sarana peribadatan yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya jumlah sarana peribadatan didominasi sarana berupa masjid, dan musholah/langgar. Terutama untuk sarana berupa musholah/langgar dapat dipastikan berjumlah lebih dari satu di tiap-tiap desa.

Sarana Peribadatan di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2020 berjumlah 2.563 unit, dengan jumlah terbanyak adalah sarana Musholah dengan jumlah 1.344 unit. Jumlah sarana peribadatan dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Kawalu dengan jumlah 380 unit.

Tabel 2.18 Jumlah Sarana Peribadatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Peribadatan (Unit)						Total (Unit)
		Masjid	Musholah	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	
1	Kawalu	221	159	-	-	-	-	380
2	Tamansari	165	156	-	-	-	-	321
3	Cibeurum	110	192	-	-	-	-	302
4	Purbaratu	86	114	-	-	-	-	200
5	Tawang	115	72	3	3	1	1	195
6	Cihideung	90	81	7	-	-	-	178
7	Mangkubumi	130	217	-	-	-	-	347
8	Indihiang	76	108	-	-	-	-	184
9	Bungusari	107	149	-	-	-	-	256
10	Cipedes	104	96	-	-	-	-	200
Jumlah		**1,204**	**1,344**	**10**	**3**	**1**	**1**	**2,563**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

2.5.4 Sarana Perdagangan

Pedagangan merupakan segala tindakan yang tujuannya menyampaikan barang untuk tujuan hidup sehari-hari, prosesnya berlangsung dari produsen kepada konsumen. Perdagangan dibedakan atas perdagangan besar, sedang dan kecil. Dalam perdagangan besar jual beli berlangsung secara besar-besaran. Dalam perdagangan besar, barang tidak dijual/disampaikan langsung kepada konsumen atau pengguna, sedangkan dalam perdagangan kecil, jual beli berlangsung secara kecil-kecilan dan barang dijual langsung kepada konsumen.

Dan apabila dilihat dari jenisnya ada kegiatan perdagangan tradisional yang interaksi antara pedagang dan pembeli masih terlihat seperti di pasar-pasar lokal ataupun regional yang berskala besar sekalipun, adapula yang sifatnya modern dimana tidak adanya interaksi antara penjual dan pembeli seperti di mini market atau supermarket.

Tabel 2.19 Jumlah Sarana Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Perdagangan (Unit)					Total (Unit)
		Pasar	Pusat Perbelanjaan / Toserba	Mini Market	Rumah Makan / Restoran	Toko / Warung Kelontong	
1	Kawalu	1	1	24	28	384	438
2	Tamansari	2	-	18	4	242	266
3	Cibeurum	1	-	18	6	892	917
4	Purbaratu	1	-	7	5	112	125
5	Tawang	1	-	35	25	544	605
6	Cihideung	1	7	25	51	410	494
7	Mangkubumi	2	-	16	19	831	868
8	Indihiang	1	-	19	16	253	289
9	Bungusari	-	-	6	6	174	186
10	Cipedes	-	2	32	9	134	177
Jumlah		**10**	**10**	**200**	**169**	**3,976**	**4,365**

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Data Kota Tasikmalaya Dalam Angka, Tahun 2021

Keberadaan pasar rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya pada saat ini dirasakan semakin penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan hasil pertanian dan hasil industri kecil menengah dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Saat ini, Pasar Cikurubuk menjadi pasar induk hasil bumi bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur, yang mampu memasarkan berbagai produk hasil pertanian paling lengkap, seperti: beras, sayuran, daging, ikan, telur dan lainnya serta hasil industri kecil menengah seperti alas kaki dan bordir.

Tabel 2.20 Jumlah Pasar Rakyat di Kota Tasikmalaya Tahun 2019

No	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Luas			Jumlah		
				Tanah (M2)	Bangunan	Lantai	Loas	Kios	Dasaran
1	Pasar Cikurubuk	Jl. Residen Ardiwinangun, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1994	43.120	25.650	1	50	2.772	1.867
2	Pasar Pancasila	Jl. Pancasila, Kel. Lengkongsari Kec. Tawang	1995	6.540	4.656	1	60	249	300

No	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Luas			Jumlah		
				Tanah (M2)	Bangunan	Lantai	Loas	Kios	Dasaran
3	Pasar Indihiang	Jl. Letnan Harun, Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang	1997	10.622	743	1	0	402	50
4	Pasar Padayungan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung	1995	9.000	1.968	1	0	261	20
5	Pasar Cibeuti	Jl. Raya Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu	1990	696	691	1	12	44	0
6	Pasar Gegernoong	Jl. Raya Tamansari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari	1999	1.000	538	1	0	91	10
7	Pasar Burung dan Besi	Jl. Kh. Ez. Mutaqien, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1997	6.407	444	1	0	244	40
8	Pasar Nyemplong / Sindang Hayu	Setiawargi Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	2016	5.650	1.364	1	26	0	37
9	Pasar Cibeureum	Jl. Kh. Khoer Affandi Kel. Margabakti Kec. Cibeuruem	2018	4.630	2.989	1	128	78	0
10	Pasar Purbaratu	Belum beroperasi	2019				276	4141	2324

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020

2.6. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai pemerintah (BPS) dan juga beberapa negeara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.21 Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2014-2019

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kemiskinan (%) (PO)	15,95	16,28	15,60	14,80	12,71	11,60
Pendudukan Miskin (ribu orang)	105,440	106,78	102,79	97,85	84,22	79,98
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	351,718	367,673	397,215	416,837	447,008	457.899
Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,12	2,85	2,37	2,01	1,52	1,98
Keparahan Kemiskinan (P2)	0.86	0,69	0,57	0,42	0,31	0,53

Sumber : RKPD Kota Tasikmalaya, Tahun 2021

2.7. Gambaran Umum Kelitbangan

2.7.1. Kelembagaan

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya. Susuna organisasi Bappelitbang Kota Tasikmalaya melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pmbangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Susunan organisasi Bappelitbang Kota Tasikmalaya ditetapkan Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawain, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Bidang yang ada di Bappelitbang Kota Tasikmalaya yaitu:

1. Bidang pendanaan, pengendalian dan Evaluasi yang membawahi:
    a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
    b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangungan Manusia yang membawahi:
    a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
    b. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
3. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayaahan yang membawahi:

a. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
b. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang membawahi:
   a. Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
   b. Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi.

Pada tahun 2019, penyelenggaraan fungsi urusan penelitian dan pengembangan di laksanakan oleh bidang penelitian dan pengembanga di Bappelitbang Kota Tasikmalaya**.** Tugas Kepala Badan Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya yaitu:

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
2. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
3. Menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, Renstra dan Renja perangkat daerah, serta perencanaan makro lainnya;
5. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
6. Menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota;
7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
8. Menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan pada unit kerja lainnya;
9. Menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan badan;
10. Menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
11. Melaksanakan koordinasi ddengan perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas badan;
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas bidang penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan Daerah;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Daerah;
4. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi Daerah;
6. Menyelengarakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi Daerah;
7. Menyelenggarakan fasilitasi teknis penelitian dan pengembangan serta inovasi Daerah;
8. Menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.8
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kota Tasikmalaya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH

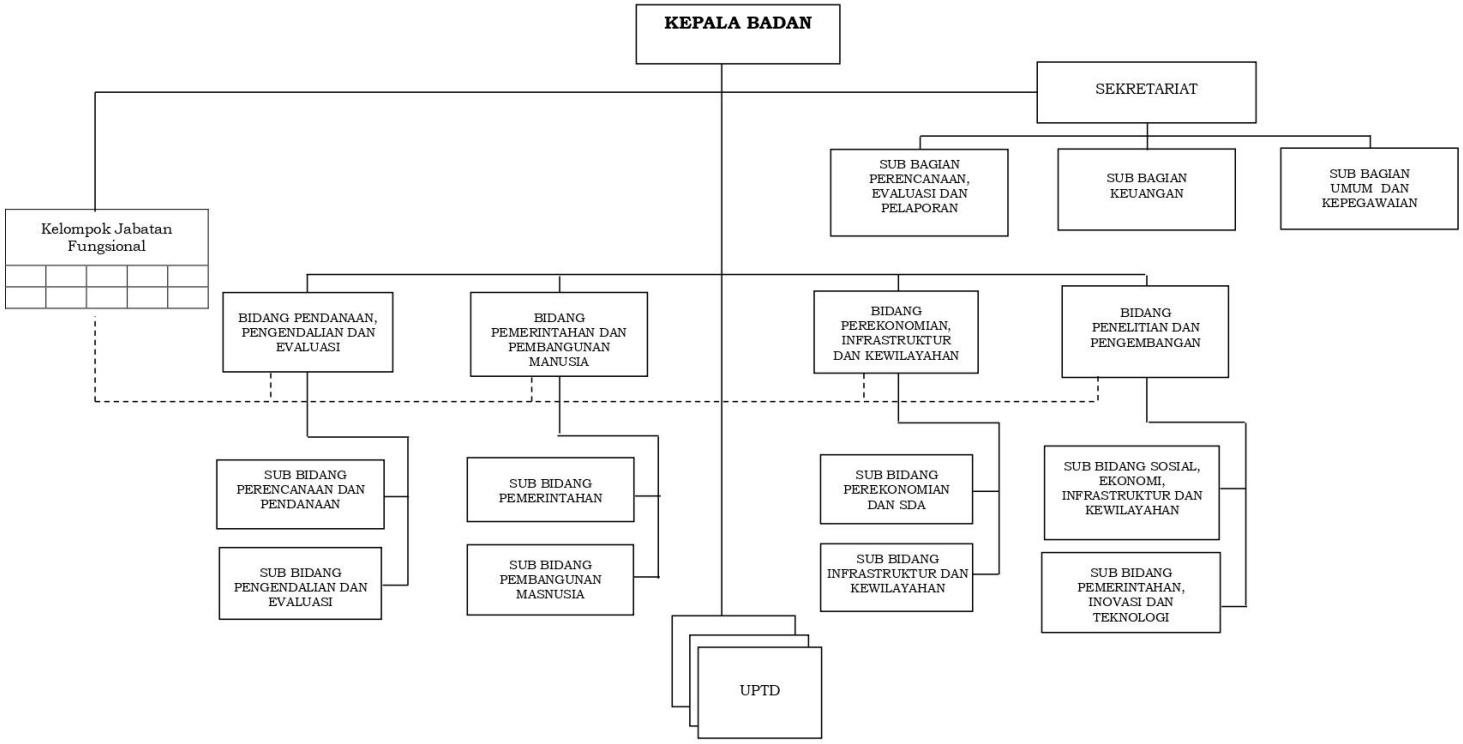

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, terkait pembentukan pengorganisasian kelitbangan yang terdiri atas Majelis Pertimbangan (MP), Tim Pengendali Mutu (TPM) dan Tim Kelitbangan. Pengorganisasian kelitbangan tersebut, di Pemerintah Kota Tasikmalaya bekym secara penuh berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri. Secara fungsi, ketiga unsur pengorganisasian telah dilaksanakan dalam pelaksanaan kelitbangan di Bappelitbangda, namun secara administratif, baik keanggotaan dan tugasnya belum ditetapkan dalam sebuah keputusan pejabat yang berwenang.

2.7.2. Sumber Daya Kelitbangan

Sumber daya manusia Kelitbangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya. Jabatan fungsional keahlian yang dimaksud adalah pejabat fungsional peneliti, perekayasa, analisis kebijakan dan pejabat fungsional alin yang etrkait fungsi kelitbangan. Tenaga lain yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas dan pelaksana atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

Sumber daya Kelitbangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional keahlian dan pejabat fungsional umum. Rincian jumlah personil pelaksana kelitbangan pada tahun 2020 berjumlah 51 (lima puluh satu) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Unit Kerja

No	Uraian	Eselon II B		Eselon III A		Eselon III B		Eselon IV A		JFU		JFP		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	-	-	-	1	2	3	5	1	-	13
3	Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	-	-	-	1	2	-	4	-	-	2	9
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	1	-	10
5	Bidang Perekonomian, Insfrastruktur dan Kewilayaahan	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	9
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	-	9
Jumlah		**1**		**1**		**4**		**11**		**26**		**8**		**51**

Sumber : Renstra Bapelitbangda Kota Tasikmalaya,Tahun 2017-2022

Dari tabel diatas dapat dilihat seluruh jabatan struktural pada Bappelitbangda Kota Tasikmalaya terisi sesuai dengan jumlah formassi jabatan yanga da sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Jabatan Fungsioanl Umum (JPU) pada Bappelitbangda terdapat sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang tersebar pada tiap bidang dan skretariat. Selain itu terdapat juga Jabatan Fungsional Perencana (JFP) ada sebanyak 8 (delapan) orang.

2.7.3. Pendanaan Kelitbangan

Pembiayaan penyelengaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, saat ini masih menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.23 Anggaran Per Program Tahun 2019

No	Program	Anggaran		%
1	Program peningkatan pelayanan publik	5.000.000,00	4.285.000,00	85,7
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.403.150.000,00	1.314.188.516,00	93,66
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	553.797.835,24	520.145.135,00	93,92
4	Program peningkatan disiplin aparatur	45.460.000,00	44.850.000,00	98,66
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75.000.000,00	33.061.000,00	44,08

No	Program	Anggaran		%
6	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	19.238.000,00	96,19
7	Program perencanaan kerja	5.000.000,00	4.970.020,00	99,4
8	Program perencanaan pembangunan daerah	2.251.766.025,00	1.899.564.941,00	84,36
9	Program pengendalian perencanaan pembangunan daerah	656.901.700,00	616.152.041,00	93,8
10	Program penelitian dan pengembangan daerah	1.382.730,00	1.256.961.876,00	90,9

Sumber : RKPD Kota Tasikmalaya, Tahun 2021

2.7.4. Kerjasama Kelitbangan

Kejasama kelitbangan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi atau komunitas terkait lainnya. Kerjasama yang dilakukan meliputi pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan inovasi. Kerjasama pelaksanaan kegiatan kelitbangan sebagain besar di lakukan dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Tasikmalaya yang telah diformalkan melalui kesepatan/MOU dengan Pemerintah Tasikmalaya. Dalam pelaksanannya mengunakkan bentuk kerjasama swakelola dengan instasni pemeintah lain sesuai dengan peraturan barang jasa yang berlaku, selain itu pula dilakukan kerjasama kolaborasi tim pelaksana kelitbangan dan inovasi.

Selain dengan PTN, kerjasama dilaukan dengan perguruan tinggi swasta, komunitas-komunitas, akademis, pakar/praktisi, baik yang terikat secara administrasi dalam bentuk kontrak/perjanjian kerjasama atau pun tidak terikat**.**

2.8. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi melalui diskusi dan telaahan dkumen terkait, maka dapat ditampilkan potensi kelitbangan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan serta inovasi di Kota Tasikmalaya;
2. Tingginya kebutuhan kelitbangan dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemeringah Kota Tasikmalaya;

3. Adanya motivasi dari ASN Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya melalui pelaksanaan kelitbangan khususnya dalam hal inovasi;

Sementara permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Dewan Riset Daerah sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-undangan;
2. Belum adanya tenaga pendukung kelitbangan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi administrasi kelitbangan;
3. Belum tersedianya media publikasi di media cetak dan OJS (*open journal system*) untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan Kota Tasikmalaya;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
5. Belum optimalnya sinergitas dan keselaran perencanaan pembangunan
6. Belum optimalnya penerapan system informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*)
7. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam pembangunan,

2.9. Peluang dan Tantangan

Adapun peluang yang berasal dari ekstrenal Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dapat mempengaruhi kegiatan kelitbangan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya perguruan tinggi negeri dan swasta serta akademisi kompeten yang berkualitas di Kota Tasikmalaya dalam mendukung kegiatan kelitbangan di Kota Tasikmalaya;
2. Potensi sumber daya manusia yang kreatif, produktif serta komunitas yang dapat mendukung kegiatan kelitbangan di Kota Tasikmalaya;
3. Peluang kerjasama kelitbangan dengan lembaga internassional;
4. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pengembangan kelitbangan;
5. Terbukanya kerjasama kelitbangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten lainnya;

6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kelitbangan di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Dinamika pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan bidang kelitbangan dalam konteks penetapan kebijakan strategis yang lebih integrasi, tepat sasaran dan implementatif;
2. Perubahan regulasi menyebabkan adanya penyesuaian program prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini Bapelitbangda perlu melakukan rekomendasi kebijakan yang berkualitas selaras dengan program dan kegiatanya untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Tuntutan dari berbagai stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga litbang diharapkan dapat memberikan rekomendasi perumusan kebijakan yang implemantatif dan tepat sasaran untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan.

2.10. Isu Strategis Kota Tasikmalaya

Isu strategis yang tedapat didalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2018 dan harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. **Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah**

   Tata nilai kehidupan masyarakat yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam beragama, moral, akhlak, karakter dan kearifan lokal menjadi isu strategis yang menjadi prioritas, hal ini disebabkan dengan masih rencanya implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, menurunnya moral, akhlak dan karakter masyarakat, rentannya kehidupan masyarakat akan konflik, toleransi beragama, berbangsa dan bernegara, masih adanya pelanggaran dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya, belum optimalnya pembinaan, apresiasi dan pelestarian terhadap seni dan budaya.

2. **Penangulangan kemiskinan**

   Penangulangan kemiskinan masih menjadi isu stratefis yang perlu segara ditagani dan mendapat perhatian khusus. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka

kemiskinan dan angka pengangguran serta jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, dan masih rendahnya tingkat partisipasi angakatan kerja.

3. **Insfrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup**

   Insfrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup, masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah dan penanganan sampah, terbatasanya ruanhg terbuka hijau dan ruang-ruang publik/taman-taman kota, masih terdapat genangan air hujan, belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju daerah pertanian teknis, masih terbatasnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas, belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, dan belum optimalnya cakupan layanan angkutan umum.

4. **Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat**

   Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta daya belu masyarakat menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas. Hal ini ditandai dengan masih kurang optimalnya kontribusi kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB, masih rendahnya PDRB per kapita dan daya beli masyarakat dan masih tingginya kontribusi sandang dan bahan makanan terhadap laju inflasi, masih tingginya rasio gini atau kesenjangan pendapatan masyarakat, belum optimalnya nilai investasi daerah dan kunjungan wisatawan yang masuk, kurangnya jumlah pelaku wira usaha mikro dan kecil, pemasaran dan akses terhadap permoaddalan, serta belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan.

5. **Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar**

   Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar menjadi isu strategis yang dititikberatkan pada kondisi kualitas hidup masyarakat terutama pada isu-isu yang menyangkut urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat serta keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih belum optimalnya capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM), baik indeks pendidikan maupun indeks kesehatan yang ditandai dengan cukup rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, adanya ketimpangan sebaran dan kualitas pendidikan baik SDM maupun sarana prasarana. Belum optimalnya capaian angka harapan hidup, masih cukup tingginya angka kematian ibu dan bayi dan masih ditemukannya kasus balita gizi buruk, belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, belum optimalnya pelayanan KB yang menyebabkan angka kelahiran total masih belum optimal, serta masih belum optimalnya penanganan OMKS terutama yang berada diluar panti.

6. **Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga**

   Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga menjadi isu strategis yang mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya capaian indeks pembangunan dan pemberdayaan gender, masih cukup tingginya kasus kekerasan dan ekspoiltasi terhadap perempyan dan anak,belum optimal dan memadainya perlindungan dan ketersediaan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, serta optimalisasi pengendalian penduduk.

7. **Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif , efesien, transparan dan akuntabel**

   Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi isu strategis, yang ditandai oleh masih kurangnya kualitas dan kuantitas ASN, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPSP), belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah, masih terdapat beebrapa gedung kantor perangkat daerah yang belum representatf, masih belum optimalnya implementasi e-goverment pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik.

Kota Tasikmalaya memiliki problematika internal yang timbul dari terjadinya perubahan di segala bidang, sebagai Kota yang memiliki jarak cukup dekat dengan Ibukota Provinsi Kota Tasikmalaya dan dikelilingi oleh Kabupaten/Kota Priangan Timur (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan sebagainya) yang juga berkembang pesat, Kota Tasikmalaya memiliki beragam problematika. Problematika tersebut dikelompokkan berdasarkan isu-isu besar yang terdiri dari :

1. Isu aspek fisik;
2. Isu aspek kebencanaan;
3. Isu aspek sosial kependudukan;
4. Isu aspek ekonomi;
5. Isu aspek infrastruktur;
6. Isu aspek transportasi;dan
7. Isu aspek dibidang perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tasikmalaya.

A. Isu Aspek Fisik

Dilihat dari kondisi saat ini dan persoalan yang ada sekarang maupun yang akan datang di Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa isu strategis masih besarnya lahan untuk pengembangan fisik ke depan. Berdasarkan hasil digitasi peta dasar RTRW Kota Tasikmalaya tahun 2011 dapat diketahui bahwa Kondisi penggunaan lahan saat ini (eksisting) dari tahun 2010 hingga tahun 2015 masih didominasi oleh lahan sawah sebesar 5.984,36 hektar atau 32,75%, lahan permukiman dan tempat kegiatan 4.505,42 atau sebesar 24,66%, semak belukar/alang-alang sebesar 2.682,80 hektar atau 14,68%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dominasi lahan non terbangun masih mendominasi lahan di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan informasi di atas, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa Kota Tasikmalaya masih memiliki lahan cukup luas untuk pengembangan fisik kota ke depan. Meskipun demikian, sesuai amanat UUPR No. 26 Tahun 2007 terdapat lahan yang harus disiapkan untuk lahan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari total luas lahan Kota

Tasikmalaya, terdiri dari 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau private.

B. Isu Aspek Kebencanaan

Di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa potensi rawan bencana, diantaranya bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah, serta banjir/genangan.Wilayah rawan bencana tersebut diantaranya :

1. **Rawan bencana alam geologi aliran lahar**

   Gunung api terdekat dengan Kota Tasikmalaya adalah Galunggung, sekitar 19 km dari pusat kota. Gunung ini merupakan gunung api tipe A yang masih aktif, letusan terakhir terjadi pada tahun 1982 mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan data dasar gunung api di Indonesia (Direktorat Vulkanologi, 1978) beberapa lokasi yang termasuk daerah waspada antara lain sekitar alur Sungai Ciwulan, Cimulu serta di bagian timur dan utara Kota Tasikmalaya.

2. **Rawan bencana gerakan tanah skala menengah**

   Kawasan rawan bencana ini berada di daerah yang sering terjadi gerakan tanah, seperti daerah yang berbatasan dengan sungai, gawir, tebing jalan atau lereng yang aktif akibat curah hujan yang tinggi. Luas keseluruhan kawasan ini kurang lebih 1.588 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Kawalu di sekitar bantaran sungai Ciwulan, sebagian Kecamatan Purbaratu di sekitar bantaran sungai Citanduy dan sebagian Kecamatan Tamansari di sekitar bantaran sungai Cikembang.

3. **Rawan Bencana Banjir**

   Salah satu isu kebencanaan yang sering terjadi di Kota Tasikmalaya adalah terkait dengan banjir. Banjir yang terjadi di Kota Tasikmalaya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

   a). Tidak memadainya kapasitas dan daya tampung saluran drainase akibat adanya penyempitan dan pendangkalan saluran sehingga daya tampung saluran tidak sesuai dengan debit air yang datang. Kondisi ini akibat banyaknya tumpukan sampah dan sedimen di dalam saluran;

   b). Tingginya *run-off water* karena berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kawasan resapan air;

c). Tingginya penyempitan sungai akibat banyaknya sedimen dan sampah serta banyaknya bangunan liar di sekitar sungai;

d). Tingginya perubahan alih fungsi lahan sawah menjadi areal bangunan;

e). Banyaknya rumah yang memiliki elevasi lebih rendah daripada saluran drainase;

f). Banyaknya saluran brangang yang sudah tertutup dan beralih fungsi menjadi bagian dari bangunan rumah;

g). Banyaknya utilitas umum yang memotong bangunan lintasan air dan pembangunan yang tidak memperhatikan saluran dan gorong-gorong:

h). Tidak adanya drainase sekitar rel kereta api dan penutupan saluran di landasan pacu lapangan Wiriadinata.

C. Isu Aspek Ekonomi

Beberapa isu yang diidentifikasi berdasarkan kondisi ekonomi di Kota Tasikmalaya diantaranya yaitu :

1. PDRB Kota Tasikmalaya atasdasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 21,59 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0.16 triliun rupiah atau 0.74 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 21,75 triliun rupiah. Penurunan PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya nilai PDRB beberapa kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha dengan penurunan terdalam adalah kategori Jasa Perusahaan dengan penurunan mencapai 11,35 persen diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan penurunan mencapai 4,55 persen di tahun 2020;

2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya

   ❒ Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019;

   ❒ Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi lapangan usaha yang terpengaruh langsung sehubungan adanya PSBB karena adanya covid-19;

   ❒ Nilai PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 15,43 triliun rupiah. Turun sebesar 0,32 triliun dari 15,75 triliun rupiah pada tahun 2019;

❒ Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan menurunnya :

- ✓ Pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan;
- ✓ Pengadaan Listrik dan Gas;
- ✓ Konstruksi;
- ✓ Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor;
- ✓ Transportasi dan Pergudangan;
- ✓ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- ✓ Jasa Keuangan dan Asuransi;
- ✓ Jasa Perusahaan;
- ✓ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan
- ✓ Jasa lainnya

D. Isu Aspek Infrastruktur

Isu dan persoalan infrastruktur di Kota Tasikmalaya umumnya adalah berupa kurangnya *supply* atau ketersediaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan (*demand*) pelayanan dasar masyarakat. selain itu, secara kualitas pelayanan infrastruktur dasar masih kurang layak, seperti: drainase, persampahan dan air limbah. Untuk infrastruktur listrik dan telekomunikasi, jaringan pelayanannya sudah menjangkau seluruh rumah tangga di Kota Tasikmalaya, namun tidak halnya untuk pelayanan jaringan air bersih PDAM yang baru mencakup sekitar 28,46 % pelanggan saja. Selain itu berdasarkan buku Studi EHRA, Buku Putih Sanitasi Program PPSP 2010-101343 Kelurahan di Kota Tasikmalaya merupakan Area berisiko sanitasi.

Secara khusus isu untuk masing-masing infrastruktur diuraikan sebagai berikut :

1) Listrik

Isu atau persoalan kelistrikan di Kota Tasikmalaya adalah:

- pemadaman listrik akibat kelebihan beban dan kurangnya pasokan daya listrik.
- pemasangan instalasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan penduduk
- Pertumbuhan kebutuhan akan listrik yang kurang terencana membuat pemasangan instalasi menjadi tumpang tindih sehingga pembebanan listrik menjadi tidak teratur.

2) Telekomunikasi

Isu yang terkait dengan telekomunikasi di Kota Tasikmalaya adalah:

- penyusunan database terkait dengan pemerintah dan data-data spasial dan non spasial pembangunan belum dapat diakses penuh oleh masyarakat.
- perkembangan jaringan telepon seluler berimplikasi pada kebutuhan menara BTS dan micro cell yang penempatannya dapat mengganggu esterika kota.
- Pengembangan sistem ducting terpadu untuk jalur telekomunikasi dengan jalur lainnya masih terkendala pendanaan serta tumpang tindih lahan dengan sektor lain yang sama-sama menggunakan sistem ducting.

3) Air bersih

Isu dan persoalan terkait dengan air bersih adalah sebagai berikut:

- cakupan wilayah pelayanan air bersih yang terbatas dan kuantitas debit air yang rendah.
- masyarakat di beberapa wilayah Kota Tasikmalaya sering mengalami kesulitan air dikarenakan air hanya mengalir pada jam – jam tertentu (bergilir).
- kurangnya regulasi dalam upaya konservasi sumber air bersih, masalah kelembagaan dan kerjasama antardaerah dalam mengelola sumber-sumber air juga menjadi isu utama.

4) Drainase

Isu dan persoalan terkait dengan drainase adalah ketersediaannya dan kedalaman saluran yang belum memenuhi standar pelayanan minimum (SPM), serta pembangunan fisik yang berjalan tidak seimbang dengan pertambahan prasarana drainase. Berdasarkan data Strategi Sanitasi Kota dapat diketahui bahwa permasalahan drainase merliputi:

- Saluran drainase yang dibangun belum sistematis;
- Kota Tasikmalaya memiliki saluran irigasi yang menjadi bagian dari sistem irigasi kota/kabupaten Tasikmalaya dan melewati wilayah kota, dan saat ini umumnya dimanfaatkan sebagai saluran drainase;
- Kapasitas sungai/saluran irigasi yang berfungsi sebagai penerima limpasan air hujan sudah tidak memadai, sehingga terjadi genangan air saat musim hujan;

- Adanya kewenangan yang tumpang tindih antara OPD teknis dalam hal penanganan drainase

5) Persampahan

Isu dan persoalan terkait persampahan di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- Fasilitas penampungan tempat sementara masih rendah, karena belum ditemukannya lahan yang tepat untuk pembuatan TPS.
- Fasilitas pengumpulan masih rendah, sama halnya dengan TPS belum menemukannya lahan yang tepat untuk fasilitasi tempat pengumpulan.
- Pewadahan belum terpisah antara organik dan anorganik, serta kepemilikan pewadahan juga masih rendah.
- Pengangkutan terkait jalur rotasi, armada, serta jadwal yang masih belum teratur dan terjadwal dengan baik.
- Tempat Pembuangan Akhir masih terbatas pada sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, dan organisasi tata kelola di lokasi TPA Ciangir.
- Pengolahan sampah terkendala minimnya teknologi pengolahan, pemasaran hasil pengolahan, serta fasilitasi TPST yang masih rendah. Isu lainnya adalah mengenai teknologi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yang membutuhkan upaya khusus mengedukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat.

6) Air Limbah

Isu dan persoalan terkait air limbah Kota Tasikmalaya adalah mengenai saluran air limbah yang masih bersatu dengan drainase baik untuk kegiatan permukiman ataupun komersil, serta belum adanya IPAL dalam mengelola air limbah Kota Tasikmalaya. Khususnya untuk kegiatan komersil diperlukan pengelolaan terlebih dahulu sebelum akhirnya dibuang pada saluran air limbah perkotaan.

Berdasarkan data Strategi Sanitasi Kota terdapat beberapa permasalahan air limbah:

- Secara *on site system*, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan limbah rumah tangganya. Hal ini terlihat dari kepemilikan tangki septik di Kota Tasikmalaya masih rendah serta jumlah armada sedot tinja yang masih terbatas.

- Secara *off site system*, Kota Tasikmalaya sama sekali belum memiliki sistem off site system.
- IPLT di Kota Tasikmalaya tidak beroperasi akibat volume tinja tidak cukup.

E. Isu Aspek Transportasi

Permasalahan utama di Kota Tasikmalaya terkait dengan sistem jaringan jalan adalah proporsi jalan dalam kondisi rusak masih tinggi. Pada tahun 2010, jalan kota dalam kondisi rusak berat sepanjang 70.144 m dan rusak sepanjang 127.442 m. Selain itu, kondisi jembatan antarwilayah kurang representatif. Terdapat 3 (tiga) jembatan antarwilayah diantaranya jembatan Leuwibudah, jembatan Tonjong dan jembatan Gobang. Persoalan lainnya terkait dengan rasio jaringan jalan yang saat ini baru mencapai 4,14 % dari keseluruhan luas wilayah Kota Tasikmalaya dimana kondisi ideal seharusnya adalah 5%. Kapasitas jalan yang masih rendah dan terbatas diperparah dengan banyaknya hambatan samping seperti *on-street parking*, PKL dan pasar tumpah.

Sebagian besar fungsi jaringan jalan di Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan rencana jaringan jalan yang tercantum dalam RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Akibatnya, kondisi fisik, serta aksesibilitas dan mobilitas jaringan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan. Selain itu, kondisi jalan di beberapa ruas masih buruk yang ditandai dengan jalan berlubang dan belum memiliki drainase yang layak, sehingga berpotensi menimbulkan genangan atau banjir ketika hujan terjadi. Hal yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah pendataan ruas jalan se kota tasikmalaya, dimana terdapat ruas jalan yang belum memiliki nama dan kelas jalan, hal ini terkait untuk pengaturan pembatasan tonase kendaraan yang hingga saat ini belum dilakukan pengaturannya.

Dalam kaitannya dengan moda transportasi, pertumbuhan moda transportasi yang tidak seimbang antara pertambahan trayek dan armada dengan permintaan perjalanan. Ditambah lagi, pelayanan angkutan umum yang masih terbatas (kualitas dan aksesibilitas) sehingga penduduk cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, Fungsi pelayanan terminal dan sub terminal tidak optimal sebagai dampak adanya terminal bayangan di beberapa titik. Adapula Ketidakteraturan moda transportasi becak/delman di pusat kota.

Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, cakupan pelayanan angkutan umum, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan sarana parkir masih terbatas, terutama pada ruas jalan pusat kota. Adapun untuk penunjang sarana lalu lintas seperti pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum merata.

Simpul transportasi di Kota Tasikmalaya yang terdiri dari stasiun, terminal, dan bandara pada dasarnya belum memadai untuk melayani penumpang. Pengembangan Bandara Wiriadinata dengan status bandara militer menjadi bandara komersil sudah dilakukan sejak tahun 2016 namun tidak disertai dengan pengembangan fasilitas penunjang bandara seperti ruang parkir untuk pengguna bandara dan aksesibilitas yang baik. Rencana pengembangan bandara masih terkendala koordinasi di lapangan terkait pembebasan lahan.

F. Isu Aspek di Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Tasikmalya

Isu pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tasikmalaya yang selalu muncul antara lain adalah alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan. Bahwa pola perkembangan alih fungsi lahan sawah tanaman pangan ke non sawah polanya tidak tentu, artinya alih fungsi lahan sawah sangat tergantung oleh banyak faktor seperti terjadinya pembangunan fisik seperti perkantoran (pemerintah, swasta) perumahan penduduk, jalan raya dan lain-lain, di Kota Tasikmalaya. Alih fungsi lahan pertanian adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima di Kota Tasikmalaya, penentuan potensi alih fungsi lahan ini diharapkan dapat mengendalikan sedikitnya lahan-lahan yang masih punya potensi tinggi sebagai lahan sawah.

Penetapan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik, padahal dalam RTRW sudah dialokasikan ruang pertanian yang cukup besar, sehingga perlu adanya pengendalian alih fungsi lahan. Sulitnya mencari kesepakatan dengan para pemilik lahan pertanian dalam rangka mempertahankan fungsi pertanian menjadi kendala. Belum lagi adanya kepentingan yang berbeda-beda, berbagai kewenangan yang terlebih serta keterbatasan sumberdaya pemerintah daerah menyebabkan persoalannya berarut-larut. Peraturan perundangan yang dicantumkan dalam RTRW belum berjalan efektif, terlebih karena lahan pertanian

yang direncanakan ada beberapa yang sudah tidak produktif. Selain itu, dinas teknis terkait tidak menawarkan jalan keluar terutama bagi masyarakat di lokasi rencana lahan pertanian, selain persoalan kelemahan administrasi pembangunan dimasa lalu, dukungan terkait penerapan keuntungan jika mempertahakan lahan pertanian seperti insentif belum dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kawasan pertanian lahan sawah di Kota Tasikmalaya khususnya di lokasi rencana lahan pertanian. Kegiatan pembangunan fisik bangunan seperti bangunan perumahan sangat pesat dan tidak terkendali. Sehingga saat ini kondisi saat ini lahan pertanian telah banyak dibangun perumahan.

Selain itu, salah satu permasalah dominan yang terjadi di Kota Tasikmalaya adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan terjadinya penggunaan campuran dalam pemanfaatan ruang Kota. Hal ini terutama terjadi pada perumahan golongan menengah ke atas dengan kavling besar yang menjadi kegiatan komersial. Sebagian besar perumahan yang telah beralih fungsi tersebut tidak hanya berskala pelayanan lingkungan tetapi pelayanan kota atau regional. Perubahan pemanfaatan ruang ini pada umumnya tidak diikuti pembangunan lahan parkir yang memadai. Perubahan pemanfaatanruang dari perumahan ke non perumahan ini telah mengakibatkan tarikan jumlah pengunjung yang menyebabkan kemacetan lalulintas. Kemacetan tersebut semakin parah dengan kurangnya lahan parkir.

Sampai saat ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Alih fungsi perumahan menjadi komersial/perkantoran/ jasa (misalnya: restoran/cafe, kantor konsultan, hotel/guest house/ apartemen) masih terus terjadi. Rumah indekos atau rumah susun juga sudah menjadi permasalahan tersendiri di Kota Tasikmalaya, karena walaupun fungsinya hunian, tapi intensitas dan bentuknya berbeda. Hal-hal tersebut menyebabkan permasalahan baru yang timbul, seperti kurangnya parkir sehingga kendaraan diparkir on street dan menyebabkan kemacetan, hal ini terjadi karena sarana dan prasarana yang ada di suatu kawasan tersebut tidak mampu menampung kegiatan yang terjadi. Selain persoalan perubahan fungsi lahan dan bangunan yang bersifat komersial, persoalan perubahan kawasan lindung menjadi perumahan juga menjadi persoalan yang menjadi pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh Pemda Kota Tasikmalaya

Bab 3
TINJAUAN KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengatisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan seara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
2. Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja pelayanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepada Daerah ke dalam rencana kerja yaitu *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.

Gambar 3.1
Kerangka Perencanaan Operasional

3.1.1. Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

A. Visi

Visi Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan aspirasi dari seluruh *stakeholder* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin. Selain itu Visi Kota Tasikmalaya juga tetap mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi (dalam hal ini perencanaan pembangunan Jawa Barat dan Nasional). Adapun Visi Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 disepakati sebagai berikut:

"Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat"

B. Misi

Dalam mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut telah disepakati 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

C. Arah Pembangunan

1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat;
2. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Tewujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani;
4. Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya;
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi;
6. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam;

7. Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan *tourism attractiveness* yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju.

D. Arahan Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya

Arah pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 merupakan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun untuk meweujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kondisi kebijakan dan lingkungan. Perwujudan visi pembangunan Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 sangat ditentukan pleh perencanaan tata ruang wilayah Kota Tasikmalaya. Penataan ruang dan wilayah hingga tahun 2025 diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi pengembangan kota dalam konteks regional dan nasional, yang tujuannya :

1. Terciptanya kehidupan kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta berkelanjutan sesuai dengan tata nilai yang ada;
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan di dalam RPJPD Kota Tasikmalaya merupakan cerminan urgensi permasalahan yang harus segera diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan pembangunan lainnya serta sebagai harapan yang akan dicapai. Prioritas pada tiap pentahapan, akan berbeda namun tetap ada keterkaitan dan berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Di dalam RPJPD Kota Tasikmalaya sasaran pokok tertuang didalam 7 (tujuh) visi

pembangunan jangka panjang. Tahapan dan skala prioritas utama disusun sebagai berikut :

1. **Tahap ke – 1 (2005-2009)**

   Untuk mewujudkan visi Kota Tasikmalaya sebagai Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Provinsi Jawa Barat, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah peletakan dan penantaan dasar pembangunan yang kuat atau pada tahap ke-1 ini disebut Tahap Penataan Landasan Pembangunan Kota. Untuk menjadi sebuah kota perdagangan dan industri yang maju tentunya harus ditopang landasan utama pembangunan atau fondasi yang kuat. Landasan utama pembangunan terletak pada Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang kuat. Dimana IPM ini bertutuk berat pada sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli. Disamping IPM sebagai prioritas utama dalam tahap ini juga didukung oleh pembangunans ektor lain yang diuraikan sebagai berikut :

   - Percepatan pembangunan insfrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta, terutama insfrastruktur jalan sebagai akses dalam pembangunan sektor lainnya serta pembuatan masterplan tata ruang yang terpadu untuk jangka panjang dalam rangka mempersiapkan sebuah kota yang maju;
   - Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, ditandai dengan tidak adanya bangunan sekolah yang rusak dan perintisan program wajib belajar 12 tahun serta biaya pendidikan yang terjangkau dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang cerdas dan bermoral berlandaskan iman dan taqwa;
   - Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, ditandai dengan mudahnya akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat;
   - Meningkatnya kesejahteraan masyarakt ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian dana bergulir, kredit lunak dan kegiatan padat karya dalam upaya meningkatnya daya beli masyarakat serta pemberian jaminan sosial oleh pemerintah. Pembangunan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan

memberikan insentif bagi para investor dalam upaya membuka lowongan pekerjaan;

- Pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya konsistensi seluruh penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata kelola kepemrintahan yang baik dan bersih serta tegaknya supermasi hukum;
- Intensifikasi sektor pertanian, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk meminimalkan bencana mewujudkan lingkungan yang indah,asri dan sehat; dan
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyrakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

2. Tahap ke – 2 (2010-2014)

Pada tahap ke-2 ditunjukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kota Tasikmalaya di segala bidang dengan tetap masih menekankan pada pemantapan landasan pembangunan kota atau disebut **Tahap Pemantapan Landasan Pembangunan Kota**. Tahap ini masih memprioritaskan dan meningkatkan pencapaian angka IPM masyarakat Kota Tasikmalaya. Pengembagan sektor industri, perdagangan dan jasa yang diuraikan sebagai berikut :

- Pemerataan pembangunan infrastruktur untuk lebih meningkatkan akses dan mobilisasi dikembangkan di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dengan tetap mengikuti serta peran serta masyarakat dan sektor swasta;
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tersedianya fasilitas pendidikan yang maju dan berbasis teknologi informasi, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dengan biaya pendidikan yang terjangkau dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang cerdas, berwawasan global dan bermoral berlandaskan iman dan taqwa;
- Sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan semakin membaik,dimana pelayanan kesehatan mudah diakses dengan biaya yang terjangkau;

- Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, diiringi oleh meningkatnya daya beli, menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- Tata kelola kepemrintahan yang baik dan bersih dan penegakan hukum semakin meningkat, pelayanan publik lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah;
- Daya saing perekonomian meningkatkan melalui penguatan industri kecil dan menengah serta berdirinya kawasan perdagangan serta sektor jasa yang didukung oleh investasi yang terus meningkat sejalan, dengan penguatan pembangunan sektor pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terpantau;
- Intensifikasi dan eksensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

3. Tahap ke – 3 (2015-2019)

Hasil dari evaluasi pelaksanaan, pencapaian dan sebagai kerberlanjutan Tahap ke-2, tahap ke-3 disebut **Tahap Menuju Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat**. Tahap ke-3 ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang dititikberatkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat dengan uraian sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas insfrastruktur kota diarahkan ke sentra-sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa dalam upaya mempercepat dan lebih meningkatkan akses serta mobilisasi pelaku dan masyarakat, peningkatan pemerataan pembangunan diwilayah Kota Tasikmalaya dengan tetap mengikuti serta peran serta masyarakat dan sektor swasta;

- Kualitas sumber daya manusia smakin membaik, cerdas, berwawasan global yang berbasis keunggulan lokal dan bermoral berlandaskan iman dan taqwa, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien, efektif dan terjangkau oleh masyarakat. Teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan penuntasan program wajib belajar 12 tahun;
- Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat semakin meningkat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses dengan dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang semakin baik;
- Masyarakat yang terus membaik tingkat kesejahteraannya sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyrakat lainnya di Indonesia yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas yang disertai dengan jaminan sosial dari pemerintah. Daya beli semakin meningkat, angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin semakin menurun;
- Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya serta kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat;
- Perekonomian yang berdaya saing semakin kuat dan kompetitif perlu dukungan pengembang sektor perdagangan dan industri kecil dan menengah serta sektr jasa dukungan investasi yang terus meningkat, semakin banyak berdirinya sentra industri kecil dan menengah, kawasan perdagangan serta sektor jasa sejalan dengan peningkatan pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai penopang ketahanan pangan;
- Pelestraian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang baik;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

4. Tahap ke – 4 (2020-2024)

Pelaksanaan dan pencapaian pada tahap ke-3 akan terus berkelanjutan pada tahap ke-4 yang disebut **Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat.** Tahap ke-4 ini merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor lainnya, yang digambarkan sebagai berikut:

- Pembangunan dan pengembangan insfrastruktur berkualitas kota hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa, serta sentra industri kecil dan menengah;
- Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil,berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat, bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam menghadapu persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan yang didukung oelh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien, efektif dengan biaya yang terjangjau oleh masyarakat, teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan pemantapan program wajib 12 tahun serta perintis wajib belajar ke jenjang perguruan tinggi;
- Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses;
- Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli dan pednapatan perkapita yang menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemertaan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional terus meningkata. Jaminan sosial dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyrakat sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus menurun;
- Struktur perekonomian kota semkain kuat dan kompetitif dalam era pasar global yang semakin nyata semaki mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan

sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai pemantapan ketahanan pangan;

- Kepercayaan masyrakat terhadap pemerintah semakin baik karena tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaanya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel makin meningkat;
- Pelestarian lingkungan, pegendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang modern;
- Intensifiaksi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik.

3.1.2. Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022

A. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tasikmalaya periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

"Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani"

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningatkan daya beli masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

C. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah berdasarkan analisi SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Kebijakan dan stategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pasca pandemik covid-19 khususnya tahun 2021 dan tahun 2022 diantaranya yaitu :

1. Penguatan Sektor Kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, peningkatan kapasitas health security terutama surveilans dan sistem informasi, peningkatan jejaring dan peningkatan dan pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan laboratorium;
2. Perluasan Program Perlindungan Sosial melalui perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal;
3. Menjaga ketahanan dan stabilitas pangan dan pemberian stimulus bantuan bagi pelaku usaha terutama di sektor pertanian, industri sektor

pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok usaha mikro dan sektor informal ;

4. Pembangunan Infrastruktur melalui investasi infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan permukiman, pertanian, industri dan pariwisata;
5. Akselerasi Investasi dengan menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi dan membuka lapangan kerja ;
6. Optimalisasi program kegiatan dalam APBD dalam mendorong perekonomian daerah dalam mencapai target pembangunan daerah.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah menjelaskan mengenai arah kebijakan kelitbangan Kota Tasikmalaya dan strategi kelitbangan Kota Tasikmalaya pada Tahun 2022-2025. Kedua hal tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun mendatang.

3.2.1. Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan secara jelas mengenai pentingnya fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi di lingkup Pemerintah Daerah. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, kegiatan kelitbangan di kabupaten/kota meliputi 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Penelitian;
2. Pengkajian;
3. Pengembangan;
4. Perekayasaan;
5. Penerapan;
6. Pengoperasian;dan
7. Evaluasi Kebijakan.

Pelaksanaan kelitbangan utama berorientasi pada kualitas hasil, *outcome*, dan mendukung inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk menghasilkan

pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, Kelitbangan pendukung dilalui dengan proses peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, serta pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Kelitbangan pendukung sangat penting perannya untuk menopang pelaksanaan kelitbangan utama.

Sinergitas antara kegiatan kelitbangan utama dan kegiatan kelitbangan pendukung dibutuhkan dalam rangak meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala isu strategis bidang.

Tabel 3.1
Jenis Kelitbangan Utama dan Keluarannya

No	Jenis	Keluaran
1	Penelitian	Rekomendasi
2	Pengkajian	Rekomendasi
3	Pengembangan	Naskah akademik, rancangan regulasi, permodelan kebijakan/program
4	Perekayasaan	Pedoman umum/teknis pelaksanaan
5	Penerapan	Uji coba model kebijakan/program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
6	Pengoperasian	Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi (lanjut dengan perbaika atau dicabut)

Sumber : Permendagri No.17 Tahun 2016

Pencapaian tujuan dan sasaran dari perangkat penelitian dan kelitbangan daerah perlu selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah. kebijakan kelitbangan akan menjadi serangkaian kebijakan yang akan ditemuh oleh perangkat kelitbangan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, tahapan yang perlu dilakukan dalam merumuskan arahan kebijakan Kelitbangan Tahun 2022-2025 adalah :

a. Melakukan pemetaan capaian pada akhir RPJMD 2017-2022 pada indikator kinerja setiap tujuan dalam tema pembangunan prioritas;
b. Menurunkan isu strategis pada setiap tema pembangunan priotitas pada setiap indikator kinerja;
c. Clustering arahan kebijakan kelitbangan 4 tahun kedepan berdasarkan isu strategis;
d. Menurunkan isu strategis pada setiap tema pembangunan prioritas yang telah dipetakan ke dalam gap yang terjadi pada setiap indikator kinerja. Gap pada setiap indikator kinerja juga digunakan untuk memperkuat kondisi isue starategis yang dipetakan;
e. Clustring arahan kebijakan kelitbangan 4 tahun kedepan berdasarkan isu strategis.

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya 2005-2025 adalah mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis, transparan, partisipatif, berkeadilan sosial, serta akuntabel, sehingga dapat melindungi kebebasan dan hak asasi masyarakat, serta menegakkan supermasi hukum.

Visi Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 yaitu Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat. Dalam mewujudkan visi Kota Tasikmalaya tersebut telah disepakati 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum;
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global;
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat;
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mam[u menciptakan keberlanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya;
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandasakan pada prinsip governmen *enterpreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya;

6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secra berkelanjutan;
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Indikasi program-program priotitas kelitbangan perlu memperhatikan misi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025, urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, program-program prioritas dan program unggulan daerah, serta isu-isu strategis yang terdapat di Kota Tasikmalaya.

Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2022-2025 di Kota Tasikmalaya diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis jangka panjang dan jangka menengah pengembangan di Kota Tasikmalaya ke depan yaitu :

1. **Peningkatan Tata Nilai Kehidupan dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar.**

   Peningkatan tata nilai kehidupan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan dasar, melalui :

   a. Peningkatan implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, diantaranya :
      - Peningkatan sosialisasi, penegakan dan monitoring perda tata nilai;
      - Peningkatan program magrib mengaji dan tasik bersedekah;
      - Beasiswa bagi siswa kurang mampu tahfidz al-quran.

   b. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, diantaranya :
      - Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pendidikan;
      - Peningkatan sarana pendukung pendidikan;
      - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
      - Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu berprestasi.

   c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, diantaranya :
      - Penuntasan pembangunan 2 (dua) RSU Pratama tipe D dan Rehabilitasi Puskesmas;
      - Penurunan stunting;

- Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (Preventif dan Promotif);
- Percepatan Bebas BABS / OPD untuk kesehatan lingkungan;
- Penanganan PMKS, Penanganan rehabilitasi anak terlantar, lansia terlantar, penyandangan disabilitas terlantar dan gepeng di luar panti;
- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga, penataan kawasan komplek olahraga Dadaha (persiapan PORPROV tahun 2022)

2. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomoi serta peningkatan daya saing daerah.

Perumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan daya saing daerah, melalui :

a. Percepatan investasi daerah, diantaranya :
   - Peningkatan promosi daerah;
   - Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi

b. Peningkatan kualitas dan produksi industri, usaha mikro dan kecil, serta koperasi, diantaranya :
   - Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan koperasi;
   - Pelatihan dan bantuan modal kerja;
   - Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
   - Fasilitasi bantuan badan hukum dan sertifikasi halal.

c. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, diantaranya :
   - Revitalisasi dan rehabilitas pasar rakyat;
   - Pembangunan pusat pemasaran produk unggulan;
   - Pengembangan pariwisata kota diantaranya pengembangan kawasn wisata Situ Gede;
   - Pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi.

3. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.

Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, melalui :

a. Peningkatan jaminan dan perlindungan sosial, diantaranya :
   - Peningkatan pelayanan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT);
   - Jaminan kesehatan masyarakat miskin (integrasi ke BPJS kesehatan);

- Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bantuan sambungan listrik rumah tangga miskin;
- Pemberdayaan masyarakat miskin, diantaranya peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan pelatihan dan bantuan modal kerja.

b. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, diantaranya :

- Peningkatan kapasitas pencari kerja;
- Pelatihan dan bantuan modal kerja;
- Peningkatan pencetakan wira usaha baru;
- Fasilitasi permodalan usaha.

4. Peningkatan kemantapan dan penyediaan infrastruktur perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peningkatan kemantapan dan penyediaan infrastruktur perkotaan terutama sanitasi permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui :

a. Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat, diantaranya :

- Peningkatan pelayanan persampahan;
- Peningkatan akses terhadap ketersediaan air bersih;
- Peningkatan akses terhadapa pengelolaan air limbah domestik.

b. Peningkatan kualitas permukiman, diantaranya :

- Penataan kawasan kumuh;
- Peningkatan infrastruktur permukiman.

c. Peningkatan infrastruktur konektivitas daerah, diantaranya :

- Lanjutan pembangunan jalan lingkar utara;
- Peningkatan kemantapan jalan.

d. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya :

- Penataan ruang yang lebih proporsional;
- Peningkatan RTH dan ruang publik;
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, melalui :

a. Percepatan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi yaitu Manajemen perubahan, penataan peraturan peundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitasi kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan;
b. Peningkatan sarana prasarana dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, melalui :
   - Pembangunan dan rehabilitasi kantor pemerintahan;
   - Integrasi sistem perencanaand an penganggaran dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)
c. Peningkatan stabilitas ketentramand an ketertiban daerah, diantaranya :
   - Peningkatan sarana dan prasarana PolPP dan Damkar;
   - Peningkatan penegakan peraturan darah.

Penelaahan mendalam terhadap sasaran-sasaran pokok dan isu strategis yang tercantum dalam RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2005-20025 , serta pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya periode 2017-2022 menjadi landasan utama dalam penentuan arah kebijakan kelitbangan Kota Tasikmalaya, yaitu :

1. Penguatan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dengan jaminan mutu hasil kelitbangan;
2. Mendorong kebijakan berbasis kelitbangan dengan meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk perekayasaan maupun evaluasi kebijakan;
3. Penguatan kinerja lembaga kelitbangan dengan mendorong penguatan aspek sumber daya manusia, pembiayaan dan kolaborasi dengan aktor-aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Mendorong pemecahan permasalahan kota melalui inovasi daerah.

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi I Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020

Gambar 3.3
Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi II Bidang Sosial Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020

Gambar 3.4
Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi II Bidang Eonomi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020

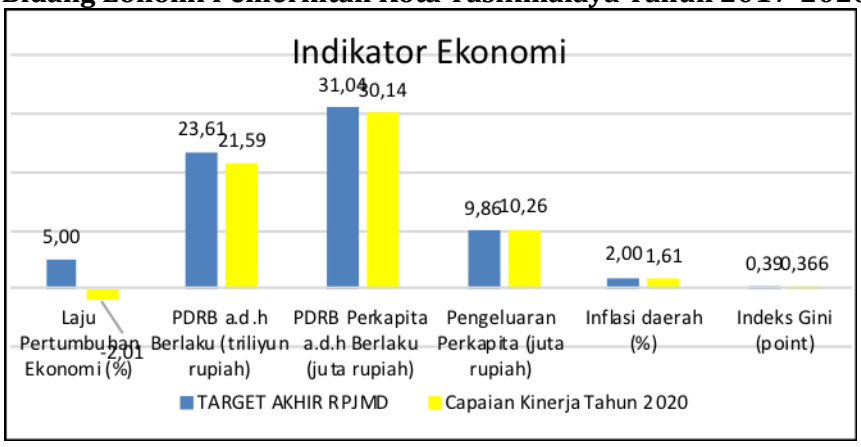

Gambar 3.5
Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi III Bidang Infrastruktur Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020

Gambar 3.6
Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi IV Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020

Kebijakan pertama merupakan landasan awal dukungan kegiatan kelitbangan dalam pencapaian strategi di seluruh misi Pemerintah Kota Tasikmalaya 2022-2025. Hasil penelitian dan pengembangan yang akurat, baik dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Kegiatan kelitbangan terdiri dari tujuh rangkaian yang berkaitan dengan lainnya yaitu :

1. Penelitian;
2. Pengembangan;

3. Pengkajian;
4. Perekayasaan;
5. Penerpana;
6. Pengoperasian; dan
7. Evaluasi kebijakan.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 Berdasarkan Misi V Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020

Keseluruhan rangkaian kegiatan kelitbangan di Kota Tasikmalaya diarahkan pada upaya pemecahan masalah yang dapat mendorong ketepatan rekomendasi untuk strategi dan kebijakan dalam mendukung pembangunan daerah.

Sejalan dengan kebijakan pertama, **arah kebijakan kedua** adalah mendorong agar kebijakan pemerintah daerah dapat berbasis kelitbangan. hasil litbang diarahlan untuk menjadi dasar dalam formulasi dan penerapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Pentingnya peran litbang sesuai dengan konsep manajemen strategis, yaitu peran litbang dalam melakukan pemindaian kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*) dan fungsi kontrol (*controlling*). Dalam kontesk manajemen pembangunan hasil litbang dapat dijadikan *proxy*, model dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambilan kebijakan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan maupun pengawasan pembangunan.

Arah kebijakan ketiga berfokus untuk mempersiapakan kelembagaan kelitbangan menjadi garda terdepan sebagai lembaga dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan ketiga mengenai penguatan kinerja lembaga kelitbangan juga sesuai dengan strategi pencapaian misi yang ada di dalam RPJPD dan RPJMD. Penguatan aspek sumber daya manusia dan pembiayaan.

Arah kebijakan keempat merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pembangunan daerah dengan upaya pemecahan permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya melalui inovasi-inovasi daerah. inovasi daerah diarahkan pada inovasi di bidang tata kelola pemeritahan, bidang pelayanan publik dan inovasi daerah sesuai bidang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan bertujuan untuk menunjang pembangunan di daerah. upaya mendorong inovasi sebagai arah kebijakan keempat diperlukan dalam menciptakan peluang-peluang baru dan pembaharuan dalam mengelola tata pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan strategi kerja di semua misi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Inovasi dalam kelitbangan merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Inovasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Inovasi daerah yang dilakukan untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah, tata kelola sumber daya aparatur, tata kelola pelayanan publik, serta pemecahan masalah pembangunan kota. Kegiatan inovatif dapat memberikan masukan startegis dalam penyusunan kebijakan inovasi daerah yang bersifat holistik-tematik, integratif dan spasial terutama untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. integrasi inovasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran penting untuk menjamin berkelanjutan inovasi daerah.

3.2.2. Strategi Kebijakan Kelitbangan

Berdasarkan pada arah kebijakan kelitbangan, maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah Kota Tasikalaya dapat tercapai. Strategi tersebut adalah :

A. Arah Kebijakan Pertama

"penguatan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dengan jaminan mutu hasil kelitbangan"

Strategi-strategi untuk arah kebijakan pertama adalah :

1. Identifikasi dan pemetaan persoalan serta hambatan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menyusun strategi penyelesaian persoalan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan;
2. Merumuskan tema prioritas serta target output sesuai tujuan dari masing-masing capaian kinerja untuk periode 4 (empat) tahun kedepan sehingga rencana kelitbangan merupakan kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan;
3. Melaksanakan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah;
4. Menetapkan indikator keluaran baku sesuai standar pelaporan kelitbangan bagi seluruh pelaku kelitbangan, baik di lembaga kelitbangan maupun satuan kerja pemerintah daerah lainnya;
5. Mendorong pelibatan publik dalam menguji dan menilai kelitbangan melalui berbagai skema, seperti diseminasi hasil penelitian;
6. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan fasilitas dan hasil kelitbangan.

B. Arah Kebijakan Kedua

"mendorong kebijakan berbasis kelitbangan dengan meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk perekayasa maupun evaluasi kebijakan"

Strategi-strategi untuk arah kebijakan kedua adalah :

1. Merumuskan tema prioritas serta target output sesuai tujuan dari masing-masing capaian kinerja untuk periode 4 (empat) tahun kedepan sehingga rencana kelitbangan merupakan kegaitan yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Menggunakan hasil-hasil pemetaan masalah pasa dokumen-dokumen perencanaan atau kajian merencanakan kegiatan-kegiatan kelitbangan;
3. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang;

4. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Memperluas diseminasi hasil-hasil kelitbangan melalui penyelenggaraan *event* (konferensi, seminar, simposium, *workshop*) atau penggunaan media, baik populer maupun ilmiah.

C. Arah Kebijakan Ketiga

"penguatan kinerja lembaga kelitbangan dengan mendorong penguatan aspek sumber daya manusia, pembiayaan dan kolaborasi dengan aktor-aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta"

Strategi-strategi untuk arah kebijakan ketiga adalah :

1. Penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan yang produktif, berkompeten dan handal melalui pendidikan, pelatihan, studi komparasi, magang, keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah (seminar, konferensi) dan publikasi di jurnal;
3. Peningkatan kualitas dan sinergitas program kelitbangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
4. Memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan isntansi terkait di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun institusi/lembaga kelitbangan lain sehingga kelitbangan dapat bersinergi satu dengan lainnya.

D. Arah Kebijakan Keempat

"Mendorong pemecahan permasalahan kota melalui inovasi daerah"

Strategi-strategi untuk arah kebijakan keempat adalah :

1. Pembinaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya inovasi di daerah dan memperkuat pilar-pilar kreativitas dan inovasi di tingkat daerah;
2. Membangun dan mengimplementasikan kebijakan serta program inovasi di daerah yang bersumber dari hasil intenvensi dan difusi;

3. Mendorong penyusunan regulasi-regulasi daerah yang mendukung penumbuhkembangan iklim inovasi di masyarakat;
4. Mendorong pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah;
5. Mempublikasikan inovasi-inovasi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan apresiasi dan ketertarikan kepada kelitbangan daerah;
6. Mendorong pemanfaatan inovasi masyarakat dan swasta untuk penyelesaian permasalahan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya.

3.3. Indikasi Program

Penentuan program prioritas kelitbangan daerah disusun dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan sebagai dasar pengelompokkan program-program prioritas kelitbangan sesuai Permendagri No.17 Tahun 2016 yaitu :

1. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Sosial dan kemasyarakatan;
3. Ekonomi dan pembangunan daerah;dan
4. Inovasi dan pengembangan IPTEK.

Permasalahan dan isu strategis dalam RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025 perlu disesuaikan dengan target dan pencapaian pemerintah Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2015-2020 dan perlu melihat RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2020. Hal tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan prioritas program dan pembangunan Kota Tasikmalaya 2022-2025. Selain itu dilakukan kajian terkait dengan kondisi eksisting dalam pelaksanaan tema pembangunan prioritas sebagai pencapaian pembangunan Kota Tasikmalaya dan upaya penyelesaian masalah global, dalam hal ini adalah mengaki pencapaian target *sustainable development goals* di Kota Tasikmalaya.

Program dan capaian prioritas pembangunan menjadi landasan penentuan program dan kebijakan strategi bidang kelitbangan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi sebagai jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka diperoleh permasalahan dan target yang perlu dikaji melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah dalam 4 (empat) tahun kedepan yaitu :

1. Kebutuhan akan penyediaan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam menjawab isu aspek fisik di Kota Tasikmalaya;
2. Permasalahan sosial kemasyarakatan yang berpengaruh dalam pencapaian target peningkatan ketentraman, kenyaman dan taraf hidup masyarakat;
3. Kebutuhan penciptaan birokrasi yang modern;
4. Mendorong peningkatan perekonomian kota, pengentesan kemiskinan dan upaya mengurangi kesenjangan;
5. Perlunya pemerataan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
6. Perlu adanya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, akses seluruh lapisan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan penyelesaian persoalan kesehatan melalui program yang terintegrasi;
7. Kebutuhan sinergutas dan koordinasi pembangunan untuk meningkatakan aktivitas pertukaran informasi, teknologi, perdagangan dan jasa serta upaya pemecahan persoalan kewilayahan;
8. Pemberdayaan sumber daya manusia dalam bidang industri dan UMKM;
9. Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi lainnya dalam penyelesaian permasalahan pembangunan.

Didalam menentukan indikasi program/ program prioritas dilakukan wawancara dengan perangkat daerah di Kota Tasikmalaya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Kajian yang Sudah dan Belum Dilaksanakan OPD Terkait

No	Nama Instansi	Program yang ada	Kajian yang sudah dilakukan	Program/Kajian yang belum dilakukan
1	Badan Pendapatan Daerah	Program tahun 2017-2020 : a. Program Peningkatan Pelayanan Publik b. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan e. Program Perencanaan Kerja f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 sd 2022 terdiri dari 2 Program : a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Kajian Pembentukan Zona Nilai Tanah b. Kajian Kebijakan Teknis pada kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Dinas Kesehatan	a. Penurunan angka kematian anak; b. Peningkatan kesehatan ibu; c. Pencegahan dan penanggulanga penyakit menular (P2PM).	a. program P2PM khususnya indikator pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi HIV telah mencapai target. b. Puskesmas terakreditasi 100% pada tahun 2019 c. Dukungan SDM: secara kuantitas sudah terpenuhi dan secara kualitas dilakukan pelatihan serta pembinaan	a. Penurunan angka kematian anak: program ini mengalami fluktuasi dan relatif tinggi khususnya angka kematian bayi. b. Peningkatan kesehatan ibu: Terkait pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan hampir seluruhnya mendapatkan pelayanan sesuai

No	Nama Instansi	Program yang ada	Kajian yang sudah dilakukan	Program/Kajian yang belum dilakukan
			secara terus menerus. d. Pengadaan obat esensial e. Diluncurkannya sistem rujukan SPGDT (sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dengan call centre 119.	standar. Namun jika dilihat indikator angka kematian ibu, masih cukup tinggi. c. Peningkatan cakupan SPM d. Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata	a. Program Tasik Berbudaya : • Program pengembangan kebudayaan • Program pengembangan kesenian tradisional • Program pembinaan sejarah • Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya b. Program peningkatan kapasitas ekonomi daerah : • Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Program pemasaran pariwisata • Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif c. Program pencetakan wirausaha baru : • Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif d. Program Tasik muda berprestasi : • Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaaan; • Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan; • Program penunjang urusan pemrintah daerah kabupaten/kota	Rencana induk pengembangan pariwisata daerah	Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektir pariwisata yang berkembang di wilayah priangan timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningatan torism attractiveness yang khas serta mamoy menumbuhkan sendi-sendi kehiudpan bermasyarakat yang lebih baik dan maju. Kajian yang belum dilaksanakan : a. Kajian situs cagar budaya di Kota Tasikmalaya sebagai bahan landasan peningkatan status menjadi Bnda Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya) ; b. Kajian dokumen pengembangan pada objek daya tarik wisata, olahraga dan budaya seperti DED, Masterplan dan kajian lainnya.
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda); b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;	Kajian RDTR dan RTRW	a. Program Penyelenggaraan Jalan; b. Program Penataan Bangunan Gedung. c. Kajian Data Drainase terintegrasi ;

No	Nama Instansi	Program yang ada	Kajian yang sudah dilakukan	Program/Kajian yang belum dilakukan
		c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional; d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah; e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase; f. Program Pengembangan Permukiman; g. Program Penataan Bangunan Gedung; h. Program Penyelenggaraan Jalan; i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi; j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; k. Program Penatagunaan Tanah; l. Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah.		d. Kajian tentang Data Gedung dan Aset Contohnya Tower yang merupakan sumber PAD Kota Tasikmalaya
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik b. Program Aplikasi Informatika c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dari 4 program urusan yang dilaksanakan oleh Diskominfo semua capaian belum terselaikan namun dalam tahap pelaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kajian yang sudah dilakukan Dokumen Master Plan *Smart City* dan Perancangan *Enterprice Architecture* Tasikmalaya Smart City	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Kajian yang harus ada yaitu : Kajian Akademis/Perencanaan Road Map/Master Plan SPBE(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
6	Dinas Lingkungan Hidup	**1) PROGRAM GEMA MANASIK (GERAKAN BERSAMA MENATA KOTA TASIKMALAYA)** Menangani permasalahan dan meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman, meliputi peningkatan kualitas dekorasi dan taman kota dan penyediaan pemakaman. a. Program Pengelolaan Keanekaragaman	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); 2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 3. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup; 4. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan	• Program perencanaan lingkungan hidup; • Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI); • Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;

No	Nama Instansi	Program yang ada	Kajian yang sudah dilakukan	Program/Kajian yang belum dilakukan
		Hayati (KEHATI) **2) PROGRAM TASIK RESIK** Penambahan ruang publik atau ruang terbuka hijau sebagai upaya untuk perlindungan kualitas air, kualitas udara, dan iklim mikro di Kota Tasikmalaya, serta terpeliharanya kebersihan di Kota Tasikmalaya. a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat; f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan **3)** Program Pengelolaan Persampahan **PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DAN APARATUR** Peningkatan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sistem akuntabilitas kinerja daerah, serta peningkatan profesionalisme aparatur. • Program Penunjang Urusan	lingkungan hidup (PPLH); 5. Program pengelolaan persampahan; 6. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kajian yang sudah dilakukan : • Kajian Lingkungan Hidup Strategis • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	• Program penghargaan lingkungan hiudp untuk masyarakat; Kajian yang harus ada yaitu : • Kajian Lingkungan Hidup Strategis • Kajian Induk Persampahan • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) • Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) • Kajian Retribusi Sampah

No	Nama Instansi	Program yang ada	Kajian yang sudah dilakukan	Program/Kajian yang belum dilakukan
		Pemerintah Daerah.		
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah b. Program Pengembangan Perumahan c. Program Kawasan Permukiman d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Kajian yang sudah dilakukan : Kajian terkait potensi unggulan pendukung revitalisasi kawasan kumuh di kecamatan indhiang.	a. Serah terima perumahan 38 perumahan b. Verifikasi perumahan 61 perumahan c. Penanganan kawasan kumuh seluas 276,17 Ha. d. Belum ada pendataan rumah Kajian yang harus ada a. Kajian tekait Kawasan Kumuh, Dokumen RP2KPKPK b. Dokumen RP3KP c. Perda kumuh d. Perda KPK
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pada dokumen RPJPD Kota Tasikmalaya tidak mencantumkan program yang harus dilaksanakan beserta targetnya	Kajian yang sudah dilaksanakan a. Kajian Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (sebagai bahan penyusunan Perda LP2B); b. Kajian Penyusunan Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Neraca Bahan Makanan (NBM) (dilaksanakan setiap tahun);	Kajian yang harus ada a. Kajian Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (sebagai bahan penyusunan Perda LP2B); b. Kajian Penyusunan Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Neraca Bahan Makanan (NBM) (dilaksanakan setiap tahun); c. Kajian Perwilayahanan Komoditas Pertanian; d. Kajian Perwilayahan Komoditas Perikanan; e. Kajian Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kota Tasikmalaya
9	BPKAD	1. Program pengelolaan keuangan daerah; 2. Program pengelolaan barang milik daerah.	a. Program pengelolaan keuangan daerah; b. Program pengelolaan barang milik daerah.	a. Program pengelolaan barang milik daerah untuk kegiatan pengamanan aset daerah; b. Rasio kemampuan keuangan daerah;
10	Badan Kesatuan Bangsa dan	Program penguatan ideologi Pancasila dan	Sudah dilaksanakan tapi belum optimal	Program terkait kajian tentang indeks

No	Nama Instansi	Program yang ada	Kajian yang sudah dilakukan	Program/Kajian yang belum dilakukan
	Politik	katakter kebangsaan		wawasan kebangsaan
11	BPBD	1. Program penanggulangan bencana 2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	a. Program Penanggulangan Bencana; b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran c. *(Program tersebut baru berjalan pada tahun 2021 yang mana progresnya masih dalam tahapan pelaksanaan, yang tentu saja memerlukan evaluasi yang menyeluruh)*	a. Program Penanggulangan Bencana; b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kajian yang harus ada di dalam Rebstra/RKPD/Renja : a. Analisis Risiko Bencana; b. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2021

A. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik perlu diakomodasi dalam program prioritas kelitbangan di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Isu strategis tersebut adalah :

- Pelayanan fasilitas pendidikan yang belum merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- Perlunya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, akses seluruh lapisan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan penyelesaian persoalan kesehatan melalui program yang terintegrasi; dan
- Kebutuhan birokrasi yang modern.

1. Isu-isu Pokok

   Isu-isu pokok yang menjadi permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi :

   a. Perlunya pemerataan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

      Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Angka pendidikan di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya sebesar 8,51 persen meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 mencapai 9,13 persen. Pertumbuhan ini merupakan salah satu modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kota Tasikmalaya.

      Di Kota Tasikmalaya perkembangan fasilitas pendidikan di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah SD meningkat dari 282 pada tahun 2015 menjadi 282 pada tahun 2019, sedangkan untuk SLTP dari 112 pada tahun 2015 menjadi 130 pada tahun 2019.

      Pemerataan pelayanan dan fasilitas pendidikan di Kota Tasikmalaya sangat penting untuk menjamin seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Perlu adanya evaluasi kebijakan pendidikan yang telah dilakukan selama ini untuk mengetahui pencapaian target dan persoalan yang dihadapi.

Evaluasi penting untuk menjadi masukan bagi pengambil keputusan yang terkait di Bidang Pendidikan.

b. Perlu adanya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, akses seluruh lapisan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan penyelesaian persoalan kesehatan melalui program yang terintergasi

c. Kebutuhan menciptakan birokrasi yang modern

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas layanan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan. Birokrasi yang modern mengacu pada penataan pusat data pemerintah yang terintegrasi, peningkatan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi, dan perwujudan jaminan sosial yang memadai dan setara bagi pegawai pemerintah.

Penataan pusat data pemerintahan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkelanjutan. Pusat data pemerintahan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran sehingga kegiatan pemerintahan Kota Tasikmalaya bisa efektif dan efisien. Pusat data yang mendukung juga dapat membantu mendorong inovasi daerah dengan pemanfaatan data yang aktual.

Dalam birokrasi yang dituntut untuk memiliki mutu pelayanan publik yang berkualitas, dibutuhkan juga dukungan dalam hal pemanfaatan teknologi terkini. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan tenaga ahli dibidang teknologi maupun swasta yang telah terlebih dahulu menerapkan pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk pengelolaan keunagan dan aset daerah di bidang perizinan. Dalam bidang perizinan pemanfaatan teknologi terpadu perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai Pelayanan Perizinan Terpadu (*online single submission*)

Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia,Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tasikmalaya memerlukan peningkatan kapasitas yang terus menerus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pembinaan ASN disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing dinas yang ada di Kota Tasikmalaya. Metode pembinaan bagi ASN juga perlu mengikuti perkembangan dalam bidang manajemen sumberdaya agar pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan dapat mendorong optimalnya tugas dan fungsi ASN

dalam hal pelayanan publik. Optimlaisasi tugas dan fungsi ASN perlu dilakukan dengan kajian mengenai analisis beban kerja, kesesuaian penentuan golonngan dan penempatan ASN sesuai dengan bidang keahliannya.

Di sisi lain, perlu adanya jaminan sosial yang memadai bagi ASN sebagai bagian dari upaya mengingkatkan kinerja ASN. Jaminan-jaminan sosial tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan perlindungan bagi pemerintah dan berbagai insentif lain yang dapat menunjang kinerja ASN.

Tabel 3.4
Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
Bidang informasi dan komunikasi				
Program Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik	Kebijakan di bidang komunikasi dan informasi	Penyusunan bahan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi *e-government*	2022-2023	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Terlaksananya monev persandian dan telekomunikasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan persandian dan telekomunikasi	2022-2023	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kajian akademis/perencanaan Road Map/Masterplan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik)	Program informasi dan komunikasi publik	2023	Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Perizinan				
Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat	Kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap PTSP	2022-2023	Dinas Penanaman Modal dan pelaynana Terpadu Satu Pintu
		Sosialisasi program peningkatan pelayanan perizinan dan non	2022-2023	Dinas Penanaman Modal dan

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
		perizinana		pelayanana Terpadu Satu Pintu
Bidang Litbang				
Standar pelayanan minimal pembangunan	Tersusunnya kajian pelaksanaan standard pelayanan minimal (SPM)	Kajian pelaksanaan standard pelayanan minimal (SPM)	2022	Bappelitbangda
	Evaluasi penerapan *e-government* dalam pembangunan	Kajian evaluasi penerapan *e-government* dalam pembangunan	2022-2023	Bappelitbangda
Bidang Pendidikan				
Strategi pemenuhan standar nasional pendidikan di Kota Tasikmalaya	Diketahui kebutuhan penemuhan standar nasional pendidikan melalui analisis kesenjangan dan strategi-strategi yang bersifat operasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut	Evaluasi kepuasan pelayanan infrastruktur dan proses pembelajaran di lingkungan pendidikan	2022	Dinas Pendidikan
		Pemerataa akses dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	2022-2023	Dinas Pendidikan
		Strategi pembinaan dan pengembangan pendidikan	2022-2025	Dinas Pendidikan
		Pemerataan distribusi dan kualitas tenaga pengajar	2022-2025	Dinas Pendidikan
		Pemerataan sekolah sesuai kebutuhan di setiap kecamatan	2022-2025	Dinas Pendidikan
		Evaluasi kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya di bidang pendidikan	2022-2025	Dinas Pendidikan
Bidang Kesehatan				
Strategi pemenuhan standar nasional kesehatan di Kota Tasikmalaya	Diketahui kebutuhan penemuhan standar nasional kesehatan melalui analisis kesenjangan dan strategi-strategi yang bersifat operasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut	Evaluasi kepuasan pelayanan infrastruktur dan proses pembelajaran di lingkungan kesehatan	2022-2025	Dinas Kesehatan
		Peningkatan kesehatan ibu hamil dan melahirkan	2022-2025	Dinas Kesehatan
		Program penurunan stunting	2002-2023	Dinas Kesehatan
		Peningkatan cakupan SPM	2022	Dinas Kesehatan
		Strategi pencapaian standarisasi pelayanan kesehatan	2022-2025	Dinas Kesehatan
		Tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	2022-2025	Dinas Kesehatan

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
		Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik	2022-2025	Dinas Kesehatan
Bidang Penciptaan Birokrasi yang Modern				
Pencapaian tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien dan melayani	Adanya rekomendasi uji coba dan penerapan upaya-upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik	Pengintegrasian dan pemanfaatan data serta inovasi bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui sistem jaringan arsip daerah dan digitalisasi dokumen/arsip daerah	2023	Dinas Komunihkasi dan informasi dan/atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan/atau Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Penataan pusat data pemerintahan dan terintegrasi	2023	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Apalikasi pusat pelayanan perizinan terpadu untuk meningkatan pelayanan publik	2022-2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Perwujudan kesetaraan jaminan sosial yang memadai bagi ASN di Kota Tasikmalaya	2022-2023	Badan kepegawaian
		Analisis beban kerja, penentuan golongan dan manajemen sumber daya pegawai pemerintahan di Kota Tasikmalaya	2023	Badan Kepegawaian
		Pengelolaan dan pembinaan pegawai pemerintahan untuk menunjang kinerja pemerintah Kota Tasikmalaya	2022-2024	Badan Kepegawaian
		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesadaran ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya	2022-2025	Badan Kepegawaian

B. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang sosial dan kemasyarakatan perlu diakomodasi dalam program prioritas kelitbangan di bidang sosial dan kemasyarakatan. Isu pokok tersebut adalah permasalahan terkait dengan upaya peningkatan ketentraman, kenyamanan dan taraf hidup masyarakat.

1. Isu Pokok

   Isu pokok dalam bidang sosial dan kemasyarakatan terkait dengan peningkatan ketentraman, kenyamanan dan taraf hidup masyarakat di Kota Tasikmalaya. Komponen utama yang perlu didorong dalam peningkatan kondisi hidup masyarakat adalah melalui keterlibatan masyarakat, niat baik, serta atribut-atribut sosial lain. Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan menggerakan kebersamaan, ide, kesalingpercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Keterlibatam dam hubungan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat masyarakat modern.

   Urgensi memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidupnya terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekeuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip yang disepakati. Meningkatnya ketentraman, kerukunan dan kenyaman hidup masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan daerah yang dihubungkan dengan upaya untuk membangun masyarakat humanis dan agamis menjadi tuntutan yang mudah diwujudkan apabila Kota Tasikmalaya memiliki kekuatan sosial yang memadai sebagai basis pembangunan di segala bidang.

   Dampak dari permasalahan sosial kemasyarakatan yang dihadapi di Kota Tasikmalaya adalah naiknya tingkat kriminalitas sebagai dampak dari berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan dan faktor lainnya.

   Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penguatan ketahanan keluarga sebagai basis individu. Selain itu, perlu dilakukan kajian mengenai pentingnya

pemberdayaan perempuan dan upaya mensejahterakan lansia untuk mengetahui kebijakan dan program yang tepat sasaran.

Disisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya. Masyarakat didorong untuk aktof berpartisipasi dalam pembangunan dan memiliki fungsi sebagai subjek yang berkolaborasi bersama dengan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 3.5
Program Prioritas Bidang Sosial Kemasyarakatan

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
Sosial Kemasyarakatan				
Meningkatnya ketentraman, kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat	Strategi dan rekomendasi kebijakan dalam upaya meningkatkan ketentraman, kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat	Penyakit masyarakat, kriminalitas dan pelanggaran K3	2023-2025	Dinas sosial
		Perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2024	Dinas sosial
		Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	2023	Dinas sosial
		Strategi peningkatan program pelayanan terpadu kemiskinan	2022-2025	Dinas sosial
Kemajuan kebudayaan sebagai dasar pencapaian masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari, secara ekonomi dan keperibdian	Program Tasik Berbudaya	Program pengembangan kebudayaan di Kota Tasikmalaya	2023	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
		Program pengembangan kesenian tradisional	2022-2025	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
		Program pembinaan	2022-2025	Dinas

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
dalam kebudayaan		sejarah		kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2023	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
	Program peningkatan kapasitas ekonomi daerah	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	2022-2023	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
		Program pemasaran pariwisata	2023-2024	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreaif	2023-2025	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
	Program pencetakan wirausaha	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	2022-2025	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
	Program Tasik muda berprestasi	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2023	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2023	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
		Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	2023	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
	Pengembangan budaya gotong	Meningkatnya pelaksanaan aktivitas	2022-2025	Dinas

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
	royong	masyarakat berbasis budaya gtong royong dan keswadayaan		kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
	Pembangunan kebudayaan	Peningkatan budaya membaca masyarakat Kota Tasikmalaya	2022-2025	Dinas perpustakaan dan arsip daerah
Peningkatan ketahanan keluarga sebagai bekal peran aktif dalam pembangunan	Meningkatkan potensi setiap individu dalam keluarga, peran perempuan dan lansia di berbagai bidang untuk menunjang kegiatan pembangunan	Identifikasi tingkat ketahanan keluarga	2024	Dinas pengendalian penduduk, keleuarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi lansia	2024	Dinas pengendalian penduduk, keleuarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	2022-2025	Dinas pengendalian penduduk, keleuarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

C. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Berdasarkan penelaahan permasalahan dan isu strategis, isu-isu pokok yang perlu di akomodir dalam program prioritas kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan daerah adalah

- Mendorong peningkatan perekonomian kota, pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi kesenjangan;
- Kebutuhan akan penyediaan insfrastruktur kota untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam menjawab persoalan keterbatasan daya dukung dan daya tampung kota;
- Kebutuhan sinergitas dan koordinasi pembangunan untuk meningkatan aktivitas pertukaran informasi, teknologi, perdagangan dan jasa serta upaya pemecahan persoalan kewilayahan.

1. Isu- isu pokok
   - Mendorong peningkatan ekonomi kota, pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi ketimpangan

     Pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh perkembangan struktur ekonomi di Kota Tasikmalaya yang didukung oleh sektor primer seperti pertanian, sektor sekunder seperti industri dan pengolahan dan sektor tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran, penangkutan dan komunikasi, dan keuangan.

     Potensi ekonomi di Kota Tasikmalaya di dominasi oleh kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi dan industri pengolahan.

     Peemrintah juga perlu memiliki komitmen dalam mendukung daya saing produk, khususnya yang diproduksi oleh UMKM dan sektor-sektor informal. UMKM merupakan bagian penting yang menggerakan roda perekonomian, penanganan dan kebijakan yang tepat dapat mengatasi kesenjangan dan pengentasan kemiskinan. Komitmen dalam mendukung UMKM dan sektor-sektor informal juga dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi sentra-sentra perdaganagn dan industri UMKM yang telah ada.
   - Kebutuhan akan penyediaan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam menjawab persoalan keterbatasan daya dukung dan daya tampung kota

     Insfrastruktur yang memadai merupakan modal utama dalam perkembangan perekonomian di suatu kota. Insfrastruktur yang memadai secara langsung akan

mendorong kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan insfrastruktur yang memadai merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Kota Tasikmalaya memiliki permasalahan di bidang insfrastruktur di antaranya :

1) Listrik

Isu atau persoalan kelistrikan di Kota Tasikmalaya adalah:

- pemadaman listrik akibat kelebihan beban dan kurangnya pasokan daya listrik.
- pemasangan instalasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan penduduk
- Pertumbuhan kebutuhan akan listrik yang kurang terencana membuat pemasangan instalasi menjadi tumpang tindih sehingga pembebanan listrik menjadi tidak teratur.

2) Telekomunikasi

Isu yang terkait dengan telekomunikasi di Kota Tasikmalaya adalah:

- penyusunan database terkait dengan pemerintah dan data-data spasial dan non spasial pembangunan belum dapat diakses penuh oleh masyarakat.
- perkembangan jaringan telepon seluler berimplikasi pada kebutuhan menara BTS dan micro cell yang penempatannya dapat mengganggu esterika kota.
- Pengembangan sistem ducting terpadu untuk jalur telekomunikasi dengan jalur lainnya masih terkendala pendanaan serta tumpang tindih lahan dengan sektor lain yang sama-sama menggunakan sistem *ducting*.

3) Air bersih

Isu dan persoalan terkait dengan air bersih adalah sebagai berikut:

- cakupan wilayah pelayanan air bersih yang terbatas dan kuantitas debit air yang rendah.
- masyarakat di beberapa wilayah Kota Tasikmalaya sering mengalami kesulitan air dikarenakan air hanya mengalir pada jam – jam tertentu (bergilir).

- kurangnya regulasi dalam upaya konservasi sumber air bersih, masalah kelembagaan dan kerjasama antardaerah dalam mengelola sumber-sumber air juga menjadi isu utama.

4) Drainase

Isu dan persoalan terkait dengan drainase adalah ketersediaannya dan kedalaman saluran yang belum memenuhi standar pelayanan minimum (SPM), serta pembangunan fisik yang berjalan tidak seimbang dengan pertambahan prasarana drainase. Berdasarkan data Strategi Sanitasi Kota dapat diketahui bahwa permasalahan drainase merliputi:

- Saluran drainase yang dibangun belum sistematis;
- Kota Tasikmalaya memiliki saluran irigasi yang menjadi bagian dari sistem irigasi kota/kabupaten Tasikmalaya dan melewati wilayah kota, dan saat ini umumnya dimanfaatkan sebagai saluran drainase;
- Kapasitas sungai/saluran irigasi yang berfungsi sebagai penerima limpasan air hujan sudah tidak memadai, sehingga terjadi genangan air saat musim hujan;
- Adanya kewenangan yang tumpang tindih antara OPD teknis dalam hal penanganan drainase.

5) Persampahan

Isu dan persoalan terkait persampahan di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- Fasilitas penampungan tempat sementara masih rendah, karena belum ditemukannya lahan yang tepat untuk pembuatan TPS.
- Fasilitas pengumpulan masih rendah, sama halnya dengan TPS belum menemukannya lahan yang tepat untuk fasilitasi tempat pengumpulan.
- Pewadahan belum terpisah antara organik dan anorganik, serta kepemilikan pewadahan juga masih rendah.
- Pengangkutan terkait jalur rotasi, armada, serta jadwal yang masih belum teratur dan terjadwal dengan baik.

- Tempat Pembuangan Akhir masih terbatas pada sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, dan organisasi tata kelola di lokasi TPA Ciangir.
- Pengolahan sampah terkendala minimnya teknologi pengolahan, pemasaran hasil pengolahan, serta fasilitasi TPST yang masih rendah. Isu lainnya adalah mengenai teknologi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yang membutuhkan upaya khusus mengedukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat.

6) Air Limbah

Isu dan persoalan terkait air limbah Kota Tasikmalaya adalah mengenai saluran air limbah yang masih bersatu dengan drainase baik untuk kegiatan permukiman ataupun komersil, serta belum adanya IPAL dalam mengelola air limbah Kota Tasikmalaya. Khususnya untuk kegiatan komersil diperlukan pengelolaan terlebih dahulu sebelum akhirnya dibuang pada saluran air limbah perkotaan.

Berdasarkan data Strategi Sanitasi Kota terdapat beberapa permasalahan air limbah:

- Secara *on site system*, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan limbah rumah tangganya. Hal ini terlihat dari kepemilikan tangki septik di Kota Tasikmalaya masih rendah serta jumlah armada sedot tinja yang masih terbatas.
- Secara *off site system*, Kota Tasikmalaya sama sekali belum memiliki sistem off site system.
- IPLT di Kota Tasikmalaya tidak beroperasi akibat volume tinja tidak cukup.

- Sinergitas pembangunan untuk meningkatkan aktivitas pertukaran inforassi, teknologi, perdagangan dan jasa, serta upaya pemecahan persoalan kewilyahan.

  Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan suatu daerah juga bergantung pada daerah lainnya, khususnya untuk wilayah yang berdekatan. Selain permasalahan yang perlu diselesaikan secara internal di dalam Pemerintahan Kota Tasikmalaya, diperlukan juga integrasi dan kerjsama antarwilayah untuk penyelesaian persoalan lintas wilayah, seperti penyediaan sumber ddaya air, jalur produksi

penyediaan pangan, permasalahan kemacetan dan lain-lain. Kerjasama antar daerah dapat menjadi alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai regulsi (perturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan. Kerjasama antardaerah tidak hanya antar daerah secara horizontal, namun juga perlu dilakukan optimaliksasi kerjasama daerah secara vertikal.

Tabel 3.6
Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembanguna Daerah

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
Peningkatan ekonomi kota, pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi ketimpangan				
Penurunan tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya	Menurunnnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Kota Tasikmalaya	Pemberdayaan masyarakat miskin	2022-2025	Dinas Sosial
		Pengelolaan data kemiskinan terpadu	2023	Dinas Sosial
		Pelayanan terpadu kemiskinan	2024	Dinas Sosial
Pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan massyarakat dalam menggerakan perekonomian di Kota Tasikmalaya	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pemberi kerja	2022	Dinas Tenaga Kerja
		Pengembangan potensi tenaga kerja disabilitas dan upaya mendorong penciptaan lapangan kerja layak bagi tenaga kerja disabilitas .	2022-2023	Dinas Tenaga Kerja
		Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	2023	Dinas Tenaga Kerja

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
		Jaminan kerja dan kesejahteraan bagi tenaga kerja informal	2024	Dinas Tenaga Kerja
		Pemberdayaan tepat sesuai sasaran sesuai kebutuhan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2022-2025	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan potensi wirausaha muda sebagai penyedia lapangan pekerjaan	2023	Dinas Tenaga Kerja
		Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi di bidang industri dan pariwisata	2023-2025	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas kepemudaan, olahraga,kebudayaan dan pariwisata
		Identifikasi potensi dan permanfaatan media sosial sebagai *platform* pengembangan usaha	2022-2025	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penaganan konflik yang bersumber dari bidang ekonomi	Data ekonomi dan potensi konfil bidang ekonomi	Pemetaan ekonomi kewilayahaan di Kota Tasikmalaya	2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Optimalisasi dan peningkatan pendapatan ekonomi	Identifikasi alternatif pembiayaan dan optimalisasi penerimaan daerah	Optimalisasi peran Badan Usaha Milik daerah di Kota Tasikmalaya	2023	Badan Pendapatan Daerah
	Landasan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan	Perhitungan neraca satelit pariwisata	2023	Dinas kepemudaan, olahraga,kebudayaan dan pariwisata
		Pengembangan sektor pariwisata	2022	Dinas kepemudaan, olahraga,kebudayaan dan pariwisata
	Dasar pengambilan kebijakan untuk pengembangan ekonomi kreatif	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perkembangan perekonomian Kota Tasikmalaya	2023	Dinas kepemudaan, olahraga,kebudayaan dan pariwisata
		Penguatan usaha kreatif	2024	Dinas kepemudaan, olahraga,kebudayaan

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
				dan pariwisata
	Sektor industri yang berdaya saing tinggi	Identifikasi kebutuhan sentra industri	2023	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Identifikasi sektor industri unggulan untuk ketepatan inventasi sektor industri	2024	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan sentra-sentra industri potensial	2024	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan UMKM	2023	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Pembinaan UMKM	2024	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Kajian terkait kemitraan perusahaan	2024	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam menjawab persoalan keterbatasan daya dukung dan daya tampung kota				
Terwujudnya tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Optimalisasi pembangunan kota layak huni dan segi tata ruang, lingkungan hidup dan infrastruktur	Identifikasi infrastruktur penunjang dan rekomendasi untuk penanganan bencana alam	2023	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
		Identifikasi permasalahan sanitasi dan rekomendasi penyelesaian masalah sanitasi berbasis masyarakat	2023-2024	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
	Rekomendasi peningkatan dan perbaikan dalam pencapaian	Analisis ketersediaan dan kebutuhan air bersih	2023	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang Dinas lingkugan

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
	lingkungan hidup yang berkelanjutan			hidup PDAM
		Penyusunan rencana induk penyediaan air minum	2023-2025	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang Dinas lingkugan hidup PDAM
		Pemanfaatan sumber-sumber mata air di Kota Tasikmalaya	2023-2025	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
		Upaya perlindungan dan konservasi tanah dan air	2023-2024	Dinas lingkugan hidup
		Optimalisasi layanan sampah perkotaan dengan pengembangan pengelolaan sistem persampahan yang terintegrasi	2023	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang Dinas lingkugan hidup
		Optimalisasi upaya peningkatan ruang terbuka hijau	2023-2025	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang Dinas perumahan dan kawasan permukiman
Perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman layak huni	Penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh warga di Kota Tasikmalaya	Integrasi penataan kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat	2023-2024	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
		Pendataan rumah	2022	Dinas perumahan dan kawasan permukiman
		Kajian perumahan/permukiman kumuh	2022	Dinas perumahan dan kawasan permukiman

D. Program Prtiorotas Kelitbangan Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

Bidang inovasi dan IPTEK merupakan bagian tidak terpisahkan dari program prioritas lainnya. Bidang inovasi dan IPTEK menjadi bagian dalam pemanfaatan teknologi dan metoda-metoda baru untuk pencapaian target-target pembangunan yang dapat menjawab keseluruhan isu-isu strategis yang muncul. Dalam program prioritas kelitbangan di tahun 2022-2025, program prioritas yang etrkait dengan Bidang Inovasi

dan IPTEK meliputi pemanfaatan teknologi dan inovasi lainnya dalam penyelesaian permasalahan pembangunan.

1. Isu-isu Pokok
   - Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelesaian permasalahan pembangunan
   - Upaya sinergitas pembiayaan pembangunan melalui kerjasama antar stakeholder
   - Pemenuhan teknologi tepat untuk kegiatan UMKM
   - Pemenuhan teknologi tepat guna pertanian

Tabel 3.7
Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelesaian permasalahan pembangunan				
Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam program dan tata laksanakan pemerintahan	Landasan program inovasi di Bidang Pendidikan	Inovasi pendidikan dalam peningkatan pelayanan bidang pendidikan	2023	Dinas Pendidikan
	Landasan program dan inovasi di bidang data kependudukan	Pemanfaatan teknologi dalam pendayagunaan data kependudukan	2023	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Landasan program dan inovasi bidang kesehatan	Inovasi kesehatan dalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan	2023	Dinas Kesehatan
	Pemanfaatan teknologi yang terintegrasi di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya	Evaluasi pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan di Kota Tasikmalaya	2024	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Identifikasi teknologi tepat guna bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya	2024	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Pemanfaatan teknologi daalam peningkatan transparasi, partisipasi publij dan akuntabilitas di Kota Tasikmalaya	2024	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Pemanfaatan teknologi digital dalam	Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dan distribusi usaha kecil	2025	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Tema	Keluaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
	pembangunan Kota Tasikmalaya secara keseluruhan	dan menengah di Kota Tasikmalaya		Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pemenuhan teknologi tepat guna pertanian				
Pemenuhan teknologi tepat guna pertanian	Rekomendasi, Kajian dan Penerapan	Meningkatkan kajian dan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna pertanian	2022	Dinas Ketahanan Pagan, Pertanian dan Perikanan
Pengembangan bibit unggul di pertanian dan perikanan	Rekomendasi, Kajian dan Penerapan	Meningkatkan kajian dan kerjasama pengembangan bibit unggul	2023	Dinas Ketahanan Pagan, Pertanian dan Perikanan
Inovasi Kerjasama Pembiayaan				
Kerjasama dan koordinasi seluruh pihak dalam pembiayaan pembangunan di Kota Tasikmalaya	Pelibatan seluruh sektor dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya	Sinergitas pembiayaan pembangunan yang efektif dan efisein	2022-2025	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu

Bab 4
Strategi Pelaksanaan Kelitbangan

4.1. Kelembagaan

4.1.1.Koordinasi Pelaksanaan

Kelembagaan kelitbangan secara garis besar terdiri dari koordinasi pelaksanaan dan kelitbangan institusi kelitbangan dalam kegiatan. Sesuai amanat dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 37 tentang pengorganisasian kelitbangan di Kabupaten/kota, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengorganisasian kelitbangan di kota terdiri atas majelis pertimbangan, tim pengendali mutu dan tim kelitbangan.

1. Majelis Pertimbangan (MP)

   Majelis pertimbangan beranggotakan Walikota, pejabat tinggi pratama, administrator dan tenaga ahli/pakat/praktisi.

   Majelis pertimbangan mempunyai tugas :

   a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
   b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan;dan
   c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

   Majelis pertimbangan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

2. Tim Pengendalian Mutu

   Tim pengendalian Mutu beranggotakan :

   a. Kepala Badan Litbang Kota Tasikmalaya;
   b. Penjabar administrator dan pejabat pengawasan di Badan Litbang Kota Tasikmalaya;dan
   c. Tenaga ahli/pakar/praktisi.

   Tim pengendali mutu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memberikan penilaian atas rangakaian kelitbangan;
b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
c. Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan;dan
d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

Tim pengendalian mutu ditetapkan dengan keputusan Walikota.

3. Tim Kelitbangan

Tim kelitbangan terdiri atas Unsur Pelaksanaan dan Unsur Penunjang.

a. Unsur pelaksanaan beranggotakan :
   - Pejabat fungsional keahlian;
   - Pejabat struktural;dan
   - Tenaga ahli/pakar/praktisi.

Unsur pelaksanaan mempunyai tugas :

- Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian;dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Litbang Kota Tasikmalaya.

b. Unsur penunjang beranggotakan :
   - Sekretaris Badan Litbang Kota Tasikmalaya;
   - Pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas di Badan Litbang Kota Tasikmalaya;
   - Tenaga ahli/pakar/praktisi.

Unsur penunjang mempunyai tugas :

- Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- Memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- Memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Kota Tasikmalaya;

- Menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis,produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan;dan
- Melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Litbang Kota Tasikmalaya.

Tim kelitbangan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Tasikmalaya.

Hambatan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kelitbangan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti kelitbangan. Solusi yang dilakukan untuk hambatan tersebut dilakukan peningkatan kerjasama dengan tenaga ahli perorangan atau perguruan tinggi negeri yang berkualitas, namun harus tetap disesuaikan dengan anggaran dan perencanaan.

Komponen kelitbangan di Kota Tasikmalaya melaksanakan koordinasi sekurang-kurangnya setahun sekali, dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan lainnya. Forum kelitbangan merupakan suatu media pertemuan dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Rapat perencanana kelitbangan dilaksanakan oleh internal Kelitbangan dengan Kepala Bappelitbangda untuk membahass usulan kajian dari pemangku kepentingan yang masuk ke dalam rencana kegiatan dan anggaran tahun selanjutnya.

Tabel 4.1
Jenis-jenis Koordinasi Kelitbangan

No	Jenis Koordinasi	Pihak yang Terlibat	Tujuan Kegiatan
1	Forum Kelitbangan	Kelitbangan dan Perangkat Daerah	Sosialisasi rencana kegiatan evaluasi kelitbangan dan pengusulan kelitbangan tahun yang akan datang. Peningkatan kapasitas dan *sharing knowledge*
2	Rapat Perencanaan Kelitbangan	Kelitbangan dan Kepala Bappelitbangda	Pembahasan usulan kajian dari pemangku kepentingan
3	Rapat Pengawasan Evaluasi	Kelitbangan dan Kepala Bappelitbangda	Pembahasan kelitbangan satu tahun sebelumnya
4	Koordinasi Tim Kelitbangan	Tim kelitbangan	Koordinasi kegiatan oleh tim internal
5	Diseminasi Kelitbangan	Seluruh Pemangku Kepentingan	Sosialisasi hasil kelitbangan di tahun berjalan

Keseluruhan komponen kelitbangan yang terdiri dari Majelis Pertimbangan (MP), Tim Pengendali Mutu (PTM), Sekretariat TPM dan Tim Kelitbangan (TK) melaksanakan koordinasi/atau sidang sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Sidang tersebut juga di ikuti oleh para pemangku kepentingan lainnya.

Sidang tersebut dilaksanakan sebagai media bagi Majelis Pertimbangan (MP) untuk memberikan arah dan kebijakan umum kepada seluruh komponen kelitbangan. selain sidang tahunan tersebut, terdapat bentuk koordinasi lain yang diselenggarakan oleh Tim Pengendali Mutu (PTM) guna memberikan penilaian dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kelitbangan. peneliana dan pengendalian itu dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun yaitu pada tengah dan akhir tahun. Dalam sidang ini hanya komponen kelitbangan yang terlibat.

Unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagai pembentuk Tim Kelitbangan dapat melaksanakan koordinasi baik sendiri-sendiri (internal pada masing-masing unsur) atau bersama-sama (antar unsur) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tentunya koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tugas-tugas yang ditetapkan untuk masing-masing tim kelitbangan.

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Kerjasama dan kolaborasi merupakan suatu hal pendukung kelitbangan yang sangat penting. Jejaring dengan aktor-aktor kelitbangan khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kelitbangan.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya dari rencana Induk Kelitbangan ini bahwa inovasi pada dasarnya lebih kepada proses sosial dan tidak hanya berasal dari hasil-hasil penelitian. Inovasi banyak lahir dari para usahawan (*enterpreneur*) yang menerjemahkan ide menjadi nyata. Salah satu arah kebijakan telah menggariskan bahwa kelitbangan perlu untuk meningatkan jejaring (*networks*) dan kolaborasi dengan aktor-aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta. Di antara strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah :

1. Sosialisasi rancangan agenda dan prioritas riset kelitbangan di Kota Tasikmalaya kepada berbagai level dan lingkup stakeholders mulai dari lembaga pemerintah kementerian maupun non kementerian maupun, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga

riset/kelitbangan independen, perusahaan swasta, perguruan tinggi hingga ke komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelitbangan melalui berbagai forum serta berbagai media komunikasi baik media elektronik maupun media cetak.

2. Membangun kesepahaman bersama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kelitbangan daerah dan mewujudkan dalam bentuk konsorsium riset daerah.
3. Mengembangkan kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menghasilkan invensi-invensi yang mendorong terjadinya perbaikan mutu produk, efisiensi usaha dan terciptanya produk yang berdaya saing.
4. Mengembangkan skema insentif bagi para peneliti luar untuk dapat melaksanakan penelitian di Kota Tasikmalaya dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Strategi yang digunakan untuk arah kebijakan penguatan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi adalah :

1. Membangun kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan melalui bimtek, training, pelatihan;
2. Mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk dukungan sarana dan prasarana kelitbangan serta pengembangan manajemen kelitbangan untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan pemenafaatan hasil kelitbangan;
3. Mengembangkan kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga penelitian non pemerintah, lembaga kelitbangan pusat, lembaga kelitbangan peemrintah daerah lain, UMKM dan komunitas/masyarakat;
4. Memperkuat dan membangun kolaborassi antar peneliti baik skala nasional maupun internasional;

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi para pemangku kepentingan kelitbangan laiinya adalah

1. Kementerian/Lembaga (K/L), khususnya unsur kelitbangannya;
2. LSM
3. Lembaga Riset Inpenden;
4. Perusahaan Swasta;

5. Perguruan Tinggi;dan
6. Pelaku UMKM

Strategi ke depan yang ditingkatkan adalah memperkuat kerjasama eksisting dengan seluruh pemangku kepentingan kelitbangan. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat tercipta optimalisasi kualitas dan kuantitas kelitbangan di Kota Tasikmalaya.

4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kelitbangan Kota Tasikmalaya tidak dapat hanya bergantung dari anggaran daerah, sehingga dala pelaksanannya memerlukan kerjasama dan kolabirasi kelitbangan, selain itu juga dapat memanfaatkan APBN serta hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Hubungan jejaring antar institusi kelitbangan dan perguruan tinggi akan mempercepat dan memperluas diseminasi hasil kelitbangan dan iptek. Kegiatan kelitbangan menjadi semakin penting dalam berkontribusi untuk percepatan reformasi birokrasi dan perbuatan inovasi, serta penerapan dan tindak lanjut kelitbangan akan lebih implementatif. Pemantapan penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu juga diperlukan dalamm sinergitas pelaksanaan kelitbangan, serta perlunya mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang dan mengembangkan kerjasama kelitbangan.

Bentuk-bentuk kerjasama yang diharapkan dapat dijalin dengan para pemangku kepentingan kelitbangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Bentuk-bentuk Kerjasama yang Diharapkan dengan Para Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan	Bentuk Kerjasama yang Diharapkan
1	Kementerian dan Lembaga Pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain	• Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana kelitbangan • Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan • Kebijakan yang memudahkan pengembangan kelembagaan kelitbangan di daerah • Kerjasama dan kolaborasi riset

No	Pemangku Kepentingan	Bentuk Kerjasama yang Diharapkan
		• Pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti, perekayasa maupun analisis kebijakan • Pemenuhan sarana publikasi baik akses ke jurnal terakreditasi dan seminar ilmiah
2	Perguruan Tinggi	• Kerjasama kelitbangan baik sebagai tenaga ahli/tim kelitbangan, narasumber, reviewer hasil kajian • Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan • Kerjasama dan kolaborasi riset dan kelitbangan
3	Lembaga Kelitbangan Non Pemerintah dan Perusahaan Swasta, Pelaku UMKM	• Kerjasama dan kolaborasi, riset dan kelitbangan • Pengembangan inkubator bisnis • Penerapan hasil-hasil kelitbangan • Penerapan inovasi
4	Seluruh Pemangku Kepentingan	Masukan dalam kegiatan kelitbangan baik rencana induk, rencana kerja dan proses kelitbangan

Tabel 4.3
Kerjasama dan Sinergitas Antar Lembaga/Instansi

No	Prioritas Riset	Pengusul/pelaksana	Sumber Dana
1	Pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik	Diskominfo, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
2	Pengembangan akuntabilitas kinerja publik	Setda, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
3	Perumusan city branding	Setda, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
4	Pengembangan budaya gotong royong dan pengembangan kesenian	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya

No	Prioritas Riset	Pengusul/pelaksana	Sumber Dana
5	Pemenuhan kebutuhan air bersih		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
6	Pembentukan masyarakat tangguh bencana	BPBD, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
7	Pengembangan destinasi wisata	Dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
8	Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah	Bapelitbangda, Dinas pekerjaan umum dan tata ruang	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
9	Pengembangan ekonomi perkotaan dan perdesaan	Bapelitbangda, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
10	Pemenuhan sanitasi sehat	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
11	Penyediaan aksesibilitasi wilayah kumuh	Dinas perumahan dan kawasan permukiman, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
12	Pengembangan UMKM dan kerajinan tradisional	Dinas koperasi, usaha mikro,kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
13	Penumbuhan kewirasusahaan	Dinas koperasi, usaha mikro,kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
14	Pemenuhan teknologi tepat guna pertanian	Dinas ketahanan pangan,pertanian dan perikanan, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
15	Pemenuhan bibit unggul untuk pertanian dan perkebunan	Dinas ketahanan pangan,pertanian dan perikanan, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya
16	Pengembangan pengelolaan limbah ekonomis	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas lingkungan, PTN/PTS	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Anggaran Instansi, Swadaya

Strategi peningkatan kelitbangan Kota Tasikmalaya adalah dengan pengintergarsian Rencana Induk Kelitbangan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tasikmalaya serta RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Tasikmalaya, hal tersebut dapat mendorong peningkatan penerapan dan pemanfaatan hasil kelitbangan, dalam hal ini RIK (Rencana Induk Kelitbangan) dapat di jadikan sebagai

panduan dalam mengisi kekosongan rencana pembangunan yang ada di Kota Tasikmalaya. Selain itu diperlukan pula penerapan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) Kelitbangan di Lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Sinergi kelitbangan pusat dengan daerah juga dapat mendorong kebijakan dan perencanaan daerah berbasis riset dan peningkatan inovasi daerah, untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia kelitbangan.

Mengikuti dunia digital saat ini, perlunya perubahan pola pikir bahwa koordinasi dan sinergi tidak hanya melalui pelaksanaan forum dan rapat-rapat secara tatap muka, namun perku juga sentuhan teknologi, pada saat ini rapat melalui daring sedang banyak dilakukan, selain itu juga dapat memanfaatkan website untuk mempermudah pemangku kepentingan dan masyarakat melihat perkembangan kelitbangan.

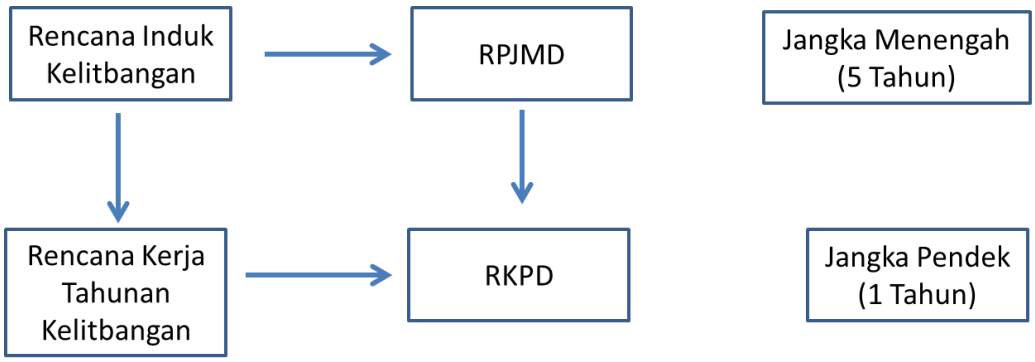

Gambar 4.1
Integrasi Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Dalam upaya tersedianya hasil penelitan, pengembangan dan inovasi daerah yang implementatif, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Peneliti dan dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya. Untuk menjalankan proses penelitian yang berlangsung di Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, secara internal mekanisme pelaksnaan penelitian, dimulai dari pengusulan kegiatan ditingkat tim pelaksana. Tim pelaksana dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan output tema dan usulan kegiatan penelitian yang akan diajukan ke tahap selanjutnya yakni Majelis Pertimbangan.

Melalui Majelis Pertimbnagan, tema dan usulan kegiatan diseleksi berdasarkan pertimbnagan skala prioritas dan kebutuhan peemrintah dalam melaksanakan program pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan baik oleh Tikm Pelaksana maupun Tim Ahli, maka dilakukan seleksi dan assesment. Seleksi dan assesment kelayakan usulan dan hasil kegiatan penelitian dilakukan oleh Tim Pengendali Mutu. Berdasarkan hasil penilaian dan saran dari Tim Pengendali Mutu, Tim Pelaksana akan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Mutu dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkup Bapelitbangda Kota Tasikmalaya. Alur seleksi dan evaluasi kegiatan penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2
Alur Seleksi dan Evaluasi Kegiatan Penelitian

Mekanisme di atas diharapkan menghasilkan satu keputusan yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, baik yang dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagai bagian dari kelitbangan maupun hasil seleksi terhadap calon Tim Ahli yang akan menjalankan mekanisme dan tahap penelitian.

Kelitbangan Kota Tasikmalaya dalam 4 (empat) tahun kedepan harus lebih mengembangkan inovasi daerah dan sistem inovasi daerah, strategi ke arah hasil kelitbangan yang lebih aplikatif, serta penerapan teknologi yang bermanfaat dan tepat guna. Kelitbangan berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah, hasil kelitbangan juga didukung data dan fakta yang valid dan memiliki 3 (tiga) peran krusial dimana peran awal sebagai input penyusunan kebijakan, peran antara sebagai katalisator pencapaian sasaran dan peran akhir sebagai evaluasi kebijakan/program. Oleh karena itu, kelitbangan perlu menekankan pada tugas pokok dan fungsi dalam melakukan identifikasi permasalahan yang bersifat aktual dan prediktif untuk jangka menengah dan panjang, serta dalam jangka pendek memberikan pertimbangan teknis bagi pimpinan daerah untuk pengambilan langkah dan kebijakan strategis.

Dalam pelaksanaanya, kelitbangan dapat berperan dalam penyusunan naskah akademik dan penyediaan data bagi perangkat daerah, perumusan bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, serta penggerak inovasi daerah. dalam implementasinya, tidak semua hasil kelitbangan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, mengingat terlaksanannya kebijakan tidak selalu berjalan dengan baik dan ada faktor-faktor penghambat, seperti jadwal perencanaan, hambatan dari sisi penganggaran kegiatan, serta komitmen perangkat daerah pengusul kegiatan kelitbangan. Saat ini, salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya komitmen perangkat daerah pengusul terkait dengan tidak dijalankannya rekomendasi hasil kajian kelitbangan meskipun kegiatan kajian kelitbangan sesuai dengan program di masing-masing SKPD/Perangkat Daerah. Di sisi lain,kendala politis seperti kebijakan pimpinan juga dapat menghambat pelaksanaan rekomendasi dari kajian kelitbangan yang dilakukan. Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh *political will.*

Tantangan yang diperoleh dari hasil evaluasi kondisi eksisting lainnya adalah adanya inovasi maupun kajian dari Perangkat Daearah di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang belum melalui proses kelitbangan. Dalam beberapa kegiatan, hal ini kemudian berdampak pada perbedaan standar kualitas kajian kelitbangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya dan optimalisasi pemanfaatan inovasi daerah karena terkait dengan urgensi yang sebenarnya dapat dikaji melalui proses kelitbangan.

Bab 5
Penutup

Dalam rangka mewujudkan kelitbangan dan inovasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelitbangan khususnya pejabat fungsional peneliti dan perekayasa dan mengefisienkan tata kelola di BAPPELITBANGDA Kota Tasikmalaya, maka disusunlah Rencana Induk Kelitbangan yang merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah, khususnya BAPPELITBANGDA Kota Tasikmalaya sebagai perangkat litbang daerah.

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) ini merupakan arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan kurun waktu 4 (empat) tahun. Tujuan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) ini adalah untuk memberikan masukan dalam peyusunan atau perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya dan menjadi acuan untuk mengakomodasi kebutuhan program kelitbangan di saat terjadi kekosongan dokumen rencana di Kota Tasikmalaya. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan (RIK) adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebojakan/regulasi berbasis kelitbangan.

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) ini memuat arah kebijakan kelitbangan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, dipaparkan keterkaitan antara misi yang diemban oleh perangkat litbang daerah serta indikator-indikatornya. Selanjutnya Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Tasikmalaya 2022-2025 menjabarkan keterkaitan antara misi pembangunan daerah, isu-isu strategis, program/tema/kegiatan kelitbangan di Kota Tasikmalaya. Rencana Induk Kelitbangan disusun melalui proses yang parsitipatif, mulai dari identifikasi potensi dan permasalahan, peluang dan tantangan, hingga isu-isu pokok dan indikasi program-program prioritas.

Implementasi dari Rencana Induk Kelitbangan (RIK) perlu didukung dengan kelembagaan kelitbangan yang lengkap dan kuat. Salah satu yang harus ditindaklanjuti

yaitu pembentukan perangkat-perangkat kelembagaan kelitbangan yang meliputi Majelis Pertimbangan, Tim Pengendalian Mutu, Sekretariat tim Pengendalian Mutu, Unsur Pelaksanaan dan Unsur Penunjang pada Tim Kelitbangan.

Selain implementasi dan tindak lanjut dari Rencana Induk Kelitbangan (RIK) ini perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan kelitbangan. Evaluasi kelitbangan perlu dilaksanakan dua kali dalam setahun oleh Tim Pengendali Mutu (PTM) yang meliputi evaluasi tebgah tahun dan evaluasi akhir tahun. Evaluasi dilakukan menggunakan seperangkat indikator kinerja kunci yang disusun dan didesain sedemikian rupa menyesuaikan kondisi yang ada di Kota Tasikmalaya sehingga mewakili keseluruhan komponen kinerja kelitbangan yang meliputi tingkat konsistensi anatara Rencana Induk dan Rencana Kerja Tahunan, tingkat keterlibatan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lain, tingkat penindaklanjutan (*follow up*) dari hasil-hasil keelitbangan serta tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kelitbangan.

Keterlibatan seluruh sumber daya manusia kelitbangan di BAPPELITBANGDA Kota Tasikmalaya sangat diharapkan dalam kerangka menuju institusi daerah yang terdepan melalui pengembangan IPTEK Inovatif berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal. Keberhasilan pelaksanaan program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan yang terdapat didalam Rencana Induk Kelitbangan (RIK) sangat bergantung kepada kerjasama dan komitmen seluruh pihak terkait khususnya di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu komitmen dari perangkat litbang daerah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik lokal, nasional maupun internasional sangat diperlukan sehingga diperoleh dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, anggaran dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan kapasitas peneliti dan mengefisiensikan tata kelola penelitian di Kota Tasikmalaya maka di susun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang merupakan acuan bagi seluruh *stakeholders* kelitbangan di Kota Tasikmalaya. Keterlibatan seluruh stakeholder kelitbangan diharapkan dapat mengembangkan riset/penelitian daerah melalui pengembangan IPTEK inovatif berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal. Pelaksanaan program Rencana Induk Kelitbangan (RIK) di Kota Tasikmalaya dberjalan sesuai dengan program yang disusun. Keberlanjutan pelaksanaan program riset pada Rencana Induk Kelitbangan (RIK) diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang terdapat didalam RPJP dan RPJMD Kota Tasikmalaya.